

Dr. H. Anis Fauzi, M.SI



PERSPEKTIF

ILMU DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN



PERSPEKTIF

ILMU DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

Buku ini ditulis khususnya untuk mahasiswa yang akan atau sedang menempuh studi pada jenjang pascasarjana program S-2 bidang ilmu Manajemen Pendidikan. Namun demikian, pembahasan yang ada dalam buku ini masih relevan untuk mahasiswa S-1 bidang ilmu Manajemen Pendidikan serta mahasiswa dari program studi lain yang berminat. Termasuk didalamnya cocok juga dijadikan bahan bacaan guru di sekolah, guru di madrasah, tenaga kependidikan di sekolah, tenaga kependidikan di madrasah, birokrat pendidikan serta pengamat dan peminat kajian bidang Manajemen Pendidikan.

Buku ini merupakan bagian dari pengalaman penulis saat memberikan materi perkuliahan Filsafat Ilmu dan Manajemen Pendidikan dan juga Seminar Pengembangan Proposal Tesis Program S2 pada bidang ilmu Manajemen Pendidikan. Buku ini juga merupakan hasil pengamatan dan perenungan penulis pada saat berperan sebagai pembimbing maupun penguji penulisan skripsi dan penulisan tesis dalam koneksi ilmu Manajemen Pendidikan. Buku ini merupakan bagian bentuk apresiasi penulis dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen dalam berbagai mata kuliah pada rumpun ilmu Manajemen Pendidikan.

Buku Perspektif Ilmu dan Manajemen Pendidikan ini mendorong para pembaca untuk berfikir, menyelidiki fenomena pendidikan di sekitar tempat tinggalnya maupun di sekitar tempat kerjanya, dan menuangkan hasil pengamatan maupun hasil pemikirannya kedalam karya tulis ilmiah berbentuk artikel yang siap dan layak diterbitkan pada jurnal nasional Terakreditasi Sinta atau mendokumentasikan karya tulis yang dihasilkan dalam bentuk buku referensi.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



PERSPEKTIF ILMU DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

Dr. H. Anis Fauzi, M.Si.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PERSPEKTIF ILMU DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN

Penulis : Dr. H. Anis Fauzi, M.SI.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Husnun Nur Afifah

ISBN : 978-623-516-479-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, SEPTEMBER 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

MOTTO

“Barangsiapa perbuatannya hari ini lebih baik dari hari kemarin, ia beruntung; barangsiapa perbuatannya hari ini sama dengan hari kemarin, ia tertipu; dan barangsiapa perbuatannya hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, ia terlaknat” (Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Buku *Perspektif Ilmu dan Manajemen Pendidikan* ini dipersembahkan kepada istri tercinta Hj. Humaeroh, S.Ag.S.Pd., dan anak-anak tersayang Adi Fauzul Azhim, S.Pi., Dina Nisauzakiyah, S.Ak., serta Nadya Zulfatul Istiqomah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas izin Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya proses penulisan buku ini mencapai titik kulminasi. Buku ini bisa selesai ditulis, ditulis kembali, diedit, dan diedit kembali melalui beberapa tahapan. Dan pada akhirnya bisa selesai serta bisa diterbitkan oleh penerbit handal yang sekarang berada di tangan pembaca. Semoga Allah SWT melipatgandakan nilai ibadah mereka yang memiliki andil dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Amin Yaa Robbal Alamiin.

Buku yang berjudul “Perspektif Ilmu dan Manajemen Pendidikan” ini membahas mengenai seluk beluk proses pembelajaran mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah dan juga di madrasah, serta membahas pula keanekaragaman tata kelola proses pendidikan dalam skala mikro (sekolah/madrasah), skala meso (kabupaten/kota dan provinsi) serta skala mikro (mencakup wilayah ke-Indonesia-an)

Penulis menyadari bahwa tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada karya yang tidak memiliki kesalahan – keterbatasan – karaguan – dan ketidakpastian. Penulis mengakui bahwa tulisan ini pun tak luput dari kesalahan – keterbatasan – karaguan – dan ketidakpastian tersebut. Oleh karena itu, penulis mohon agar para pembaca memberikan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan karyatulis ini pada edisi revisi nanti.

Penulis berharap agar tulisan ini menjadi “*Indah pada waktunya*” baik bagi diri penulis maupun bagi para pembaca yang budiman.

Serang, September 2024

Anis Fauzi

UCAPAN TERIMA KASIH

Sehubungan dengan penerbitan buku “Perspektif Ilmu dan Manajemen Pendidikan” ini, banyak orang perseorangan maupun kelompok kolektivitas tertentu yang terlibat didalamnya, terutama penulis mengucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Prof. Dr. H. Ilzamudin Ma’mur, MA., serta rekan-rekan sesama dosen, terutama nama-nama berikut yang sulit dilupakan kontribusinya, mereka adalah: Habibi, S.Pd.I, Wiwin Nurhanah, M.Pd.I, Ila Nurlaila, M.Pd.I, Ahmad Jubaeri, M.Pd., Khawasi, M.Pd.I, Saeful Amri, M.Pd.I, Siti Sulastri, M.Pd.I, Firda Yuliarda, M.Pd.I, Mujibudda’wah, M.Pd.I, Duriyat M.Pd.I, Iis Herlina, M.Pd.I, Lilis Sholihah, M.Pd.I, Dr. Siti Ngaisah, M.Ag., Uyu Muawwanah, M.Pd., Taufiqoh, M.Pd.I, Tatu Latifah, M.Pd.I, Ihat Subihat, M.Pd.I, Ahmad Sakuro, MA., dan Inni Nihayah, M.Pd. Semoga amal baik mereka mendapat imbalan pahala yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin...

DAFTAR ISI

MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PETA PEMIKIRAN PENGEMBANGAN SDM BIDANG	
PENDIDIKAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Tantangan Sektor Pendidikan	3
C. Matriks Pengembangan SDM Bidang Pendidikan	4
D. Karakteristik SDM Bidang Pendidikan	5
E. Interaksi SDM Bidang Pendidikan	8
F. Konflik SDM Bidang Pendidikan	12
G. Integrasi SDM Bidang Pendidikan	17
H. Kolaborasi SDM Bidang Pendidikan	18
I. Simpulan	19
DAFTAR PUSTAKA	20
BAB 2 PENGUASAAN MATERI STANDAR, PENGELOLAAN	
PROGRAM PEMBELAJARAN, DAN PENGELOLAAN	
KELAS	21
A. Pendahuluan	21
B. Strategi Pembelajaran	23
C. Penutup	26
DAFTAR PUSTAKA	27
BAB 3 KONTRIBUSI KOMPETENSI PROFESIONAL DAN	
PEDAGOGIK TERHADAP KINERJA GURU	28
A. Pendahuluan	28
B. Teori Motivasi	30
C. Teori Kompetensi	31
D. Teori Kinerja	32
E. Program Sertifikasi Guru	33
F. Kesimpulan	34
DAFTAR PUSTAKA	36

BAB 4	PENERAPAN METODE JIGSAW DAN SPIRITUAL QUOTIENT DALAM PEMBELAJARAN.....	37
	A. Pendahuluan	37
BAB 5	KREATIVITAS GURU PAI DAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN KELAS UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA.....	41
	A. Pendahuluan	41
	B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas.....	45
	C. Kesimpulan	49
	DAFTAR PUSTAKA	50
BAB 6	PERANAN ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (AGPAI) DALAM PENINGKATAN PRPFESIONALISME GURU PAI	52
	A. Pendahuluan	52
	B. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia	53
BAB 7	DAMPAK IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING & LEARNING (CTL) DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PAI.....	63
	A. Pendahuluan	63
	B. Contextual Teaching and Learning (CTL).....	64
	C. Perspektif Belajar dan Peran Guru dalam Pembelajaran <i>Contextual Teaching and Learning (CTL)</i>	66
	D. Motivasi Belajar	66
	E. Hasil Belajar PAI	67
	F. Kesimpulan	68
	G. Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	70
BAB 8	KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU DAN DISIPLIN BELAJAR SISWA.....	72
	A. Pendahuluan	72
	B. Kesimpulan	75
	DAFTAR PUSTAKA	76
BAB 9	KEBIJAKAN OTONOMI SEKOLAH DAN OTONOMI BIROKRASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA	77
	A. Pendahuluan	77
	B. Kebijakan Otonomi Sekolah dan Otonomi Birokrasi Pendidikan	79

C. Analisis Kebijakan Otonomi Sekolah dan Otonomi Birokrasi Pendidikan	87
D. Kesimpulan dan Rekomendasi	91
DAFTAR PUSTAKA	93
BAB 10 KEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH BERBASIS MORAL DAN NILAI UNTUK VISI INDONESIA 2030	94
A. Pendahuluan	94
B. Kepemimpinan.....	97
C. Kepala Sekolah	98
D. Nilai	99
E. Moral.....	101
F. Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Nilai Menuju Visi Indonesia 2030.....	104
G. Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Moral Menuju Visi Indonesia 2030.....	108
H. Contoh Penerapan Nilai dan Moral	110
I. Kesimpulan	112
DAFTAR PUSTAKA	114
BAB 11 IMPLEMENTASI METODE PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DAN KURIKULUM 2013	116
A. Pendahuluan	116
B. Penerapan Metode Pendidikan Agama Islam terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013	120
C. Kendala yang dialami Guru Pendidikan Agama Islam dalam menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013.....	121
D. Perbedaan dan persamaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013.....	128
E. Metode Pendidikan Agama Islam yang cocok dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013	130
F. Kesimpulan	132
DAFTAR PUSTAKA	133

BAB 12 PERAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN	
AGAMA ISLAM DALAM PENINGKATAN MUTU	
SEKOLAH	135
A. Pendahuluan	135
B. Karakteristik Guru PAI	138
C. Mutu Sekolah	140
DAFTAR PUSTAKA	143
BAB 13 DAMPAK PROFESIONALISME GURU DAN KREATIVITAS	
BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR.....	144
A. Pendahuluan	144
B. Kerangka Teori.....	146
DAFTAR PUSTAKA	156
BAB 14 KOMPETENSI DAN MOTIVASI KERJA GURU	
DIKAITKAN DENGAN HASIL BELAJAR SISWA.....	158
BAB 15 MASJID SEBAGAI PUSAT PEMBINAAN REMAJA.....	165
A. Pendahuluan	165
B. Problema Remaja.....	166
C. Pembinaan Remaja.....	170
D. Fungsi Masjid pada Masa Rasulullah.....	172
E. Optimalisasi Fungsi Masjid	175
F. Kesimpulan	178
CATATAN AKHIR.....	180
DAFTAR PUSTAKA	181
TENTANG PENULIS.....	182

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Matrik Pemikiran Pengembangan SDM Bidang Pendidikan.....	4
------------------	--	---



**PERSPEKTIF ILMU
DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN**

Dr. H. Anis Fauzi, M.SI.



BAB

1

PETA PEMIKIRAN PENGEMBANGAN SDM BIDANG PENDIDIKAN

A. Pendahuluan

Sumber daya manusia dalam bidang pendidikan terdiri atas: siswa, guru, staf tata usaha, mahasiswa, dosen, pegawai struktural, birokrat pendidikan, stakeholder, orang tua siswa, orang tua mahasiswa, masyarakat sekitar sekolah, dan masyarakat sekitar kampus. Antar SDM bidang pendidikan memiliki karakter tersendiri, pola interaksinya khas, sering terjadi konflik, kemungkinan ada upaya untuk berintegrasi, serta ada peluang untuk melakukan kolaborasi dalam rangka pemberdayaan sesama SDM bidang pendidikan.

Keberadaan sumber daya manusia tersebut perlu dibina dan dikembangkan kearah yang lebih baik. Unsur SDM bidang pendidikan yang lebih diutamakan untuk dibina dan dikembangkan lebih jauh sangat tergantung dari pemikiran para perancang pembangunan di bidang pendidikan. Tidak boleh mengutamakan satu unsur SDM bidang pendidikan, tetapi mengabaikan unsur-unsur SDM bidang pendidikan lainnya. Boleh jadi, di wilayah tertentu dan pada masa tertentu, aspek guru memegang peran kunci dalam pengembangan SDM bidang pendidikan. Tetapi keadaan tersebut akan berubah bila mengkaji permasalahan SDM bidang pendidikan yang mendesak di wilayah lainnya dalam waktu yang sama, katakanlah ada wilayah yang lebih mengutamakan pembangunan gedung sekolah secara permanen daripada mensuplai tenaga guru baru. Di wilayah lainnya justru lebih berkepentingan untuk mencari dan menambah jumlah siswa di seluruh jenjang, jenis dan jalur pendidikan daripada membina kinerja guru maupun pengadaan sarana prasarana.

Pengembangan SDM dalam bidang pendidikan harus mencakup seluruh unsur. Unsur siswa dan mahasiswa perlu dikembangkan secara simultan, unsur staf tata usaha dan karyawan perlu dikembangkan secara optimal, unsur guru dan dosen perlu dikembangkan secara profesional, unsur stakeholder, masyarakat sekitar sekolah dan kampus perlu dikembangkan lebih jauh. Tentu dengan penekanan pada kinerja, motivasi, hadiah dan sanksi tertentu.

Menurut Dedy Mulyasana (2011:16), sumber daya pendidikan belum cukup andal untuk mendukung tercapainya tujuan dan target pendidikan secara efektif. Sumber daya pendidikan masih dipandang lemah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sumber daya pendidikan yang ada lebih banyak difokuskan pada urusan administratif daripada diarahkan pada proses pembelajaran secara utuh, total dan menyeluruh.

Pada bagian lainnya, Dedy Mulyasana (2011:23) menyatakan bahwa tuntutan perubahan telah memaksa paradigma pendidikan secara perlahan bergerak ke arah yang lebih terbuka, profesional dan demokratis. Dampak dari itu semua, ditengarai akan terjadi pergeseran dalam paradigma pendidikan.

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia sudah saatnya menerapkan paradigma manajemen pendidikan sebagai bagian dari strategi pembangunan pendidikan, hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut (Onisimus Amru, 2011:27-28): Pertama, manajemen atau pengelolaan tidak saja berkaitan dengan produk berupa barang (material) melainkan juga berupa jasa layanan. Kedua, mutu produk pendidikan berlangsung dalam suatu proses dan aktivitas yang memerlukan partisipasi serta tanggungjawab berbagai pihak (pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat dan stakeholder). Ketiga, manajemen pendidikan dapat dipandang sebagai suatu strategi peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, bersendikan kemanusiaan dan membutuhkan pemberdayaan melalui aktivitas belajar mengajar. Keempat, organisasi pendidikan dapat mengadopsi struktur manajer dalam pengelolaan pendidikan. Mental, budaya dan iklim kerja organisasi pendidikan dalam kurun waktu yang panjang telah berdampak bagi para birokrat dan praktisi pendidikan.

Permasalahannya adalah bagaimana menempatkan sasaran pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang bergelut di bidang pendidikan. Tentu diperlukan strategi pemikiran dan kebijakan tertentu yang lebih transparan serta terfokus.

B. Tantangan Sektor Pendidikan

Menurut Gudmund Hernes dalam Nanang Fatah (2012), ada tujuh tantangan global yang dihadapi oleh sektor pendidikan, yaitu: (1) mengurangi kesenjangan dalam pemerataan pendidikan, kemiskinan, marginalisasi dan eksklusivitas pendidikan, (2) mengukuhkan hubungan yang lebih baik antara pendidikan dan ekonomi setempat (lokal) dan antara pendidikan dengan dunia kerja yang mengglobal, (3) Mencegah berkembangnya peran dari riset dan pendidikan yang dikendalikan oleh pasar dan melebarnya kesenjangan teknologi dan ilmu pengetahuan diantara negara industri dan negara berkembang, (4) Menjamin bahwa persyaratan riset negara berkembang menerima perhatian dan ditunjukan oleh ilmuwan dan sarjananya, (5) Mengurangi dampak negatif dari "brain drain" dari negara miskin ke negara kaya, dan dari wilayah tertinggal ke wilayah maju, (6) mengarahkan dampak dari prinsip-prinsip pemasaran dan perubahan peran dari negara terhadap pendidikan, serta (7) Menggunakan sistem pendidikan tidak hanya untuk memindahkan batang tubuh keilmuan secara umum,

Menurut Tilaar (2000), desentralisasi pendidikan justru akan memperkuat tumbuhnya suatu perasaan nasional yang lebih sehat dan lebih nyata karena didasarkan kepada kekayaan budaya atau praksis pendidikan lokal. Desentralisasi pendidikan ternyata merupakan suatu proses yang kompleks, oleh karena: (1) akan menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkret; (2) mengatur sumber daya serta pemanfaatannya; (3) melatih tenaga-tenaga (SDM) yang profesional, baik tenaga guru maupun tenaga-tenaga manajer pada tingkat lapangan; (4) menyusun kurikulum yang sesuai, dan (5) mengelola sistem pendidikan yang berdasarkan kepada kebudayaan setempat.

Hasil penelitian Monry FNGR (Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2014) tentang Kajian Implementasi Program Pendidikan Menengah Universal Pada SMA dan SMK di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, diantaranya menyimpulkan bahwa permasalahan terbesar yang dihadapi kepala sekolah adalah masih

banyaknya guru yang kurang berdedikasi terhadap kemajuan sekolah, hal ini dapat berdampak pada pelaksanaan program Pendidikan Menengah Universal nantinya, karena guru diharapkan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program tersebut. Pada bagian berikutnya, Monry FNGR menyimpulkan pula bahwa pemerintah daerah harus bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pemberian bantuan bagi peserta didik yang tidak menerima bantuan operasional sekolah.

C. Matriks Pengembangan SDM Bidang Pendidikan

Guna menjelajah kemungkinan penekanan sasaran pembinaan sumber daya manusia, berikut ini penulis akan mengajukan konsep “Peta Pemikiran Pengembangan SDM Bidang Pendidikan”, sebagaimana tampak pada matrik berikut ini.

Tabel 1.1 Matrik Pemikiran Pengembangan SDM Bidang Pendidikan

Karakteristik	Interaksi	Konflik	Integrasi	Kolaborasi
Guru	Guru dan Dosen	Guru dan Dosen	Guru dan Dosen	Guru dan Dosen
Dosen	Guru dan Siswa	Guru dan Siswa	Guru dan Siswa	Guru dan Siswa
Siswa	Guru dan Mahasiswa	Guru dan Mahasiswa	Guru dan Mahasiswa	Guru dan Mahasiswa
Mahasiswa	Guru dan Tata Usaha			
Tata Usaha	Dosen dan Siswa	Dosen dan Siswa	Dosen dan Siswa	Dosen dan Siswa
Stakeholder	Dosen dan Mahasiswa	Dosen dan Mahasiswa	Dosen dan Mahasiswa	Dosen dan Mahasiswa
Orang Tua Siswa	Dosen dan Tata Usaha			
Orang Tua Mahasiswa	Siswa dan Mahasiswa	Siswa dan Mahasiswa	Siswa dan Mahasiswa	Siswa dan Mahasiswa
Masyarakat Sekitar Sekolah	Siswa dan Tata Usaha			
Masyarakat Sekitar Kampus	Mahasiswa dan Tata Usaha			

D. Karakteristik SDM Bidang Pendidikan

SDM Bidang Pendidikan terdiri atas: guru, dosen, siswa, mahasiswa, tata usaha, stakeholder, orang tua siswa, orang tua mahasiswa, masyarakat sekitar sekolah, dan masyarakat sekitar kampus. Keseluruh SDM tersebut memiliki karakteristik tertentu yang satu sama lainnya tidak bisa disamakan.

Guru, pada umumnya sudah memiliki kualifikasi pendidikan strata satu pada mata pelajaran tertentu. Sebagian besar guru sudah memiliki sertifikat sebagai pendidik profesional dan telah mendapatkan tunjangan profesinya. Namun demikian, aktivitas mengajarnya didalam kelas belum tentu menunjukkan tingkat profesionalitas yang memadai. Hal ini terjadi karena situasi psikologis guru tidak stabil, kadang konfidence, kadang overacting, dan kadang tidak menentu pendirian sikapnya.

Dosen, pada umumnya sudah memiliki kualifikasi pendidikan strata dua dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Bahkan sebagian kecil dosen sudah menyelesaikan pendidikan S-3, dan sebagian besar sedang menempuh studi S-3. Tuntutan pekerjaan seorang dosen adalah: mampu menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran didalam kelas minimal 9 sks dan maksimal 16 sks. Kemudian dosen juga dituntut untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu secara mandiri maupun secara kelompok yang hasil laporannya harus diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi, tetapi memiliki ISSN. Selanjutnya seorang dosen dituntut pula untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara individual maupun secara kolektif. Selain itu, diharapkan seorang dosen juga masih sempat melakukan kegiatan tambahan dalam bentuk keikutsertaan dalam kegiatan pembangunan, kemasyarakatan, dan pemerintahan.

Siswa, pada umumnya menempuh studi tanpa melakukan pekerjaan. Jadi mereka fokus kepada penambahan keilmuan, konsep dan pengalaman praktis di sekolah. Sepulang dari sekolah, mereka cenderung bermain dengan teman-temannya sepanjang jalan menuju tempat tinggal. Tugas mengerjakan pekerjaan rumah cenderung tidak dikerjakan di rumahnya tetapi mereka cenderung mengerjakannya di sekolah, beberapa menit sebelum jam pelajaran tiba. Kekhasan mereka terletak pada semangat berangkat ke sekolah sangat tinggi dan diikuti dengan kebanggaan mengenakan

baju seragam, yang kadang-kadang tetap melekat pada badannya hingga sore hari bahkan hingga malam hari.

Mahasiswa, pada umumnya memiliki karakter yang sangat berbeda dengan karakter siswa. Seorang mahasiswa sudah mampu mengatur alokasi waktu selama 24 jam dengan melakukan berbagai aktivitas yang terkendali. Tingkat pemikiran dan kemampuan berfikir hipotesis lebih mendominasi tipologi berfikirnya. Dilihat dari segi cara berpakaian, mahasiswa cenderung sudah bisa memilih dan menentukan warna, bentuk dan corak pakaian tertentu yang cocok bagi dirinya dan juga tidak melanggar ketentuan yang diberlakukan oleh pimpinan perguruan tinggi. Kemampuan berfikir kritis dan kebebasan mengeluarkan pendapat menjadi ciri khas karakter mahasiswa. Terkadang, bila hasil pemikirannya menemui jalan buntu dan ide-ide tentang perubahan sosial, budaya politik dan ekonomi kurang mendapat respon dari pemerintah dan masyarakat tertentu, mereka melakukan aksi damai hingga aksi brutal melalui aktivitas demonstrasi secara bertahap hingga secara bergelombang dan besar-besaran. Masa-masa menjadi mahasiswa tampaknya menjadi masa yang paling indah dan menyenangkan bagi sebagian besar mahasiswa.

Staf tata usaha, pada umumnya tidak memiliki kualifikasi ijazah strata satu, mereka lebih banyak hanya lulusan SLTA. Sebagian ada yang sudah sarjana, tetapi jurusannya seringkali tidak linier dengan bidang pekerjaan yang dibutuhkan. Kemampuan kerja tata usaha hanya mengandalkan contoh tindakan dari pimpinan dan pengalaman melakukan pekerjaan. Jadi skillnya terbatas. Karena itu kompetensi mereka perlu ditingkatkan dengan cara diikutertakan dalam berbagai kegiatan pelatihan, workshop dan seminar. Tuntutan tata usaha untuk menguasai teknologi komunikasi sudah tidak bisa ditawar lagi, karena sudah menjadi keharusan yang betul-betul harus dikuasai.

Stakeholder, pada umumnya pemerintah dan masyarakat sekitar sekolah berharap agar lulusan lembaga pendidikan mampu membentuk karakter disiplin, kreatif, sungguh-sungguh dan berdaya saing bagi putera-puteri bangsa dalam menyambut pasar bebas Asia Pasifik tahun 2020 yang akan datang.

Orang tua siswa, pada umumnya sangat peduli dengan kondisi fisik dan psikologis siswanya, termasuk juga kondisi sosial ekonomi anak-anaknya. Orang tua siswa begitu perhatian kepada masa depan anak-anaknya yang ditunjukkan dengan kesetiiaannya memberi uang jajan dan juga melengkapi kebutuhan sepatu dan pakaian seragam anak-anaknya. Sebagian besar orang tua kurang peduli dengan tugas mengerjakan “pekerjaan rumah” yang telah diberikan oleh guru. Ketika hasil belajar siswa mencapai prestasi yang memuaskan, maka orang tua bilang “Alhamdulillah, anak saya naik kelas. Alhamdulillah, anak saya rangking pertama. Alhamdulillah, anak saya sudah lulus. Tetapi, apabila anaknya menemui masalah seperti tidak naik kelas, tidak mendapat rangking sepuluh besar, apalagi tidak lulus, maka orang tua siswa akan berkata: siapa sih gurunya, siapa sih wali kelasnya, dan siapa sih kepala sekolahnya.

Orang tua mahasiswa, pada umumnya tidak memahami seluk beluk dunia kampus. Orang tua mahasiswa pada umumnya memahami dunia kampus dalam dua fenomena utama, yakni saat pelaksanaan masa orientasi mahasiswa baru (semacam program Opspek), dan pada saat diselenggarakannya acara wisuda. Orang tua mahasiswa pada umumnya tidak paham indeks prestasi kumulatif (IPK), ujian tengah semester dan tugas pembuatan makalah. Pengetahuan orang tua mahasiswa hanya terbatas pada sudah mencapai tingkat berapa anaknya menempuh studi di satu perguruan tinggi, kapan mengikuti ujian sidang skripsi serta kapan anaknya diwisuda. Ketiga pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan idola bagi orang tua mahasiswa dimanapun menempuh perkuliahannya.

Masyarakat sekitar sekolah, pada umumnya berasal dari kelompok masyarakat ekonomi menengah kebawah dengan beberapa variasi yang menunjukkan kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Keberadaan sekolah membawa sejumlah keberkahan bagi masyarakat sekitarnya. Misalnya masyarakat yang membuka warung sederhana, pedagang kaki lima, serta pedagang keliling, bisa berharap agar dagangan mereka laku dan laris manis tatkala siswa dan guru di suatu sekolah berbelanja di warung penduduk setempat. Dalam batas-batas tertentu, masyarakat juga diuntungkan oleh keberadaan sekolah beserta warga sekolahnya, yang mampu berperan menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar

untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang letaknya tidak jauh dengan tempat tinggal mereka.

Masyarakat sekitar kampus, pada umumnya didominasi oleh penduduk pribumi dan penduduk pendatang. Penduduk pribumi pada umumnya berasal dari golongan ekonomi menengah kebawah, dengan beberapa keluarga berada pada golongan ekonomi menengah. Penduduk pendatangnya tentu didominasi oleh mahasiswa yang datang dari berbagai daerah sekitar kampus yang juga sedang menuntut ilmu di kampus tersebut. Interaksi penduduk pribumi dengan penduduk pendatang, yang notabene mahasiswa tersebut, berjalan relatif lancar dan damai. Mengingat antar keduanya terjadi hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Mahasiswa bisa kost atau sewa rumah penduduk, sementara penduduk setempat mendapat penghasilan tambahan dari biaya kost tersebut serta beberapa transaksi ekonomis lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Interaksi SDM Bidang Pendidikan

Antar sesama SDM bidang pendidikan ternyata terjadi interaksi langsung maupun interaksi simbolik, terutama antara: guru dan dosen, guru dan siswa, guru dan mahasiswa, guru dan tata usaha, dosen dan siswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan tata usaha, siswa dan mahasiswa, siswa dan tata usaha, serta mahasiswa dan tata usaha.

Bentuk interaksi antara guru dan dosen, terutama dalam hal pelaksanaan Praktekum Pengalaman Lapangan Kependidikan (PPLK) dan Penelitian Tidakkan Kelas (PTK). Pelaksanaan PPLK membutuhkan waktu sekitar 40 hari. Selama waktu pelaksanaan PPLK tersebut sejumlah mahasiswa praktikan dari LPTK berada di sekolah latihan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan praktekum lapangan kependidikan yang dibimbing langsung oleh guru pamong, sesuai dengan bidang studi yang ditekuninya, yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah. Dalam konteks pelaksanaan PPLK ini, setiap satu kelompok peserta PPLK didampingi oleh satu orang dosen pembina dari LPTK. Dalam proses pembimbingan mahasiswa praktikan PPLK inilah terjadi interaksi yang intensif antara guru dan dosen hingga selesainya program PPLK.

Bentuk interaksi antara guru dan siswa, terutama terjadi pada saat menjelang pembagian raport dan juga pada saat menjelang pelaksanaan study tour. Menjelang acara pembagian raport sekolah, seorang guru sangat intensif mengamati sikap dan perilaku siswanya dalam rangka penilaian prestasi non-akademik dan juga penentuan ranking kelas. Sebaliknya, seorang siswa juga membutuhkan interaksi dengan gurunya agar keberadaan dirinya berada di jalur aman untuk bisa naik kelas maupun untuk bisa lulus dari program pendidikan. Semakin intensif interaksi guru dan siswa pada saat menjelang pembagian raport diharapkan nilai raport siswa pun menjadi lebih bagus. Hal ini dimungkinkan karena guru yang menjadi wali kelas punya wewenang untuk melakukan negosiasi dengan guru mata pelajaran tertentu yang memberi nilai “kurang pas” terhadap siswa tertentu. Hasil negosiasi wali kelas dengan guru mata pelajaran tersebut bisa berdampak positif dalam arti membawa perubahan nilai yang lebih baik, bisa pula berdampak negatif dalam arti tidak ada perubahan nilai pada siswa.

Bentuk interaksi antara guru dan mahasiswa, terutama dalam kegiatan praktekum pengalaman lapangan kependidikan (PPLK) dan juga pada saat sosialisasi dan promosi perguruan tinggi dihadapan siswa kelas tiga tingkat SLTA (SMA, SMK, dan MA). Pada saat pelaksanaan PPLK, hubungan guru dengan mahasiswa sangat intensif, terutama guru pamong. Sekalipun hanya guru pamong saja yang berhak memberi penilaian terhadap mahasiswa peserta PPLK, tetapi secara spontan semua guru pasti menilai keberadaan mahasiswa peserta PPLK. Penilaian kebanyakan guru terhadap mahasiswa peserta PPLK terfokus kepada penampilan mahasiswa selama berada di lingkungan sekolah, penilaian juga ditujukan kepada sikap peserta PPLK terhadap guru-guru maupun terhadap seluruh siswa lainnya. Bila sikap dan penampilan mahasiswa peserta PPLK dipandang tidak baik, maka sejumlah program kerja mahasiswa PPLK kurang mendapat dukungan dari para wali kelas. Akhirnya sejumlah agenda kegiatan mahasiswa PPLK menjadi terhambat oleh ulah sejumlah guru yang memberi penilaian negatif terhadap mahasiswa PPLK.

Bentuk interaksi antara guru dan tata usaha, terutama dalam pengisian biodata siswa di raport dan pada saat menghadapi siswa bermasalah hingga memerlukan surat panggilan untuk orangtua

atau perlunya kegiatan home visit terhadap siswa yang bermasalah. Guru kelas satu, khususnya guru yang diberi tugas tambahan sebagai wali kelas, harus mengisi biodata atas siswa yang dibimbingnya. Guna memperlancar pengisian biodata inilah, guru kelas I harus berinteraksi dengan pegawai tata usaha. Karena data-data siswa banyak tersimpan di bagian tata usaha. Tanpa kontribusi pegawai tata usaha, sangat sulit seorang wali kelas satu bisa mengisi biodata siswanya dengan sukses dan lancar.

Bentuk interaksi antara dosen dan siswa, terutama terjadi pada saat diselenggarakannya acara seminar atau pelatihan berbasis siswa yang diselenggarakan oleh pihak kampus LPTK (seperti lomba cerdas cermat dan lomba pidato tiga bahasa) maupun yang diselenggarakan oleh pihak sekolah (penyuluhan pemilihan jurusan dan pengembangan karir).

Bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, terutama dalam pelaksanaan perkuliahan dan kegiatan ekstrakurikuler atau keorganisasian didalam maupun diluar kampus. Pada saat pelaksanaan perkuliahan didalam kelas, terjadi interaksi edukatif yang tinggi antara dosen dan mahasiswa. Seluruh sikap, pengetahuan dan keterampilan dosen yang tampak di depan pandangan mahasiswa menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa untuk mengikuti sikap, pengetahuan dan keterampilan tertentu yang melekat pada dosen idolanya. Bagi dosen-dosen yang tidak menjadi idola mahasiswa, mungkin makna interaksi antara dosen dan mahasiswa lebih banyak bersifat simbolik saja, tidak sampai pada taraf internalisasi maupun akulturasi. Bagi dosen yang difavoritkan mahasiswa tentu menjadi semacam patokan untuk melakukan tindakan, pemikiran maupun sikap tertentu terhadap berbagai hal yang ditemui dalam perjalanan hidupnya.

Bentuk interaksi antara dosen dan tata usaha, terutama dalam hal pelaksanaan praktikum mata kuliah dan pembagian surat tugas atau surat-surat penting lainnya. Pelaksanaan praktekum mata kuliah terjadi pada setiap akhir semester. Pada detik-detik kegiatan praktekum tersebut terjadi interaksi yang intensif antara dosen dan tata usaha. Sebab surat tugas dan surat keputusan tentang kepanitiaan kegiatan praktekum biasanya dipengaruhi dan diedarkan oleh pihak tata usaha kampus. Seorang dosen tidak akan melaksanakan kegiatan praktekum mata kuliah apabila dosen tersebut tidak tercantum namanya dalam surat tugas

yang ditandatangani oleh dekan maupun oleh rektor. Dengan terjalannya kerjasama yang baik antara dosen dengan tenaga tata usaha, maka serangkaian kegiatan intra kurikuler kampus bisa berjalan dengan lebih lancar.

Bentuk interaksi antara siswa dan mahasiswa, terutama terjadi pada saat kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun ekstrakurikuler tertentu yang dilaksanakan oleh pihak kampus LPTK. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah kadang-kadang melibatkan mahasiswa yang natabene alumni dari sekolah tersebut. Sebaliknya kegiatan ekstrakurikuler di kampus LPTK seringkali melibatkan siswa SLTA yang berasal dari sekolah-sekolah asal aktivis ekstrakurikuler mahasiswa LPTK.

Bentuk interaksi antara siswa dan tata usaha, terutama dalam proses pemilihan jurusan di tingkat SLTA atau pembagian kelas ditingkat SD dan SMP. Proses pemilihan jurusan di tingkat SLTA melibatkan peran tata usaha, terutama dalam mengumpulkan data orang tua siswa. Termasuk didalamnya pembuatan dan penyebaran angket tentang pendapat orang tua siswa mengenai pemilihan jurusan. Seringkali data kehendak orangtua dengan data prestasi belajar siswa “tidak saling mendukung”. Dalam menentukan alternatif jurusan, orang tua menghendaki agar anakkesayangannya bisa masuk jurusan IPA, padahal prestasi belajar siswanya cenderung lebih cocok untuk dimasukkan kedalam Jurusan IPS. Disinilah peran tata usaha dalam “mengkombinasikan” data prestasi belajar siswa dengan data kehendak orang tuanya.

Bentuk interaksi antara mahasiswa dan tata usaha, terutama dalam hal pembagian kelas, pembagian kelompok KKN, dan pembagian toga menjelang wisuda. Pembagian kelas maupun pembagian kelompok KKN biasanya didasarkan atas urutan abjad nama-nama mahasiswa. Akibatnya nama mahasiswa yang diawali dengan huruf A, akan menempati kelas A, kemudian disusul dengan namamahasiswa dari abjad B, dan seterusnya, sehingga nama mahasiswa yang diawali dengan abjad Z, mau tidak mau, harus menempati kelas terakhir atau kelompok terakhir dari alokasi kelas atau kelompok yang ada. Selain itu, pada saat pembagian toga untuk persiapan wisuda, pemanggilan nama-nama mahasiswa juga didasarkan atas urutan absensi, yang lagi-lagi urutannya sesuai

dengan abjad. Dengan cara seperti ini, ada kesan bahwa nama mahasiswa yang diawali dengan huruf "A" akan selalu didahulukan dalam berbagai bentuk pelayanan kampus. Sebaliknya, nama-nama mahasiswa yang diawali dengan huruf "Z", akan selalu dilayani dengan pelayanan terakhir. Hal yang sama terjadi pula pada saat pembagian kelompok KKN, mahasiswa yang namanya diawali dengan huruf "A" mendapatkan lokasi KKN yang relatif lebih dekat dan lebih nyaman daripada mahasiswa yang namanya diawali dengan huruf "Z".

F. Konflik SDM Bidang Pendidikan

Diantara SDM bidang pendidikan, disadari atau tidak, terlibat konflik simbolik yang berkepanjangan antara: guru dan dosen, guru dan siswa, guru dan mahasiswa, guru dan tata usaha, dosen dan siswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan tata usaha, siswa dan mahasiswa, siswa dan tata usaha, mahasiswa dan tata usaha.

Konflik antara guru dan dosen, terutama dalam hal perbedaan insentif tunjangan profesi, beban kerja, penggunaan pakaian seragam dan keikutsertaan dalam upacara. Selama ini insentif tunjangan profesi guru dibayarkan berdasarkan kelompok golongan kepegawaian. Semua guru dari golongan II mendapatkan jumlah insentif tunjangan profesi yang sama di seluruh Indonesia yakni sebesar 175 ribu rupiah. Semua guru dari golongan III mendapatkan insentif tunjangan profesi sebesar 275 ribu rupiah. Semua guru dari golongan IV mendapatkan insentif tunjangan profesi sebesar 375 ribu rupiah. Sedangkan pembayaran tunjangan profesi dosen didasarkan atas posisi golongan dan ruang serta kepangkatannya. Semua dosen yang pangkat edukatifnya Asisten Ahli mendapatkan tunjangan profesi sebesar 500 ribu rupiah perbulan. Semua dosen yang pangkat edukatifnya Lektor mendapatkan tunjangan profesi sebesar 700 ribu rupiah perbulan. Semua dosen yang berpangkat edukatif Lektor Kepala mendapatkan insentif sebesar 900 ribu rupiah perbulan. Semua dosen yang memiliki kepangkatan edukatif Guru Besar atau profesor, mendapatkan tunjangan profesi sebesar 1.300.000,- rupiah perbulan.

Beban kerja guru adalah 24 jam perminggu yang mengakibatkan seorang guru harus selalu ada di sekolah minimal empat hari dalam satu minggunya (terutama guru sekolah lanjutan tingkat atas). Tetapi pada umumnya pimpinan sekolah mewajibkan semua guru untuk datang ke sekolah setiap hari selama enam hari (terutama guru sekolah dasar) dan kadang-kadang pimpinan mewajibkan semua guru untuk datang ke sekolah minimal lima hari dalam satu minggu (terutama pimpinan sekolah lanjutan tingkat pertama). Sedangkan beban kerja dosen sebesar 12 sks dan maksimal 16 sks dalam satu semester, bila dihitung menurut hariannya, maka seorang dosen minimal harus bekerja selama dua hari dalam satu minggu (terutama dosen yang tempat tinggalnya jauh dari kampus). Dosen yang tempat tinggalnya relatif dekat dengan kampus diupayakan bisa datang ke kampus minimal tiga hari kerja. Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan di kampus diharuskan jam kerjanya minimal lima hari dalam satu semester.

Konflik antara guru dan siswa, terutama dalam hal pembagian hasil ulangan harian, pembagian raport sementara, dan penentuan jurusan di SLTA. Beberapa saat setelah guru mata pelajaran membagi hasil ulangan harian kepada siswanya, sebagian besar siswa terkejut dengan hasil belajar yang diperolehnya. Keterkejutan itu berdampak pada munculnya konflik terselubung antara guru mata pelajaran dengan sebagian besar siswa yang nilai ulangan hariannya tidak maksimal. Dalam kondisi konflik tersembunyi itu, hubungan guru dan siswa tetap berlangsung didalam kelas maupun diluar kelas, sampai agenda pembagian raport sementara tiba.

Ketika dilakukan pembagian raport sementara, yang pengambilan nilainya didasarkan atas hasil ulangan tengah semester, konflik tersembunyi antara guru dan siswa muncul kembali. Kali ini bersumber dari penayangan nilai asli hasil ulangan umum yang mencengangkan siswa. Sebagian besar siswa mendapat nilai ulangan umum yang tidak menggembirakan. Akibat lanjutannya muncullah benih-benih kebencian siswa kepada guru-guru yang memberikan nilai raport sementara yang tidak maksimal. Sesungguhnya, boleh jadi, nilai rapor bayangan itu menjadi lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai asli hasil ulangan umum yang telah mendapat "asupan" nilai berdasarkan

pertimbangan sikap, pengetahuan dan keterampilan siswa yang sempat diketahui oleh guru mata pelajaran.

Konflik tersembunyi antara guru dengan siswa akan mencapai puncaknya pada saat akan diumumkannya pembagian jurusan bagi siswa kelas dua SMA/SMK dan MA. Pada saat pembagian jurusan tersebut, antara guru, siswa dan orang tua siswa cenderung terjadi perbedaan “selera”. Siswa ingin mendapatkan Jurusan IPS, tetapi orang tua siswa menghendaki agar anaknya masuk jurusan IPA. Kadang-kadang guru yang diberi tugas tambahan sebagai wali kelas, membuat keputusan penentuan jurusan yang tidak cocok dengan selera siswa maupun dengan selera orang tua siswa.

Konflik antara guru dan mahasiswa, terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan alumni dengan status mahasiswa dan kegiatan keorganisasian remaja yang melibatkan siswa SLTP dan SLTA. Seringkali agenda kegiatan ekstrakurikuler berbenturan dengan jadwal kegiatan belajar mengajar di kelas. Ketika guru mengajar di kelas, lalu sebagian siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yang kadang-kadang dibina oleh alumni dengan status mahasiswa, terjadilah konflik berkepanjangan antara guru bidang studi dengan mahasiswa pembina kegiatan ekstrakurikuler. Siswa yang memiliki prestasi belajar bagus, biasanya siswa tersebut kurang berprestasi di bidang ekstrakurikuler. Sebaliknya siswa yang memiliki prestasi bagus di bidang ekstrakurikuler, seringkali prestasi belajarnya malah tidak bagus. Dengan kondisi demikian, semakin mempertajam tingkat konflik antara guru bidang studi dengan mahasiswa pembina kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Konflik antara guru dan tata usaha, terutama dalam hal pembagian insentif atau honorarium kegiatan. Banyaknya kegiatan ekstrakurikuler di sebuah sekolah berdampak pada besarnya insentif atau honorarium kegiatan yang akan diterima oleh guru pembimbing atau guru pembina. Pada saat yang bersamaan, kegiatan “ekstra” yang dilakukan oleh tenaga tata usaha sekolah semakin terbatas, karena semaraknya kegiatan ekstrakurikuler. Akibatnya honorarium kegiatan ekstrakurikuler bagi tenaga tata usaha relatif lebih kecil dibandingkan dengan honorarium yang diterima oleh guru pembimbing ataupun guru pembina. Kepala sekolah yang bijak, mestinya tenaga tata usaha dilibatkan secara

aktif pada kegiatan ekstrakurikuler sekolah dengan tugas tambahan sebagai guru pembimbing maupun sebagai guru pembina kegiatan ekstrakurikuler tertentu.

Konflik antara dosen dan siswa, terutama terjadi dalam hal penyampaian sosialisasi dan promosi perguruan tinggi dihadapan siswa kelas tiga SLTA. Pihak perguruan tinggi cenderung mengarahkan siswa untuk menempuh studi di jurusan tertentu pada perguruan tinggi yang bersangkutan dengan pertimbangan utama mencari dan menentukan jurusan atau program studi yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Lebih spesifik lagi, pihak kampus yang diwakili oleh dosen yang telah ditunjuk cenderung mengarahkan calon mahasiswanya ke jurusan atau program studi yang memiliki akreditasi A atau B. Padahal status akreditasi itu (akreditasi A ataupun B) tidak banyak pengaruhnya terhadap minat siswa lulusan SLTA untuk melanjutkan studi pada program studi tertentu yang telah lama mereka pelajari karakteristik atau profilnya. Lulusan SLTA cenderung memilih program studi yang sudah populer atau yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dari berbagai lapisan sosial. Misalnya, program studi akuntansi pada fakultas ekonomi, program studi matematika pada fakultas MIPA, dan program studi Teknik Planologi pada Fakultas Teknik dan Pengembangan Wilayah serta program studi Teknik Elektro pada Fakultas Teknik merupakan program studi paling populer di mata siswa lulusan SLTA.

Konflik antara dosen dan mahasiswa, terutama dalam hal pemberian tugas terstruktur dan prosedur mengikuti perkuliahan. Seringkali dosen memberikan tugas terstruktur kepada mahasiswa yang cukup berat dan harus diselesaikan dalam tempo satu minggu. Mengingat keterbatasan yang dimiliki mahasiswa, terutama dalam hal pemilikan laptop atau pemanfaatan jasa internet khususnya program *google*, ketentuan tugas dari dosen sangat memberatkan sebagian besar mahasiswa. Mereka sempat berseloroh bahwa kuliahnya sih gampang. Tapi yang memberatkan adalah tugas terstrukturnya. Selain itu, masih ada sebagian dosen yang membuat prosedur mengikuti perkuliahan dengan syarat yang berat bagi mahasiswa, namun mereka tak kuasa menolaknya. Misalnya ada dosen yang mensyaratkan bahwa apabila dosen sudah masuk kelas, maka mahasiswa dilarang ikut kuliah, dengan alasan apapun. Ada

juga dosen yang membuat aturan setiap tugas pembuatan makalah harus segera dikumpulkan, lalu dikoreksi secara detail, dan hasil koreksiannya harus diperbaiki sebagaimana yang dikehendaki oleh sang dosen. Dengan cara demikian, diharapkan tugas-tugas mahasiswa semakin berkualitas.

Konflik antara dosen dan tata usaha, terutama dalam hal pembagian honor atau insentif kegiatan yang nominalnya kurang jelas. Dalam kegiatan pelatihan atau seminar dan semacamnya seringkali terjadi konflik antara dosen dan pegawai tata usaha kampus. Sumber konflik ini berasal dari pembagian honor atau insentif kegiatan kampus yang tidak jelas. Dosen merasa nilai nominal atas honor dan insentifnya lebih kecil dari jumlah yang seharusnya, tetapi pada saat yang bersamaan, pegawai tata usaha justru merasa telah membantu sang dosen dengan memberlakukan pajak langsung atas penghasilan yang diterima oleh sang dosen. Inti sumber konfliknya adalah ketidaktahuan dosen tentang pemotongan pajak secara otomatis oleh bagian tata usaha, yang dilengkapi dengan tidak adanya informasi tentang pemotongan pajak otomatis tersebut. Akibatnya terjadilah konflik dingin berkepanjangan antara dosen dengan tenaga tata usaha.

Konflik antara siswa dan mahasiswa, terutama dalam hal pelaksanaan pertandingan olah raga antar sekolah yang melibatkan mahasiswa sebagai panitianya dan kegiatan ekstrakurikuler di kampus yang melibatkan siswa sebagai pesertanya.

Konflik antara siswa dan tata usaha, terutama dalam hal pelaksanaan pengawasan saat ulangan umum atau ulangan akhir semester serta pembayaran SPP atau iuran yang sifatnya wajib dibayar. Pada saat ulangan umum digelar, interaksi siswa dengan staf tata usaha cenderung terjadi ketegangan. Hal ini terjadi karena pada detik-detik ulangan umum berlangsung, siswa menghendaki situasi pengawasan yang “longgar” dan nyaman, tetapi gaya pengawasan yang dilakukan staf tata usaha cenderung kaku dan ketat. Akibatnya banyak siswa kehilangan simpatik terhadap perilaku tata usaha yang menjadi pengawas ruangan. Sebaliknya pegawai tata usaha juga menyimpan rasa jengkel dan kesal atas perilaku siswa yang diawasinya saat ulangan umum berlangsung.

Konflik antara mahasiswa dan tata usaha, terutama dalam hal pelaksanaan proses penelitian mahasiswa yang mengambil lokasi penelitian di sekolah dan pelaksanaan ujian tengah semester

maupun ujian akhir semester di perguruan tinggi yang menugaskan tenaga tata usaha sebagai pengawas ruang. Mahasiswa yang cenderung memiliki kebebasan berekspresi dalam bidang kognitif, afektif, maupun psikomotorik, terpaksa harus menghadapi figur pegawai tata usaha yang birokratis, kaku dan menegangkan.

G. Integrasi SDM Bidang Pendidikan

SDM dalam bidang pendidikan, ketika melakukan suatu kegiatan yang bernuansa kependidikan terjadi integrasi yang terus menerus antara: guru dan dosen, guru dan siswa, guru dan mahasiswa, guru dan tata usaha, dosen dan siswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan tatausaha, siswa dan mahasiswa, siswa dan tata usaha, mahasiswa dan tata usaha.

Integrasi guru dan dosen, terutama dalam hal pelaksanaan PPLK dan penelitian tindakan kelas. Selama pelaksanaan Program Pengenalan Lapangan Kependidikan (PPLK), integrasi profesi guru dan dosen berjalan secara intensif, progresif dan kreatif. Keberadaan guru pamong memegang kunci sentral atas keberhasilan pelaksanaan PPLK di sekolah. Mengingat di tangan guru pamong-lah penilaian objektif atas kemampuan mengajar dan juga kemampuan mendidik bagi mahasiswa peserta PPLK dapat dimunculkan. Dalam hal ini, kedudukan dosen lebih banyak sebagai pengarah dan pembimbing atas pelaksanaan PPLK. Kesatupaduan persepsi, sikap dan keterampilan edukatif antara guru dan dosen sangat terasa pada saat pelaksanaan PPLK. Guru memiliki segudang pengalaman tentang manajemen kelas dan metodologi pembelajaran. Sementara sang dosen memiliki wawasan pengetahuan yang lebih luas tentang materi substantif yang diajarkan saat pembahasan utama dalam proses pembelajaran serta teori dan makna filosofi kependidikan tertentu yang melatar belakangi pengembangan profesi guru.

Integrasi guru dan siswa, terutama dalam hal proses pembelajaran didalam kelas dan pelaksanaan study tour. Integrasi guru dan mahasiswa, terutama dalam hal pelaksanaan seminar yang digelar oleh mahasiswa dan melibatkan guru mata pelajaran tertentu. Integrasi guru dan tata usaha, terutama dalam hal pelaksanaan piket dan pembagian jadwal mengajar. Integrasi dosen dan siswa, terutama dalam hal penerbitan buku baru dan pelaksanaan bimbingan belajar maupun bimbingan karir siswa.

Integrasi dosen dan mahasiswa, terutama dalam hal pelaksanaan perkuliahan didalam kelas maupun diluar kelas. Integrasi dosen dan tata usaha, terutama dalam hal pembagian buku-buku pedoman dan pengurusan surat-surat perjalanan dinas. Integrasi siswa dan mahasiswa, terutama dalam hal pelaksanaan mentoring mata pelajaran tertentu yang melibatkan mahasiswa sebagai tenaga tutor atau fasilitator. Integrasi siswa dan tata usaha, terutama dalam hal pembayaran SPP dan pembayaran biaya-biaya lainnya yang nominalnya masih terjangkau.

Integrasi mahasiswa dan tata usaha, terutama dalam hal pemberian izin penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler dan juga pemberian izin pelaksanaan pembuatan tugas akhir dalam bentuk skripsi. Kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan kampus LPTK harus mendapat izin dari kepala bagian tata usaha fakultas. Bila kegiatan ekstrakurikuler telah mendapat izin penyelenggaraan, maka masyarakat kampus akan menerima dampaknya yakni segala fasilitas kampus bisa dimanfaatkan.

H. Kolaborasi SDM Bidang Pendidikan

Dalam tahap tertentu, ternyata SDM dalam bidang pendidikan saling menjalin kolaborasi terbatas dalam mencapai tujuan tertentu yang telah mereka sepakati, seperti ketika sosialisasi kurikulum baru (Kurikulum 2013), implementasi konsep manajemen berbasis sekolah, implementasi konsep Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, serta implementasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah. SDM bidang pendidikan yang sering melakukan kolaborasi antara lain: guru dan dosen, guru dan siswa, guru dan mahasiswa, guru dan tata usaha, dosen dan siswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan tata usaha, siswa dan mahasiswa, siswa dan tata usaha, mahasiswa dan tata usaha.

Kolaborasi guru dan dosen, terutama dalam hal pelaksanaan program pengalaman kerja lapangan dan kegiatan penelitian tindakan kelas. Kolaborasi guru dan siswa, terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan study tour. Kolaborasi guru dan mahasiswa, terutama dalam hal pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan Kependidikan. Kolaborasi guru dan tata usaha, terutama dalam hal pendataan siswa baru dan kelulusan sekolah. Kolaborasi dosen dan siswa, terutama dalam hal

pembinaan dan pengembangan bakat, minat dan prestasi belajar siswa. Kolaborasi dosen dan mahasiswa, terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan praktekum lapangan. Kolaborasi dosen dan tata usaha, terutama dalam hal persiapan pelaksanaan perkuliahan dan pengadaan absensi mahasiswa. Kolaborasi siswa dan mahasiswa, terutama dalam hal kegiatan bimbingan belajar serta mentoring keagamaan. Kolaborasi siswa dan tata usaha, Kolaborasi mahasiswa dan tata usaha, terutama dalam hal penerbitan izin penelitian dan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif.

I. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, SDM Bidang Pendidikan terdiri atas: guru, dosen, siswa, mahasiswa, tata usaha, stakeholder, orang tua siswa, orang tua mahasiswa, masyarakat sekitar sekolah, dan masyarakat sekitar kampus, dengan karakteristik tertentu; Kedua, Antar sesama SDM bidang pendidikan ternyata terjadi interaksi langsung maupun interaksi simbolik yang kentara, terutama antara: guru dan dosen, guru dan siswa, guru dan mahasiswa, guru dan tata usaha, dosen dan siswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan tata usaha, siswa dan mahasiswa, siswa dan tata usaha, serta mahasiswa dan tata usaha; Ketiga, diantara SDM bidang pendidikan terlibat konflik simbolik yang berkepanjangan antara: guru dan dosen, guru dan siswa, guru dan mahasiswa, guru dan tata usaha, dosen dan siswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan tata usaha, siswa dan mahasiswa, siswa dan tata usaha, mahasiswa dan tata usaha; Keempat, SDM dalam bidang pendidikan, ketika melakukan suatu kegiatan yang bernuansa kependidikan terjadi integrasi yang terus menerus antara: guru dan dosen, guru dan siswa, guru dan mahasiswa, guru dan tata usaha, dosen dan siswa, dosen dan mahasiswa, dosen dan tata usaha, siswa dan mahasiswa, siswa dan tata usaha, mahasiswa dan tata usaha; dan Kelima, dalam tahap tertentu, ternyata SDM dalam bidang pendidikan saling menjalin kolaborasi terbatas dalam mencapai tujuan tertentu yang telah mereka sepakati, seperti ketika sosialisasi kurikulum baru (Kurikulum 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Fattah, N. (2012) Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung:Remaja Rosdakarya.
<http://nuritaputranti.wordpress.com/2008/05/08/186/>.
- Mulyasana, D. (2011) Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Onisimus A. (2011). Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia Tahun 2005
- Sagala, Syaiful (2007). *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung, Penerbit Alfabeta
- Saud, Udin Syaefudin, (2009), .Pengembangan Provesi Guru. Bandung. Penetbit Alfabeta.
- Tilaar (2000). Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 2003.

BAB 2

PENGUASAAN MATERI STANDAR, PENGELOLAAN PROGRAM PEMBELAJARAN, DAN PENGELOLAAN KELAS

A. Pendahuluan

Sebagian besar guru madrasah tsanawiyah merupakan lulusan dari perguruan tinggi agama islam (negeri maupun swasta). Pada tahun 1990-an syarat minimal kualifikasi pendidikan untuk menjadi guru madrasah tsanawiyah hanyalah lulusan diploma II PAI, Diploma II Penjaskes atau Diploma II kependidikan lainnya. Setelah sekian lama bertahan, terhitung sejak tahun 2004, syarat menjadi guru madrasah tsanawiyah dinaikkan lagi menjadi S-1 PAI, S-1 Penjaskes dan S-1 jurusan kependidikan lainnya.

Kini, kualifikasi pendidikan guru madrasah tsanawiyah bervariasi. Ada yang hanya memiliki ijazah SLTA, yakni lulusan SPG atau lulusan PGA atau lulusan SGO. Selain itu, ada pula yang memiliki ijazah Diploma II PAI, Diploma II Penjaskes dan Diploma II jurusan kependidikan lainnya. Hanya beberapa guru madrasah tsanawiyah yang telah memiliki ijazah S-1 Pendidikan Agama Islam, S-1 Penjaskes atau S-1 jurusan kependidikan lainnya.

Peralihan perolehan ijazah dari Diploma II kemudian S-1 mengalami loncatan budaya dan mentalitas. Loncatan yang dimaksud adalah peralihan mental dan budaya dari karakter guru Diploma II PAI/Penjaskes ke karakter guru S-1 PAI, S-1 Penjaskes dan S-1 Kependidikan lainnya. Karakter utama guru madrasah tsanawiyah pada fase ini adalah diperkenalkannya konsep pendekatan keterampilan proses, *life skill* dan *link and match*.

Menurut E. Mulyasa, indikator kompetensi profesional guru dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memahami standar nasional pendidikan, yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.
2. Mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang meliputi: memahami standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD), mengembangkan silabus, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik, menilai hasil belajar, serta menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan zaman.
3. Menguasai materi standar, yang meliputi: menguasai bahan pembelajaran (bidang studi), dan menguasai bahan pendalaman (pengayaan).
4. Mengelola program pembelajaran, yang meliputi: merumuskan tujuan, menjabarkan kompetensi dasar, memilih dan menggunakan metode pembelajaran, memilih dan menyusun prosedur pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran.
5. Mengelola kelas, yang meliputi: mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran, dan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif
6. Menggunakan media dan sumber pembelajaran, yang meliputi: memilih dan menggunakan media pembelajaran, membuat alat-alat pembelajaran, menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka pembelajaran, dan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar.
7. Menguasai landasan-landasan kependidikan, yang meliputi: landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis.
8. Memahami dan melaksanakan pengembangan peserta didik, yang meliputi: memahami fungsi pengembangan peserta didik, menyelenggarakan ekstra kulikuler dalam rangka pengembangan peserta didik, serta menyelenggarakan bimbingan dan konseling dalam rangka pengembangan peserta didik.

9. Memahami dan menyelenggarakan administrasi sekolah, yang meliputi: memahami penyelenggaraan administrasi sekolah, dan menyelenggarakan administrasi sekolah.
10. Memahami penelitian dalam pembelajaran, yang meliputi: mengembangkan rancangan penelitian, melaksanakan penelitian, dan menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
11. Menampilkan keteladanan dan kepemimpinan dalam pembelajaran, yang meliputi: memberikan contoh perilaku keteladanan, dan mengembangkan sikap disiplin dalam pembelajaran.
12. Mengembangkan teori dan konsep dasar kependidikan, yang meliputi: mengembangkan teori-teori kependidikan yang relevan dengan kebutuhan siswa, dan mengembangkan konsep-konsep dasar kependidikan yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.
13. Memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual, yang meliputi: memahami strategi pembelajaran individual, dan melaksanakan pembelajaran individual.

Dari tiga belas indikator guru profesional tersebut, indikator yang paling berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme guru madrasah tsanawiyah adalah indikator ketiga, keempat dan kelima, yaitu: penguasaan materi standar, pengelolaan program pembelajaran, dan pengelolaan kelas.

B. Strategi Pembelajaran

Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah mencakup standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dari delapan standar tersebut, yang telah ditetapkan dan telah disahkan penggunaannya oleh Mendiknas adalah standar isi dan standar kompetensi lulusan merupakan landasan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam

penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan tertentu. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.

Standar Kompetensi Lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. SKL pendidikan dasar dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Meskipun guru diberi kebebasan untuk menyusun dan mengembangkan silabus, namun BSNP menyiapkan kurikulum untuk setiap satuan pendidikan, dan silabus untuk berbagai mata pelajaran. Sehingga tugas guru tinggal menjabarkan, menganalisis, dan menyesuaikan kurikulum dan silabus tersebut dengan situasi dan kondisi sekolah, kecuali bagi yang mau mengembangkannya sendiri.

Setelah KTSP diberlakukan secara utuh dan konsekuen, di setiap Kabupaten/Kota, bahkan pada level kecamatan, pemerintah seharusnya menyediakan konsultan kurikulum. Konsultan kurikulum inilah yang akan memandu pengembangan kurikulum serta silabus di daerah dan satuan pendidikan bersama tokoh masyarakat yang tergabung dalam komite sekolah dan dewan pendidikan.

Ada tiga jenis strategi yang berkaitan dengan strategi pembelajaran yakni: 1) strategi pengorganisasian pembelajaran, 2) strategi penyampaian pembelajaran, dan 3) strategi pengelolaan pembelajaran.

Dalam KTSP, guru diberikan kewenangan secara leluasa untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kondisi sekolah, serta kemampuan guru itu sendiri dalam menjabarkan menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran yang siap dijadikan pedoman pembentukan kompetensi peserta didik.

Menurut Hamzah B. Uno, strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Paling tidak, ada tiga jenis strategi yang berkaitan dengan strategi pembelajaran, yakni: 1) strategi pengorganisasian pembelajaran, 2) strategi penyampaian pembelajaran, dan 3) strategi pengelolaan pembelajaran.

Strategi pembelajaran yang menggunakan urutan kegiatan pembelajaran secara sistematis, memiliki potensi untuk memudahkan kegiatan belajar peserta didik., Urutan sistematis sangat penting, karena akan menunjukkan urutan yang harus dan perlu diikuti dalam menyajikan sesuatu.

Masalah pengelolaan kelas harus ditanggulangi dengan tindakan kolektif pengelolaan, sedangkan masalah pembelajaran harus ditanggulangi dengan tindakan kolektif instruksional. Peserta didik yang enggan ambil bagian dalam kegiatan kelompok, karena merasa ditolak oleh kelompok lain (masalah pengelolaan) tidak dapat ditanggualngi dengan kegiatan lain yang lebih menarik (tidak instruksional). Sebaliknya, hubungan antar pribadi (interpersonal) yang baik antara guru dengan peserta didik (suatu petunjuk keberhasilan pengelolaan) tidak dengan sendirinya menjamin bahwa proses pembelajaran akan berjalan efektif.

Kompetensi pada dasarnya menunjukkan kepada kecakapan atau kemampuan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Definisi lainnya menunjukkan bahwa kompetensi merupakan suatu sifat (karakteristik) orang- orang (kompeten) yang memiliki kecakapan, daya, otoritas, kemahiran, pengetahuan, dan sebagainya.

Kompetensi guru di Indonesia telah dikembangkan oleh Proyek Pembinaan Pendidikan Guru (P3G) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dasarnya kompetensi guru menurut P3G bertitik tolak dari analisis tugas-tugas seorang guru, baik sebagai pengajar, pembimbing, maupun sebagai administrator kelas.

Kode etik pada hakekatnya merupakan suatu sisitem pengaturan atau perangkat prinsipp-prinsip keprilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang bergabung dalam himpunan organisasi profesi tertentu.

Penerimaan atas suatu kode etik mengandung makna adanya penngakuan dan pemahaman atas ketentuan dan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematumhinya dalam menjalankan tugas dan perilaku keprofesionalannya, serta relevan atas kemungkinan adanya konsekuwensi dan saksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya.

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penulis memberikan saran berupa :

1. Bagi guru yang memiliki kesulitan dalam penguasaan tentang materi standar, pengelolaan program pembelajaran, serta pengelolaan kelas perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pemantapan tentang penguasaan konsep-konsep dasar bidang studi tertentu, keterampilan membuat administrasi pembelajaran, serta kemampuan mengendalikan situasi siswa didalam kelas maupun diluar kelas dalam melakukan proses pembelajaran.
2. Kepala madrasah beserta dewan guru harus menjalin tali silaturahmi dengan sesama dewan guru, seluruh orang tua murid, serta masyarakat sekitar, agar tercipta suasana kebersamaan dan kemauan bersama untuk memajukan aktivitas pembelajaran putera-puteri binaannya di madrasah tsanawiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak, *Pengembangan Profesi Guru*, Penerbit Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN, Jakarta. 2010.
- E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
-, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung 2009.
- Sudarwan Danim, *Inovasi Pendidikan; Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Tim Dosen, *Manajemen Pendidikan*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009.
- Udin Syaefuddin Saud, *Pengembangan Profesi Guru*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2009.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang *Guru dan Dosen*.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

BAB 3

KONTRIBUSI KOMPETENSI PROFESIONAL DAN PEDAGOGIK TERHADAP KINERJA GURU

A. Pendahuluan

Peningkatan mutu pendidikan akan senantiasa ditentukan oleh kesiapan dari sumber daya manusia yang secara langsung terlibat dalam proses pendidikan. Salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu pendidikan itu adalah guru sebagai pemegang peranan yang strategis, sehingga setiap usaha dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian yang besar kepada peningkatan guru, baik dalam penyediaan jumlah guru maupun mutunya.

Pendidik dan tenaga kependidikan pada hakekatnya merupakan profesi yang memikul tanggungjawab kemanusiaan, khususnya berkaitan dengan proses pendidikan generasi penerus bangsa menuju gerbang pencerdasan dalam melepaskan diri dari belenggu kebodohan. Betapa berat tugas dan kewajiban yang harus diemban oleh pendidik dan tenaga kependidikan ini, sehingga menuntut profesionalitas tinggi dalam kinerjanya. Melalui kompetensi profesional, pendidik dan tenaga kependidikan harus mampu mewujudkan pengembangan profesi dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk peningkatan mutu bagi proses belajar mengajar dan profesionalisme (Trianto, 2011: ix) Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ondi Saondi (2010: 3) bahwa guru merupakan ujung tombak pendidikan sebab secara langsung berupaya mempengaruhi, membina dan mengembangkan peserta didik. Oleh karena itu guru dituntut untuk memiliki kemampuan dasar yang diperlukan sebagai pendidik, pembimbing, pengajar dan kemampuan tersebut tercermin pada kompetensi guru.

Syaiful Sagala menyatakan bahwa profesionalis merupakan sikap profesional yang berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hoby belaka (Syaiful Sagala, 2011:1). Seorang profesional mempunyai kebermaknaan ahli (*expert*) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya. Tanggungjawab atas keputusannya, baik intelektual maupun sikap, dan memiliki rasa kesejawatan, menjunjung tinggi etika profesi dalam suatu organisasi yang dinamis. Seorang profesional memberikan layanan pekerjaan secara terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari tugas personal yang mencerminkan suatu pribadi yaitu terdiri dari konsep diri, ide yang muncul dari diri sendiri, dan realita atau kenyataan dari diri sendiri.

Terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru atau pendidik, pemerintah berusaha mengupayakan berbagai peningkatan kualitas guru, seperti peningkatan kemampuan mengenai berbagai macam strategi maupun metode pembelajaran melalui kegiatan workshop, seminar dan diklat, serta tidak kalah menariknya adalah peningkatan kualitas guru melalui program sertifikasi guru.

E. Mulyasa mengemukakan bahwa Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru merupakan salah satu terobosan dunia pendidikan dalam meningkatkan kualitas guru, sehingga ke depan semua guru harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau ijin mengajar (E. Mulyasa, 2012: .iii). Dengan demikian, upaya profesionalisme guru akan segera menjadi kenyataan, sehingga tidak setiap orang dapat menjadi guru, dan tidak pula banyak orang yang menjadikan pekerjaan ini sebagai batu loncatan seperti yang terjadi belakangan ini. Persoalannya adalah apakah guru-guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sekaligus mendapat tunjangan profesi tersebut telah dapat melaksanakan tugasnya secara professional dengan kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, sehingga dapat berkontribusi bagi peningkatan profesionalnya, karena dalam kenyataannya tampak masih banyak ditemukan opini yang berkembang di masyarakat bahwa pemberian sertifikat pendidik tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, salah satu tantangan terbesar bagi guru setelah mengikuti program sertifikasi melalui PLPG saat ini

adalah bagaimana memelihara komitmen diri untuk mengajar sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Sanusi dalam Jejh Musfah (2011: 4), menyatakan bahwa guru belum dapat diandalkan dalam berbagai aspek kinerjanya yang standard, karena belum memiliki keahlian dalam isi dari bidang studi, pedagogis, didaktik, dan metodik, keahlian pribadi dan sosial, khususnya dalam berdisiplin dan bermotivasi kerja tim antar sesama guru, dan tenaga kependidikan yang lain.

Rendahnya Kualifikasi pendidikan guru juga disebabkan oleh beragamnya faktor, salah satunya adalah rendahnya kesejahteraan guru. Gaji guru hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sehingga tidak memiliki dana untuk melanjutkan pendidikan. Sebagai contoh guru-guru di Kabupaten Sukabumi dan Lebak, provinsi Banten, tidak bisa mengikuti program sertifikasi karena belum memiliki kualifikasi pendidikan S-1 dan untuk melanjutkan pendidikan, dana yang dimiliki untuk membiayai anak-anaknya (Kompas, 4 April 2008).

B. Teori Motivasi

Menurut **Maslow**(**Permadi** dan **Arifin**,2007: 84), manusia akan selalu berupaya untuk memenuhi dulu kebutuhan dasar (fisik), seperti makan, minum, dan seks; untuk selanjutnya secara bertahap memenuhi kebutuhan lainnya. Tingkatan kebutuhan tersebut secara bertahap dapat dilalui manusia dan tidak mungkin meloncat-loncat. Orang tidak akan termotivasi untuk memenuhi tuntutan harga diri, bila kebutuhan untuk makan, minum, seks, perumahan, dan cinta belum terpenuhi.

Hierarki kebutuhan manusia menurut **Maslow** terdiri dari lima tingkatan. Tingkatan paling dasar adalah kebutuhan fisiologi manusia, seperti makan, minum, dan seks. Tingkatan kebutuhan kedua adalah keamanan, seperti perlunya manusia punya tempat berlindung seperti rumah. Tingkatan kebutuhan ketiga adalah cinta atau kasih sayang. Tingkatan kebutuhan keempat adalah harga diri; dan Tingkatan kebutuhan kelima adalah aktualisasi diri.

David C. Mc Clelland (1961) merilis teori motivasi, yang bermakna suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu aktivitas dengan sebaik-baiknya agar mencapai prestasi dengan predikat terpuji. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara

motivasi berprestasi dengan pencapaian prestasi. Artinya, manajer yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi cenderung memiliki prestasi kerja tinggi, dan sebaliknya mereka yang prestasi kerjanya rendah dimungkinkan karena motivasi berprestasinya juga rendah. Ternyata motivasi berprestasi seseorang sangat berhubungan dengan dua faktor, yaitu tingkat kecerdasan (IQ) dan kepribadian. Artinya, orang akan mempunyai motivasi berprestasi tinggi bila memiliki kecerdasan yang memadai dan kepribadian yang dewasa.

C. Teori Kompetensi

Menurut **Spencer** dalam **Moeheriono** (2009:4), kompetensi terletak pada bagian dalam setiap manusia dan selamanya ada pada kepribadian seseorang yang dapat memprediksikan tingkah laku dan performansi secara luas pada semua situasi dan tugas pekerjaan atau *job tasks*. Kerangka dasar untuk menentukan kompetensi mengacu pada langkah-langkah yang disebut FAC, yaitu *function, activities, dan competency*. Cara menentukan kompetensi yang diperlukan pada suatu posisi pekerjaan tertentu adalah: *Pertama*, perlu menentukan fungsi-fungsi khusus pada suatu posisi terlebih dahulu. *Kedua*, mempelajari secara khusus bagaimana aktivitas dalam proses mengerjakan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan. *Ketiga*, menentukan kompetensi yang diperlukan pada posisi jabatan tersebut.

Selanjutnya, **Michael Zwell** dalam **Wibowo** (2012: 330), memberikan lima kategori kompetensi, yaitu:

1. *Task Achievement* merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan *task achievement* ditunjukkan oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi, inisiatif, efisiensi, produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis.
2. *Relationship* merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain serta memuaskan kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan *relationship* meliputi: kerja sama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas budaya.

3. *Personal Attribute* merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berfikir, merasa, belajar, dan berkembang. *Personal attribute* merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stres, berfikir analitis, dan berfikir konseptual.
4. *Managerial* merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi manajerial berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.
5. *Leadership* merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi yang berkenaan dengan *leadership* meliputi: kepemimpinan visioner, berfikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasional, membangun fokus dan maksud, dasar-dasar dan nilai-nilai.

D. Teori Kinerja

Menurut **Gibson** dalam **Supardi** (2010: 25), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja, yaitu: variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis.

Variabel individu dikelompokkan pada sub-variabel kemampuan dan keterampilan, latar belakang dan demografis. Sub-variabel kemampuan dan keterampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku dan kinerja. Variabel kemampuan dan keterampilan merupakan kompetensi kerja yang dimiliki seseorang. Terdapat lima jenis kompetensi, yaitu: *Pertama, Knowledge*, adalah ilmu yang dimiliki individu dalam bidang pekerjaan atau area tertentu; *Kedua, Skill*, adalah kemampuan untuk unjuk kinerja fisik ataupun mental; *Ketiga, Self Concep*, adalah sikap individu, nilai-nilai yang dianut, dan citra diri; *Keempat, Traits*, adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten atas situasi atau informasi tertentu; *Kelima, Motives*, adalah pemikiran atau niat dasar konstan dan mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku tertentu.

E. Program Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan sertifikasi guru, diharapkan pendidik dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Program sertifikasi bagi guru dilaksanakan melalui uji kompetensi maupun pemberian sertifikat langsung (Ma'arif, Syamsul. 2011:27).

Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003 menyebutkan (Ananimous, 2010:31). bahwa sertifikat kompetensi (bagi guru) diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Pasal 11 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 89 ayat (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyebutkan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.

Pengakuan sebagai tenaga profesional bagi guru dibuktikan melalui pemilikan sertifikat pendidik. Dengan memiliki sertifikat pendidik, merupakan pembuktian bahwa seorang guru telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Dengan proses sertifikasi yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik akan berguna dalam hal: (1) melindungi guru dari praktek-praktek yang tidak kompeten yang dapat merusak citra profesi guru, dan (2) melindungi masyarakat dari praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional. Program sertifikasi guru dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: untuk guru prajabatan diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG); Sedangkan untuk guru dalam jabatan diperoleh melalui uji

kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio atau pemberian sertifikasi langsung (Syamsul, *Op Cit*, h.30).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 30 Tahun 2009, bahwa bagi peserta sertifikasi guru melalui penilaian portofolio, yang belum mencapai skor minimal kelulusan, diharuskan: (a) melengkapi kekurangan portofolio, atau (b) mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), yang diakhiri dengan ujian.

Tujuan dilaksanakannya PLPG, sebagaimana penjelasan dalam rambu-rambu pelaksanaan PLPG yang dibuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi yang belum mencapai batas minimal skor kelulusan pada penilaian portofolio.

F. Kesimpulan

Pertama, tingkat kompetensi profesional guru dalam program sertifikasi melalui PLPG menunjukkan kategori Baik, Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul Rojak, (Pengelola Program PLPG) dan juga disetujui oleh Sahod Efendi, (Kasi Mapenda Kota Serang) yang menyatakan bahwa pelaksanaan program sertifikasi melalui PLPG sudah dianggap sebagai konsep pembentukan guru profesional karena setelah mengikuti sertifikasi, guru harus mengetahui arah pengembangan keprofesian yang terdapat didalam program PLPG agar kelak guru bisa mengikuti kebijakan-kebijakan pengembangan profesi.

Kedua, tingkat kompetensi pedagogik guru dalam program sertifikasi melalui PLPG menunjukkan kategori Baik. Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul Rojak, (Pengelola Program PLPG) dan juga disetujui oleh Sahod Efendi, (Kasi Mapenda Kota Serang) bahwa materi yang diberikan dalam program sertifikasi melalui PLPG pada bidang kompetensi pedagogik itu salah satunya terdapat pada materi pengembangan strategi dan metode pembelajaran.

Ketiga, tingkat kinerja guru setelah mengikuti program sertifikasi melalui PLPG menunjukkan kategori Baik. Hal ini diperkuat oleh pendapat Abdul Rojak, (Pengelola Program PLPG) dan juga disetujui oleh Sahod Efendi, (Kasi Mapenda Kota Serang) bahwa semakin aktif Guru PAI dalam mengikuti kegiatan seminar,

pembuatan buku dan bahan ajar karya sendiri, workshop, pelatihan, penelitian dan MGMP maupun kegiatan simulasi mengajar dan *lesson plan* dalam konteks MGMP dan AGPAI, serta tugas tambahan sebagai guru pamong bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek mengajar, maka akan semakin tinggi kinerja Guru PAI tersebut, baik secara individual maupun secara kolektif.

Keempat, terdapat kontribusi kompetensi profesional terhadap kinerja guru. Variasi kinerja guru ditentukan oleh Kompetensi Profesional dan dipengaruhi oleh faktor lain yang perlu diteliti lebih lanjut oleh siapapun yang berminat.

Kelima, terdapat kontribusi antara kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru. Variasi kinerja guru ditentukan oleh Kompetensi Pedagogik dan dipengaruhi oleh faktor lain yang perlu diteliti lebih lanjut oleh siapapun yang berminat.

Keenam, terdapat kontribusi antara kompetensi profesional dan peningkatan kompetensi pedagogik secara bersama-sama terhadap kinerja. Variasi kinerja guru ditentukan atau dijelaskan oleh Kompetensi Profesional dan Kompetensi Pedagogik. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor lain yang perlu diteliti lebih lanjut oleh siapapun yang berminat.

Berdasarkan kesimpulan ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, Guru PAI hendaknya lebih aktif dalam menambah penguasaan materi Pendidikan Agama Islam maupun dalam melaksanakan proses pembelajaran didalam kelas serta di luar kelas. Selain itu, perlu memberikan masukan atau saran-saran kepada orang tua murid yang berkaitan dengan proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di tempat tugasnya; Kedua, Birokrat Pendidikan perlu mengadakan pertemuan rutin maupun insidental dengan Guru PAI untuk membicarakan tentang desain pembelajaran, bimbingan konseling Agama Islam, isu-isu kontemporer sekitar Pendidikan Agama Islam, serta memberi penyuluhan dan pelatihan pada Guru PAI yang berhubungan dengan problematika proses pembelajaran PAI di sekolah maupun di luar sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Iskandar, *Menghasilkan Guru Kompeten & Profesional*, Jakarta : Bee Media Indonesia, 2012.
- Anonymous, *Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Beban Kerja Guru PAI pada Sekolah*, Jakarta : Dirjen Pendidikan Islam, Kemenag RI, Cet. Ke 2, 2011.
- E. Mulayasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung : Rosdakarya, Cet. Ke 6, 2012.
- Fathurrahman, Pupuh dan Aa Suryana, *Guru Profesional*, Bandung, PT Refika Aditama, Cet. Ke. 1, 2012.
- Janawi, *Kompetensi Guru, Citra Guru Profesional*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Kunandar, *Guru Profesional, implementasi KTSP dan sukses dalam sertifikasi guru*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010),
- Nurfuadi, *Profesionalisme Guru*, Purwokerto: Stain Press, Cet. Ke 1, 2012. Sagala, Syaiful, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 3, 2011.
- Saudagar, Fachrudin, *Pengembangan Profesionalitas Guru*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2011.
- Sudijono, Anas, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011. Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 2, 2004.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, Cet. Ke 3, 2007.
- Supardi, *Kinerja Guru*, Jakarta : Haja Mandiri, 2010.
- Syaifudin Saud, Udin, *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung : Alfabeta, Cet. Ke 2, 2009.

BAB 4

PENERAPAN METODE JIGSAW DAN SPIRITUAL QUOTIENT DALAM PEMBELAJARAN

A. Pendahuluan

Pada dasarnya kualitas pendidikan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, peserta didik, pengajaran, pra-sarana dan sarana serta penilaian. Prestasi belajar siswa akan berhasil dengan baik, bila proses belajar mengajarnya baik, dan faktor-faktor tersebut di kelola dengan baik pula. Untuk menunjang pada proses dan hasil pembelajaran yang baik diperlukan pemilihan metode pembelajaran yang tepat dan relevan untuk mendukung tercapainya tujuan pengajaran yang hendak di capai.

Berdasarkan kenyataan tersebut metode pembelajaran merupakan faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar guru berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam mengoptimalkan belajar siswa, maka dalam menyusun rancangan pembelajaran seyogyanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar seluas-seluasnya dan membangun pengetahuannya sendiri.

Untuk meningkatkan hasil belajar sebenarnya pemanfaatan teman sebaya dapat dilakukan. Metode *jigsaw* mengandung pengertian belajar bersama mencapai tujuan bersama. Siswa secara individual mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota kelompoknya. Asumsinya adalah *getting better together*.

Dalam proses pembelajaran, para orang dewasa tidak seharusnya memposisikan peserta didik sebagai pendengar ceramah siswa laksana botol kosong yang diisi dengan ilmu pengetahuan. Peserta didik harus di berdayakan agar mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya

(*jigsaw to do*) dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungannya baik lingkungan fisik, social, maupun budaya, sehingga mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia di sekitarnya (*jigsaw to know*). Diharapkan hasil interaksi dengan lingkungannya baik lingkungan fisik, social, maupun budaya, sehingga mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya (*jigsaw to do*) dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungannya baik lingkungan fisik, social, maupun budaya, sehingga mampu membangun pemahaman dan pengetahuannya terhadap dunia di sekitarnya (*jigsaw to know*.)

Pembelajaran dapat dikatakan efektif, apabila dapat memfasilitasi pemerolehan pengetahuan dan keterampilan si belajar melalui penyajian informasi dan aktivitas yang dirancang untuk membantu memudahkan siswa dalam rangka mencapai tujuan khusus belajar yang diharapkan (PunajiSetyosari, 2001: 4).

Pendidikan Agama Islam sebagai ujung tombak pembentukan akhlak siswa diharapkan mampu berperanan penting dalam dunia pendidikan kita. Hasil yang diharapkan dari pendidikan agama bukan semata-mata tingginya nilai mata pelajaran yang dicapai peserta didik tetapi yang lebih penting adalah perubahan perilaku atau akhlak peserta didik dari kurang baik menjadi lebih baik. Mengingat untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam era keterbukaan ini, aspek kualitas generasi bangsa yang perlu dibangun tidak terbatas pada faktor kecerdasan intelektual saja akan tetapi aspek ahlak dan budi pekerti peserta didik memegang peranan yang sangat penting dalam menyaring dan menepis pengaruh era globalisasi. Kemampuan daya filter dan daya tepis ini banyak ditentukan oleh kearifan peserta didik yang bersumber pada penghayatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT sebagai mana yang tertuang dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Secara individual, penghayatan dan pengalaman ini diberikan kepada siswa melalui pembekalan iman dan taqwa.

Menurut Danah Zonar dan Ian Marshal, orang yang pertama kali mengeluarkan ide tentang konsep kecerdasan spiritual, mendefinisikan kecerdasakan spiritual (SQ) adalah kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. Kecerdasan yang digunakan tidak hanya untuk mengetahui nilai-nilai yang ada,

melainkan juga untuk secara kreatif menemukan nilai-nilai baru (AgusGermanto, 2001: 116).

Menurut Sinetar, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang mendapat inspirasi, dorongan dan efektivitas yang terinspirasi, dorongan dan efektivitas yang terinspirasi, Theis-ness atau penghayatan ketuhanan yang didalamnya kita semua menjadi bagian. Sedangkan dalam ESQ, kecerdasan Spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan, serta mampu menyinergikan IQ, EQ, SQ, secara komprehensif (Ari GinanjarAgustian, 2001: 47).

Begitu beragam dan istimewa manusia, danbegitu banyak pula sisi-sisi lain yang belum terkuak. System budaya dan pendidikan di Indonesia selama ini belum begitu memperhatikan jenis-jenis kecerdasan selain IQ, padahal manusia pada dasarnya selalu bersifat terbuka untuk cerdas sesuai dengan pilihan dan lingkungannya. Mereka berpikir dan berimajenasi merasa dan memaknai sesuatu realitas dan tindakanya dengan cara yang tidak mungkin semuanya sama. Awal abad ke-20, IQ sangat berkembang. Kecerdasan intelektual atau rasional adalah kecerdasan yang digunakan untuk memecahkan masalah logika atau strategis. Pada tahun 1990 Daniel Golemon mempopulerkan adanya kecerdasan Emosional (EQ). EQ memberikita rasa empati, cinta, motivasi, dan kemampuan untuk menanggapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat (Reni Akbar Hawadi, 2004:204).

Dalam konteks pendidikan SQ diupayakan agar bisa membuat anak didik lebih cerdas dalam beragama. Dengan artian bahwa anak didik tidak menjalankan agama secara fanatik, tetapi mampu menghubungkan sesuatu yang bersifat lahiriyah dengan ruhesensial dari setiap ajaran agama. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kesiswaan membiasakan siswa untuk mengaplikasikan nilai-nilai spiritual, sehingga dalam menjalankan kegiatan tidak ada paksaan dan kesadaran diri, jika siswa memiliki spiritual tinggi, hubungan dengan Tuhan baik, dalam artian siswa senang serta rajin menjalankan ibadah, dalam bergaul dengan teman, guru, lingkungan sekitar pun baik serta memiliki kepribadian yang luhur.

Dimitri Mahayana menunjukkan beberapa cirri orang ber-SQ tinggi beberapa diantaranya: 1) memiliki prinsip dan visi yang kuat (prinsip adalah pedoman berperilaku yang terbukti mempunyai

nilai yang langgeng dan permanen) ;2) mampu melihat kesatuan dalam keragaman adalah prinsip utama yang harus dipegang teguh agar memiliki SQ tinggi; 3) mampu memaknai sisi kehidupan (makna adalah penentu identitas sesuatu yang paling signifikan) seseorang yang memiliki SQ tinggi menemukan makna terdalam dari segala sisi kehidupan; 4) mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan(Agus Nggermanto, 2002: 123).

BAB 5

KREATIVITAS GURU PAI DAN KEMAMPUAN PENGELOLAAN KELAS UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA

A. Pendahuluan

Guru merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu guru yang merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam arti khusus dapat diartikan bahwa pada setiap diri guru itu terletak tanggung jawab untuk membawa para siswanya pada suatu kedewasaan atau pada taraf kematangan tertentu. Dalam rangka ini guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang *transfer of knowledge*, tetapi juga sebagai pendidik yang *transfer of values*, dan sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menentukan siswa dalam belajar. Berkaitan dengan ini, seorang guru memiliki peranan yang kompleks dalam proses belajar mengajar dalam usahanya untuk mengantarkan siswa ke taraf yang dicita-citakan (Sardiman AM, 2001: 123).. Guru agama di sekolah merupakan salah satu komponen, dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada, sering dimintai 'tanggung jawab' berlebihan dan tidak proporsional. Kenakalan serta buruknya perilaku siswa seringkali dibebankan kepada guru agama tanpa mempertimbangkan faktor penyebab lainnya.

Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya menjalankan fungsi alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai (*values*) serta membangun karakter (*character building*) peserta didik secara berkelanjutan

(Asrorum Ni'am Sholeh, 2006: 28). Tugas pokok guru adalah mengajar dan mendidik sekaligus. Dalam kaitan ini perlu disadari bahwa pada setiap mata pelajaran yang diajarkan harus membawa misi pendidikan dan kejujuran. Tugas guru agama di samping harus dapat memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran agama, juga diharapkan dapat membangun jiwa dan karakter keberagamaan yang dibangun melalui pengajaran agama tersebut. Ketika seorang guru mengajarkan salat misalnya, ia tidak hanya mengajarkan siswa agar paham terhadap pengetahuan tentang salat dan mempraktikkannya secara benar, tetapi bersamaan dengan itu dengan salat tersebut diharapkan akan tumbuh jiwa dan kepribadian anak yang selalu bersyukur kepada Allah, patuh dan tunduk, disiplin, senantiasa ingat kepada Allah yang selanjutnya terpelihara dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar (Abudin Nata, 2001:67).

Pembelajaran di sekolah dipengaruhi oleh guru, siswa, sistem dan lingkungan masyarakat serta keluarga. Guru agama merupakan salah satu komponen dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada sering dimintai 'tanggung jawab' berlebihan dan tidak proporsional. Jika ada siswa nakal, bikin onar, guru agama mendapat 'pesanan' untuk menyelesaikannya dalam penyampaian matapelajaran misalnya.

Sehebat-hebatnya kurikulum, di tangan gurulah yang banyak mewarnai proses pembelajaran sebuah mata pelajaran, termasuk PAI SLTP yang meliputi: Al-Qur'an dan Hadis, Aqidah, Akhlak, Fiqih serta Tarikh dan Kebudayaan Islam. Kekayaan metodologi dan kreativitas menjadi niscaya bagi seorang guru, selain keteladanan moral dan kepribadian guru, apalagi guru PAI menjadi representatif moralitas keagamaan yang diajarkannya. Sedikit atau banyak, guru agama sering dijadikan acuan moral kepribadian bagi siswa dan guru-guru yang lain.

Kreativitas pada intinya merupakan kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam ciri-ciri aptitude maupun non-aptitude, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya (Reni Akbar, dkk, 2001: 10).

Menjadi guru kreatif tidaklah terbentuk secara tiba-tiba, melainkan lahir dari proses pergumulan dengan ruang dan waktu seiring pengalaman yang dilaluinya. Guru yang kreatif artinya guru yang memiliki daya cipta, misalnya dalam menyiapkan metode, perangkat, media dan muatan materi pembelajaran. Dari kreativitas guru tersebut, akan menular pada siswa secara jangka pendek maupun panjang. Karena siswa -disadari atau tidak- cenderung belajar dari aktivitas dan kreativitas gurunya dalam proses pembelajaran. Kegiatan belajar yang variatif, dapat merangsang semangat dan rasa penasaran siswa untuk belajar PAI.

Kreativitas pada dasarnya merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada setiap manusia, yakni berupa kemampuan untuk mencipta (daya cipta) dan berkreasi. Implementasi dari kreativitas seseorangpun tidak sama, bergantung pada sejauh mana orang tersebut mau dan mampu mewujudkan daya ciptanya menjadi sebuah kreasi ataupun karya (Nashori, Fuad & Rachmy Diana Mucharam, 2002:21).

Salah satu hal yang menentukan sejauh mana seseorang itu kreatif adalah kemampuannya untuk dapat membuat kombinasi baru dari hal-hal yang ada. Demikian pula seorang guru dalam proses belajar mengajar, guru harus terampil dalam mengolah cara pembelajaran, cara membaca kurikulum, cara membuat, memilih dan menggunakan media pembelajaran, dan cara evaluasi baik dengan tes maupun melalui observasi (Djohar. MS., 2001: 127). Evaluasi berfungsi untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan, dan sebagai *feed back* bagi seorang guru.

Seorang guru harus mampu mengoptimalkan kreativitasnya. Kreativitas serta aktivitas guru harus mampu menjadi inspirasi bagi para siswanya. Sehingga siswa akan lebih terpacu motivasinya untuk belajar, berkarya dan berkreasi. Guru berperan aktif dalam pengembangan kreativitas siswa, yaitu dengan memiliki karakteristik pribadi guru yang meliputi motivasi, kepercayaan diri, rasa humor, kesabaran, minat dan keluwesan (fleksibel). Guru yang kreatif mempunyai semangat dan motivasi tinggi sehingga bisa menjadi motivator bagi siswanya untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas siswa, khususnya yang tertuang dalam sebuah bentuk pembelajaran yang inovatif. Artinya selain menjadi seorang pendidik, guru juga harus menjadi seorang kreator yang

mampu menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan kondusif bagi anak didik (Sardiman AM., 2001:127).

Kedudukan guru sebagai pendidik mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, salah satunya sebagai pengelola kelas. Guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berkumpulnya semua anak didik dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Dalam setiap proses pengajaran kondisi ini harus direncanakan dan diusahakan oleh guru agar dapat terhindar dari kondisi yang merugikan (usaha pencegahan), dan kembali kepada kondisi yang optimal apabila terjadi hal-hal yang merusak, yang disebabkan oleh tingkah laku peserta didik di dalam kelas (usaha kuratif) (Djamarah, Syaful Bahri, 2005:144).

Dengan mengkaji konsep dasar pengelolaan kelas, mempelajari berbagai pendekatan pengelolaan dan mencobanya dalam berbagai situasi kemudian dianalisis, maka guru akan dapat mengelola proses belajar mengajar secara lebih baik.

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor intrinsik) individu antara lain minat, kecerdasan, bakat, motivasi dan kemampuan kognitif, sedangkan faktor dari luar diri (faktor ekstrinsik) individu antara lain faktor lingkungan yaitu alam, sosial budaya dan keluarga dan faktor instrumental yaitu kurikulum, program, sarana dan fasilitas dan guru (Djamarah, Syaful Bahri, 2002: 144). Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka membantu murid untuk mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya (Hakim, Thursan, 2000: 11).

Berdasarkan argumen-argumen di atas, bahwa kreativitas guru dengan dibekali kemampuan mengelola kelas yang baik merupakan salah satu upaya yang dilakukan guru, khususnya guru PAI dalam meningkatkan prestasi belajar siswa bidang studi Pendidikan Agama Islam. Sehingga nantinya guru diharapkan lebih banyak berdiskusi dengan guru lain untuk mengembangkan kreativitas mengajar dan kemampuan mengelola kelas agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas

Kreativitas dapat ditumbuhkembangkan melalui suatu proses yang terdiri dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Kreativitas secara umum dipengaruhi kemunculannya oleh adanya berbagai kemampuan yang dimiliki, sikap dan minat yang positif dan tinggi terhadap bidang pekerjaan yang ditekuni, serta kecakapan melaksanakan tugas-tugas. Hal-hal yang mempengaruhi kreativitas diantaranya:

1. Iklim kerja yang memungkinkan para guru meningkatkan pengetahuan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas
2. Kerjasama yang cukup baik antara berbagai personel pendidikan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi
3. Pemberian penghargaan dan dorongan semangat terhadap setiap upaya yang bersifat positif bagi para guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.
4. Perbedaan status yang tidak terlalu tajam di antara personel sekolah sehingga memungkinkan terjalinnya hubungan manusiawi yang lebih harmonis.
5. Pemberian kepercayaan kepada para guru untuk meningkatkan diri dan mempertunjukkan karya dan gagasan kreatifnya.
6. Menimpakan kewenangan yang cukup besar kepada para guru dalam melaksanakan tugas dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas
7. Pemberian kesempatan kepada para guru untuk ambil bagian dalam merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang merupakan bagian dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah yang bersangkutan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan hasil belajar (Wijaya, Cece, & A. Tabrani Rusyan, 1992: 189-190).

Pada setiap orang ada kecenderungan atau dorongan untuk mewujudkan potensinya, untuk mewujudkan dirinya; dorongan untuk berkembang dan menjadi matang, dorongan untuk mengungkapkan dan mengaktifkan semua kapasitas seseorang. Dorongan ini merupakan motivasi primer untuk kreativitas ketika individu membentuk hubungan-hubungan baru dengan lingkungannya dalam upaya menjadi dirinya sepenuhnya. Motivasi intrinsik ini yang hendaknya dibangun dalam diri individu sejak

dini. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan individu dengan kegiatan-kegiatan kreatif, dengan tujuan untuk memunculkan rasa ingin tahu, dan untuk melakukan hal-hal baru

Kondisi eksternal (dari lingkungan) secara konstruktif ikut mendorong munculnya kreativitas. Kreativitas memang tidak dapat dipaksakan, tetapi harus dimungkinkan untuk tumbuh. Individu memerlukan kondisi yang memupuk dan memungkinkan individu tersebut mengembangkan sendiri potensinya. Maka penting mengupayakan lingkungan (kondisi eksternal) yang dapat memupuk dorongan dalam diri individu untuk mengembangkan kreativitasnya. Menurut pengalaman Rogers dalam psikoterapi, penciptaan kondisi keamanan dan kebebasan psikologis memungkinkan timbulnya kreativitas yang konstruktif.

Hal ini dapat terbentuk melalui tiga proses yang saling berhubungan yakni : Menerima individu sebagaimana adanya dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Mengusahakan suasananya yang didalamnya evaluasi eksternal tidak ada, sekurang-kurangnya tidak bersifat atau mempunyai efek mengancam. Memberikan pengertian secara empatik (dapat ikut menghayati) Dalam suasana ini "real self" dimungkinkan untuk timbul, untuk diekspresikan dalam bentuk-bentuk baru dalam hubungannya dengan lingkungannya. Inilah pada dasarnya yang disebut memupuk kreativitas.

Memberikan kesempatan pada individu untuk bebas mengekspresikan secara simbolis pikiran-pikiran atau perasaan-perasaannya, permissiveness akan memberikan individu kebebasan dalam berpikir atau merasa sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya. Ekspresi dalam bentuk tindakan agresif tidak selalu dimungkinkan, namun tindakan-tindakan konstruktif kearah kreatif hendaknya dimungkinkan. (<http://eko13.wordpress.com>).

Mengajar adalah suatu perbuatan yang kompleks, disebut kompleks karena dituntut dari guru kemampuan personal, profesional, dan sosial kultural secara terpadu dalam proses belajar mengajar. Dikatakan kompleks karena dituntut dari guru tersebut integrasi penguasaan materi dan metode, teori dan praktek dalam interaksi siswa. Dikatakan kompleks karena sekaligus mengandung unsure seni, ilmu, teknologi, pilihan nilai dan keterampilan dalam proses belajar mengajar.

Dalam proses belajar mengajar sesuai dengan perkembangannya guru tidak hanya berperan untuk memberikan informasi terhadap siswa, tetapi lebih jauh guru dapat berperan sebagai perencana, pengatur dan pendorong siswa agar dapat belajar secara efektif dan peran berikutnya adalah mengevaluasi dari keseluruhan proses belajar mengajar. Jadi dalam situasi dan kondisi bagaimanapun guru dalam mewujudkan proses belajar mengajar tidak terlepas dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi karena guru yang baik harus mampu berperan sebagai *planner, organisator, motivator dan evaluator*.

Dari uraian diatas jelas bahwa dalam proses belajar mengajar diperlukan guru-guru yang *profesional* dan paling tidak memiliki tiga kemampuan yaitu kemampuan membantu siswa belajar efektif sehingga mampu mencapai hasil yang optimal, kemampuan menjadi penghubung kebudayaan masyarakat yang aktif dan kreatif serta fungsional dan pada akhirnya harus memiliki kemampuan menjadi pendorong pengembangan organisasi sekolah dan profesi. Dengan kemampuan ini diharapkan guru lebih kreatif dalam proses belajar mengajarnya.

Ada beberapa syarat untuk menjadi guru kreatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Munandar yaitu :

1. Profesional, yaitu sudah berpengalaman mengajar, menguasai berbagai teknik dan model belajar mengajar, bijaksana dan kreatif mencari berbagai cara, mempunyai kemampuan mengelola kegiatan belajar secara individual dan kelompok, disamping secara klasikal, mengutamakan standar prestasi yang tinggi dalam setiap kesempatan, menguasai berbagai teknik dan model penelitian.
2. Memiliki kepribadian, antara lain : bersikap terbuka terhadap hal-hal baru, peka terhadap perkembangan anak, mempunyai pertimbangan luas dan dalam, penuh perhatian, mempunyai sifat toleransi, mempunyai kreativitas yang tinggi, bersikap ingin tahu.
3. Menjalin hubungan sosial, antara lain : suka dan pandai bergaul dengan anak berbakat dengan segala keresahannya dan memahami anak tersebut, dapat menyesuaikan diri, mudah bergaul dan mampu memahami dengan cepat tingkah laku orang lain (Munandar Utami, *Op.,cit*, hal. 67). Apabila syarat diatas terpenuhi maka sangatlah mungkin ia akan menjadi guru

yang kreatif, sehingga mampu mendorong siswa belajar secara aktif dalam proses belajar mengajar. Unsur-unsur yang ada dalam pelaksanaan proses belajar mengajar adalah bagaimana seorang guru dituntut kreasinya dalam mengadakan persepsi. Persepsi yang baik akan membawa siswa memasuki materi pokok atau inti pembelajaran dengan lancar dan jelas. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, bahasan yang akan diajarkan dibahas dengan bermacam-macam metode dan teknik mengajar. Guru yang kreatif akan memprioritaskan metode dan teknik yang mendukung berkembangnya kreativitas. Dalam hal ini pula, keterampilan bertanya sangat memegang peranan penting.

Guru yang kreatif akan mengutamakan pertanyaan divergen, pertanyaan ini akan membawa para siswa dalam suasana belajar aktif. Dalam hal ini guru harus memperhatikan cara-cara mengajarkan kreativitas seperti tidak langsung memberikan penilaian terhadap jawaban siswa. Jadi guru melakukan teknik "*brainstorming*". Diskusi dalam belajar kecil memegang peranan didalam mengembangkan sikap kerjasama dan kemampuan menganalisa jawaban-jawaban siswa setelah dikelompokkan dapat merupakan beberapa hipotesa terhadap masalah.

Selanjutnya guru boleh menggugah inisiatif siswa untuk melakukan eksperimen. Dalam hal ini ide-ide dari para siswa tetap dihargai meskipun idenya itu tidak tepat. Yang penting setiap anak diberi keberanian untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk didalam hal ini daya imajinasinya. Seandainya tidak ada satupun cara yang sesuai atau memadai yang dikemukakan oleh para siswa, maka guru boleh membimbing cara-cara melaksanakan eksperimennya. Tentu saja guru tersebut harus menguasai seluruh langkah-langkah pelaksanaannya.

Dianjurkan supaya guru mengutamakan metode penemuan. Pendayagunaan alat-alat sederhana atau barang bekas dalam kegiatan belajar. Mengajar sangat dianjurkan, guru yang kreatif akan melakukannya, ia dapat memodifikasi atau menciptakan alat sederhana untuk keperluan belajar mengajar, sehingga pada prinsipnya guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dituntut kreativitasnya dalam mengadakan apersepsi, penggunaan teknik dan metode pembelajaran sampai pada pemberian teknik

bertanya kepada siswa, agar pelaksanaan proses belajar mengajar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Guru yang kreatif tentu tidak lepas dari model pembelajaran yang dapat menyentuh motivasi untuk belajar, seperti yang termaktub dalam PP No. 19 tahun 2005 Bab IV Pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa "Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, keaktifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik." Hal tersebut merupakan dasar bahwa guru perlu menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM). Dimana pada dasarnya guru sudah banyak yang mengetahui hal tersebut, tetapi dalam penerapannya masih banyak kendala. Disinilah dibutuhkan kemauan dan motivasi yang kuat dari guru untuk menerapkan PAKEM di kelasnya.

PAKEM merupakan pembelajaran yang memungkinkan siswa melakukan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan ketrampilan, sikap dan pemahaman dengan mengutamakan belajar sambil bekerja, guru menggunakan berbagai sumber belajar dan alat bantu termasuk pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar agar pembelajaran lebih menarik, menyenangkan dan efektif. PAKEM kepanjangan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Aktif berarti dalam proses pembelajaran Kreatif berarti Efektif berarti tujuan pembelajaran dapat tercapai.

C. Kesimpulan

Semakin baik Kreatifitas guru, maka Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam semakin tinggi pula. Kedua, Terdapat hubungan positif antara Pengelolaan kelas dan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam, yang diindikasikan dengan. Semakin baik pengelolaan kelas, maka Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam semakin tinggi pula. Ketiga, Terdapat hubungan positif antara Kreatifitas guru dan pengelolaan kelas dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam. Semakin tinggi pengelolaan kelas, maka Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam semakin tinggi pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, 2002*
- E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan), Bandung, Remaja Rosda Karya, 2004*
- Esti Wuryani, Sri, Psikologi Pendidikan, Cet.III, Jakarta, PT. Gramedia, 2006*
Hasan, Maimunah, Membangun kreativitas Anak secara Islami, Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2001
- Hasan Sulaiman, Fatiyah, Sistem Pendidikan Versi Al Ghazaly, Cet. 2, terj. Fathur Rahman, Syamsuddin Asyrafi, Bandung, PT. Al Ma'arif, 1993*
- Jawad, M. Abdul, Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas berfikir pada diri dan organisasi anda, Bandung, PT. Syamil Cipta Media, 2002*
- Majid, Abdul, dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004*
- Malik Fajar, A, Holistika Pemikiran Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005*
- Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta, 2004*
- Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002*
Nashori, Fuad & Rachmy Diana Mucharam, Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islami, Yogyakarta, Menara Kudus, 2002
- Pendidikan Nasional, Standar Kompetensi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP & MTs, Jakarta, Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2003*
- Rohani, Ahmad, Pengelolaan Pengajaran, Cet. II, Jakarta; PT Rineka Cipta, 2004*
Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, cet. ke-4., Jakarta, Rineka Cipta, 2003
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung, Alfa Beta, 2007*

- Sumiyatiningsih, Dien, Mengajar dengan Kreatif dan Menarik, Yogyakarta, Andi Offset, 2006*
- Supriyadi, Dedi, Kreativitas Kebudayaan dan Perkembangan Iptek, Jakarta, Alfa Beta, 1996*
- Suryabrata, Sumadi, Psikologi Pendidikan, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2002*
- Syafaruddin, Irwan Nasution, Manajemen Pembelajaran, Ciputat, Quantum Learning, 2005*
- Syauhid Sukmadinata, Nana, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004*
- Toenlio, Teori dan Praktek pengelolaan kelas, Surabaya; Usaha Nasional, 1992*
- Wahib, Abdul, Mengajar dan Menilai Secara Kreatif, Seminar, Semarang, 25 April 2007*
- Warsito, Pengembangan Instrumen Kreativitas, Jakarta, Rineka Cipta, 2000*

BAB 6

PERANAN ASOSIASI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (AGPAI) DALAM PENINGKATAN PRPFESIONALISME GURU PAI

A. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dewasa ini yang semakin pesat membawa tantangan tersendiri terhadap fenomena kehidupan beragama dan menuntut guru pendidikan agama Islam untuk dapat berperan dalam menampilkan nilai-nilai agama yang dinamis dan mendorong serta mengarahkan berbagai kemajuan juga tantangan zaman yang dihadapinya, sedangkan di sisi lain adanya pengaturan angka kredit bagi jabatan guru menuntut adanya kemampuan guru pendidikan agama islam yang lebih profesional, berkarya dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Kenyataan lain menunjukkan bahwa hasil dari penataran guru pendidikan agama Islam yang selama ini dilaksanakan perlu dukungan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran pendidikan agama islam (MGMP PAI) yang terhimpun dalam wadah organisasi Asosiasi guru pendidikan agama Islam (AGPAI).

Kondisi geografis wilayah nusantara, jumlah sekolah dan guru pendidikan agama Islam yang cukup banyak, menurut sistem komunikasi dan pembinaan profesionalisme terhadap guru pendidikan agama Islam yang lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kemampuan profesionalisme guru pendidikan agama Islam memerlukan suatu wadah organisasi, antara lain untuk membangun komunikasi, informasi, berdiskusi menyalurkan aspirasi dan pembinaan diantara sesama guru pendidikan agama Islam yang arah dan tujuan serta pedomanya diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah

tangga (ART) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAI) (ADRT AGPAI, 2007).

Sedikitnya terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yakni: (1) sarana gedung, (2) buku yang berkualitas, (3) guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Demikian diungkapkan mantan menteri pendidikan nasional Wardiman Djoyonegoro dalam wawancaranya dengan televisi pendidikan Indonesia (TPI) tanggal 16 agustus 2004. Dalam pada itu, dikemukakan bahwa “hanya 43% guru yang memenuhi syarat “; artinya sebagian besar guru (57%) tidak atau belum memenuhi syarat, tidak kompeten, dan tidak profesional. Pantas kalau kualitas pendidikan kita jauh dari harapan, dan kebutuhan. Padahal dalam kapasitasnya yang sangat luas, pendidikan memiliki peran dan berpengaruh positif terhadap segala bidang kehidupan dan perkembangan manusia dengan berbagai aspek kepribadian (E. Mulyasa, 2008: 3).

Di sinilah letak pentingnya peranan seorang guru. Sehingga bukan hal yang terlalu berlebihan jika ada penilaian bahwa berhasil atau tidaknya proses pendidikan tergantung kepada peranan guru. Walaupun peranannya sangat menentukan, namun harus disadari bahwasanya guru bukan satu-satunya penentu keberhasilan atau kegagalan pembelajaran. Sebab, keberhasilan atau kegagalan pembelajaran dipengaruhi oleh beragam faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, guru harus menghindari sikap merasa sebagai pihak yang paling berjasa dan paling menentukan dalam keberhasilan pembelajaran (Ngainun Naim, 2009: 4).

Dari latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut: Pertama, Bagaimana Peranan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) ? Kedua, Bagaimana Profesionalisme Guru PAI di Kabupaten Serang ?

B. Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia

Seiring dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan perkembangan Teknologi dewasa ini yang semakin pesat akan membawa tantangan tersendiri terhadap fenomena kehidupan beragama dan menuntut Guru Pendidikan Agama Islam untuk dapat berperan dalam menampilkan nilai-nilai agama yang dinamis

dan mendorong serta mengarahkan berbagai kemajuan juga tantangan zaman yang dihadapinya. Sedangkan di sisi lain adanya sertifikasi dan pengaturan angka kredit bagi jabatan guru menuntut adanya kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam yang lebih profesional, berkarya dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Kondisi geografis wilayah nusantara, jumlah sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam yang cukup banyak, menuntut sistem komunikasi dan pembinaan profesionalisme terhadap guru Pendidikan Agama Islam yang lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan kemampuan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam memerlukan suatu wadah organisasi dalam bentuk asosiasi, antara lain untuk membangun komunikasi, informasi, berdiskusi menyalurkan aspirasi dan pembinaan diantara sesama Guru Pendidikan Agama Islam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menekankan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik dan kompetensi yang meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Di sisi lain Guru dituntut untuk membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.

Atas pertimbangan tersebut, maka dibentuklah organisasi profesi di kalangan Guru Pendidikan Agama Islam dalam bentuk asosiasi. Pada bulan Maret 2007, Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Dit PAIS) Depag RI mengadakan kegiatan di sebuah hotel di kawasan Cipayung Bogor. Kegiatan tersebut dihadiri oleh guru-guru Pendidikan Agama Islam mewakili Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) di SD, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP-PAI) SMP dan SMA/SMK seluruh Indonesia. Salah satu hasil dari kegiatan tersebut adalah disepakatinya pembentukan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia dan telah terpilih Pengurus yang sifatnya sementara. Sementara perangkat organisasi yang lainnya seperti AD/ART, Program Kerja belum ada.

Sehubungan dengan itu, maka program Pengurus hanya satu, yakni mengadakan Kongres Nasional untuk menyusun AD/ART, Program Kerja dan Pemilihan Pengurus yang definitif. Pada tanggal 24 - 26 Agustus 2007 terselenggara Kongres Nasional

I AGPAII yang dihadiri oleh 110 orang GPAI dari 18 Provinsi yang meliputi SD, SMP, SMA dan SMK. Pembukaan Kongres dilaksanakan di Balai Agung DKI Jakarta, sedangkan sidang-sidang dilanjutkan di SLB Pembina Lebak Bulus Jakarta Selatan.

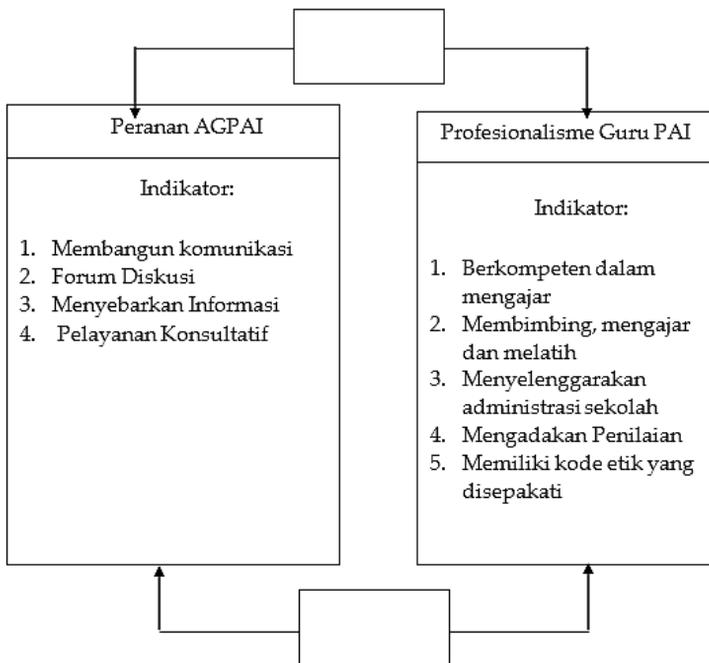
(<http://agpaijatim.blogspot.com/2012/02/swkilas-tentang-agpai-asosiasi-guru>).

Guru dan dosen yang profesional merupakan faktor penentu proses dan luaran pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menjadi profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Pemberian prioritas yang sangat rendah pada pembangunan pendidikan selama beberapa puluh tahun terakhir telah berdampak buruk yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Asrorun Ni'am Sholeh, 2006:9).

Sebagai tenaga pendidik yang memiliki kemampuan kualitatif, guru harus mempunyai ilmu keguruan dan kemampuan menerapkan strategi pembelajaran untuk menghantarkan siswanya pada tujuan pendidikan, dalam hal ini pendidikan agama misalnya, yaitu terciptanya generasi mukmin yang berkepribadian ulu' albab dan insan kamil. Guru agama tidak cukup mentransmisikan pengetahuan agama kepada siswa. Guru agama harus mampu membimbing, merencanakan, memimpin, mengasuh, dan menjadi konsultan keagamaan bagi siswanya. Artinya, guru agama disamping harus menguasai materi agama, ia pun harus menguasai metodologi pembelajaran sebagai syarat profesional di bidangnya dan juga bagi pelajaran yang lain (Ahmad Barizi, 2009: 144).

Dengan demikian, pekerjaan professional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu dalam hal ini, menjadi guru haruslah professional, seorang guru harus disiplin ilmu, keterampilan dalam mengajar, menguasai bahan materi yang akan diajarkan, mengetahui psikologis siswa dan sebagainya. Sehingga dalam pembelajarannya mencapai hasil yang diinginkan.

Dengan demikian secara skema dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



AGPAI adalah wadah berhimpunya Guru Pendidikan Agama Islam diberi nama Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAI) (AD/RT AGPA, 2007) merupakan lembaga yang menyalurkan aspirasi dari guru pendidikan agama Islam.

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) adalah mitra kerja ditpais, sebagai wadah formal, resmi dan terstruktur untuk seluruh GPAI, mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA dan sedrajat (Direktorat Pendidikan Agama Islam, 2009: 5-6).

Diperlukan suatu hubungan kerja kesejawatan diantara para guru. Kerja sama semacam ini dipandang sangat penting, karena dengan kerja sama ini, akan saling mengisi kekurangan masing-masing guru. Dengan kerja sama kesejawatan juga terjadi proses belajar antar para guru. Artinya, terjadi pentutoran sebaya. Antar guru untuk saling memberikan pengetahuan dan pengalamanya (Moedjitro, 2001:69).

Sesuai dengan Fungsi dan tujuannya dari Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam ialah sebagai berikut :

1. Fungsi Asosiasi Pendidikan Agama Islam (AGPAI)

Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) berfungsi sebagai forum konsultasi dan komunikasi antara sesama Guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya meningkatkan kemampuan profesionalismenya;

2. Tujuan Asosiasi Pendidikan Agama Islam (AGPAI)

- a. Meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sebagai Guru Pendidikan Agama Islam yang bertujuan menanamkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah Swt.
- b. Menumbuhkan semangat Guru Pendidikan Agama Islam untuk meningkatkan kemampuannya dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
- c. Meningkatkan kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam dalam memilih dan menggunakan strategi serta metode mengajar yang tepat, sehingga dapat meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam.
- d. Menampung segala aspirasi dan permasalahan serta advokasi yang dihadapi Guru Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan tugas serta bertukar pikiran/informasi juga mencari jalan penyelesaiannya.
- e. Membantu Guru Pendidikan Agama Islam untuk memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan Pendidikan Agama Islam.
- f. Meningkatkan kegiatan silaturahmi dan tukar informasi diantara sesama pengurus, dan anggota asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam.
- g. Mensosialisasikan berbagai kebijakan pendidikan dari Depdiknas dan Depag atau Instansi lain yang terkait dengan pendidikan.
- h. Membantu Guru Pendidikan Agama Islam untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di sekolah.

- i. Menambah wawasan tentang berbagai perkembangan terbaru keilmuan dan inovasi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dewasa ini; (*Ibid*)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia profesional diartikan dengan (1) bersangkutan dengan profesi; (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (Anonimus, 1989: 702).

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif (Kunandar, 2007: 45).

Jadi profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan kesiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.

Profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar untuk menerima

panggilan tersebut dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah gelapnya kehidupan (<http://ranisakura.wordpress.com/2010/06/03pengertian-profesionalisme/>).

Selain itu juga profesionalisme merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan secara serius dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Profesionalisme membutuhkan keahlian khusus di bidang pekerjaan tertentu (Anis Fauzi, 2007: 230). Dan biasanya di buktikan keprofesionalismenya dengan mendapatkan ijazah atau sertifikat profesi tertentu.

Melalui perolehan ijazah tersebut diharapkan seorang guru sudah memiliki kompetensi dasar dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai guru bidang studi tertentu di sekolah.

Sedangkan yang dimaksud dengan professional itu sendiri, menurut undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sebagai berikut : “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran dan kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi” (Ayusita Mahanani, 2011: 10).

Professional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Depag RI, 2006: 83). Sebagaimana disebutkan pada pasal 7 UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Memiliki, bakat, minat panggilan jiwa, dan idealisme
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
9. Memiliki organisasi profesi mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (*Ibid*, h.87-88).

Prinsip tersebut tidak boleh berhenti sebatas prinsip, tetapi juga harus diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari. Wujudnya berupa rasa tanggung jawab sebagai pengelola belajar (*manager of learning*), pengarah belajar (*director of learning*), dan

perencanaan masa depan masyarakat (*planner of the future society*). Dengan tanggung jawab ini, pendidik memiliki tiga fungsi, yaitu (1) fungsi instruksional yang bertugas melaksanakan pengajaran; (2) fungsi edukasional yang bertugas mendidik peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan; dan (3) fungsi managerial yang bertugas memimpin dan mengelola proses pendidikan (Nganiun Naim, 2009: 59).

Oleh karena itu menjadi guru yang professional ternyata bukan pekerjaan yang mudah. Sebab dengan tiga fungsi diatas, seorang pendidik, terutama dalam konsep islam dituntut untuk memiliki kompetensi yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya. Kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Uraian ini menunjukkan adanya titik temu antara kompetensi dan profesionalisme. Guru yang memiliki kompetensi akan dapat melaksanakan tugasnya secara professional.

Sebagai pendidik profesional, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga memiliki pengetahuan dan kemampuan dan kemampuan profesional. Dirumuskan 10 ciri suatu profesi yaitu; (1) memiliki signifikansi sosial; (2) memiliki keahlian/keterampilan tertentu; (3) keahlian/keterampilan diperoleh dengan menggunakan teori dan metode ilmiah; (4) didasarkan atas disiplin ilmu yang jelas; (5) diperoleh dengan pendidikan dalam masa tertentu yang cukup lama; (6) aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional; (7) memiliki kode etik; (8) kebebasan untuk memberikan judgement dalam memecahkan masalah dalam lingkungan kerjanya; (9) memiliki tanggung jawab profesional dan otonomi; dan (10) ada pengakuan dari masyarakat dan imbalan atas layanan profesinya (Abuddin Nata, 2008: 156).

Jika cirri-ciri profesionalisme tersebut di atas ditunjukkan untuk profesi pada umumnya, maka khusus untuk profesi seorang guru dalam garis besarnya ada tiga.

Pertama, seorang guru yang professional harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang akan di ajarkan dengan baik. Ia benar-benar seorang ahli dalam bidang ilmu yang diajarkan.

Kedua, seorang guru professional harus memiliki kemampuan menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang dimilikinya (*transfer of knowledge*) kepada murid-muridnya secara efektif dan efisien.

Ketiga, seorang guru yang profesional harus berpegang teguh kepada kode etik profesional sebagaimana tersebut diatas (*Ibid*, h. 157).

Selain itu juga profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang guru diantaranya sebagai berikut :

1. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu, dan ketekunan dalam mengikuti perkembangan ilmu yang dikuasai juga merupakan cirri profesionalitas.
2. Kemampuan seseorang dalam ilmu yang dikuasai, khususnya yang berguna bagi kepentingan sesama
3. Ketaatan dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi etika keilmuan, serta kemampuannya dalam memahami dan menghormati nilai-nilai sosial yang berlaku dilingkungannya.
4. Besarnya tanggung jawab terhadap tuhan yang maha esa, bangsa, Negara dan masyarakat, keluarga, serta diri sendiri atas segala tindakan lanjut dan perilakunya dalam mengemban tugas (Ayusita Mahanani, *Op. Cit*, h. 11).

Dalam kaitanya dengan uraian tersebut diatas, seorang guru di samping sebagai pengajar, juga harus sebagai pendidik. Dengan demikian, disamping membimbing para siswa untuk menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan (mengajar), seyogyanya guru juga membimbing siswa- siswanya mengembangkan segenap potensi yang ada dalam diri mereka mendidik.

Guru yang professional adalah sosok guru yang memiliki intelektual, *skill*, moral dan semangat juang tinggi yang disertai dengan kualitas keimanan dan ketaqwaan, serta memiliki etos kerja yang kuat yang meliputi disiplin kerja, menghargai waktu, berprestasi dan menjadikan profesionalisme sebagai motivasi bagi pengembangan dirinya. Sehingga dengan demikian bersama guru dan tenaga kerja yang professional yang menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai pendidikan serta sadar akan eksistensinya sebagai *firs person* dalam mengarahkan peserta didik menjadi generasi yang berkualitas (Ayusita mahanani, *Op. Cit*, h. 11-12).

Oleh karena itu guru adalah figur seseorang pemimpin. Ia adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

BAB

7

DAMPAK IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING & LEARNING (CTL) DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR PAI

A. Pendahuluan

Dalam konteks pendidikan dan pengajaran, guru perlu memikirkan perbaikan mutu pendidikan dengan jalan meningkatkan kualitas dan intensitas proses belajar mengajar. Dengan perbaikan mutu pembelajaran di kelas, secara tidak langsung kita telah berusaha ikut meningkatkan kualitas manusia Indonesia sebagai upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi tantangan masa depan di era globalisasi.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, guru pada umumnya sangat mengharapkan siswanya memiliki motivasi, dan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran yang dibinanya, dan yang paling diharapkan oleh guru adalah semua siswa memiliki prestasi belajar yang tinggi. Namun kenyataannya, siswa kurang menunjukkan motivasi dan minat yang tinggi terhadap mata pelajaran yang dipelajarinya. Tentunya sudah dapat ditebak, jika motivasi dan minat siswa dalam mengikuti pelajaran rendah, maka prestasi belajarnya pun pasti rendah.

Banyak faktor lain yang menjadi penyebab rendahnya motivasi, minat dan prestasi belajar siswa. Akan tetapi, faktor strategi pembelajaran dalam menyajikan materi pelajaran yang kurang menarik patut dicatat sebagai salah satu faktor penyebab rendahnya minat mengikuti pelajaran dan prestasi belajar.

Wina Sanjaya dalam bukunya “Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan” mengatakan: guru di sekolah-sekolah pada umumnya menempatkan siswa-siswanya sebagai objek belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif, dan siswa lebih banyak belajar secara individual

dengan menerima, mencatat, dan menghafal materi pelajaran saja, dan belum menempatkan siswa sebagai subjek belajar.

Kondisi pembelajaran yang sangat memprihatinkan pada gilirannya membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan, guna mencari alternatif yang tepat dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan perolehan belajar siswa.

Oleh karena itu, agar minat siswa dalam mengikuti pelajaran dan prestasi belajarnya meningkat, maka guru perlu mengadakan perubahan dalam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dengan pendekatan *Contextual Teaching and Learning*, cukup beralasan jika dipilih sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah rendahnya motivasi, minat dan prestasi belajar.

Dengan metode pembelajaran tersebut, diharapkan siswa dapat dengan leluasa mengekspresikan semua kemampuan yang dimilikinya untuk belajar. Dengan demikian, pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi berpusat pada siswa, karena siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran sedangkan guru berfungsi sebagai fasilitator.

B. Contextual Teaching and Learning (CTL)

Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka (Wina Sanjaya, 2011: 182).

Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan karena siswa mengalami bagaimana bekerja dan mengalami secara langsung, bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil (Sopfan Amri dan Iif Khoiru Ahmad, 2010: 21).

Contextual Teaching and Learning (CTL) disebut pendekatan kontekstual karena konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya.

Pembelajaran kontekstual mendasarkan pada filosofi konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah

kontruksi (bentukan) kita sendiri. Glasersfeld dalam bukunya *Cognition, Construction of Knowledge, and Teaching*, menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan (realitas). Pengetahuan bukanlah gambaran dari dunia kenyataan yang ada. Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang.

Pembelajaran kontruksi tidak *teacher centered* ataupun *student centered*. Sebaliknya, konstruktivistik memosisikan kesetaraan guru-siswa dalam proses pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya proses elaborasi terhadap prinsip-prinsip dan konsep yang telah dipelajari guna membangun pengetahuan baru yang bermakna (Kokom Komalasari, 2011: 16).

Nilai lebih dari pembelajaran konstruktivistik adalah kekuatannya dalam membangun kebebasan, *realness* dan sikap serta persepsi yang positif terhadap belajar sebagai modal belajar. Sebab belajar butuh kebebasan, tanpa kebebasan siswa tidak dapat belajar dengan cara yang terbaik. Tanpa *realness* perlakuan-perlakuan guru terhadap siswa tidak menimbulkan rasa aman untuk belajar. Sikap dan persepsi positif terhadap belajar menjadi pemicu rasa suka dan keterlibatan diri secara total terhadap peristiwa belajar (*Ibid.*, hal. 17).

Kurikulum dan intruksi yang berdasarkan strategi pembelajaran kontekstual haruslah dirancang untuk merangsang lima bentuk dasar dari pembelajaran yaitu:

1. Menghubungkan (*relating*)

Relating adalah belajar dalam suatu konteks sebuah pengalaman hidup yang nyata atau awal sebelum pengetahuan itu diperoleh siswa. Guru menggunakan *relating* ketika mereka mencoba menghubungkan konsep baru dengan sesuatu yang telah diketahui siswa (Trianto, *op.cit.*, h.109).

2. Mencoba (*experiencing*)

Pada *experiencing* mungkin saja mereka tidak mempunyai pengalaman langsung berkenaan dengan konsep tersebut. Akan tetapi pada bagian ini guru harus dapat memberikan kegiatan yang *hands-on* kepada siswa sehingga dari kegiatan yang dilakukan siswa tersebut siswa dapat membangun pengetahuan.

3. Mengaplikasi (*applying*)

Strategi *applying* sebagai belajar dengan menerapkan konsep-konsep. Kenyataannya, siswa mengaplikasikan konsep-konsep ketika mereka berhubungan dengan aktivitas

4. Bekerja sama (*cooperating*)

Belajar merupakan pelajar kolaboratif dan kooperatif melalui belajar berkelompok, komunikasi interpersonal atau hubungan intersubjektif (Agus Suprijono, 2012:84).

5. Proses transfer ilmu (*transferring*)

Transferring adalah strategi mengajar yang kita definisikan sebagai menggunakan pengetahuan dalam sebuah konteks baru atau situasi baru suatu hal yang belum teratasi/diselesaikan dalam kelas. *Transferring* belajar menekankan pada terwujudnya kemampuan memanfaatkan pengetahuan dalam situasi atau konteks baru (Ibid h.. 84).

C. Perspektif Belajar dan Peran Guru dalam Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL)

Pada dasarnya, pengetahuan tidak dapat dipisahkan menjadi sebuah fakta atau proporsi yang terpisah-pisah, akan tetapi pengetahuan harus dapat mencerminkan sebuah keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan.

Dengan demikian, dalam proses pembelajaran, peserta didik perlu dibiasakan untuk memecahkan permasalahan dan menemukan hal-hal baru yang dapat bermanfaat bagi dirinya, serta mampu menciptakan gagasan baru.

Dalam pendekatan kontekstual, pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Guru harus mampu mengatur strategi belajar serta membantu peserta didik menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru serta memfasilitasi mereka pada saat belajar agar informasi baru yang mereka dapatkan bisa memberikan makna baru serta memberikkan kesempatan

D. Motivasi Belajar

Motivasi belajar dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor *intrinsik* dan *ekstrinsik*. Faktor *intrinsik* adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk berbuat dan mencapai

tujuan yang diharapkan, misalnya: berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar harapan akan cita-cita. Adapun faktor *ekstrinsik* yaitu dorongan yang timbul dari luar diri sendiri, misalnya: adanya penghargaan, dan lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar mengajar yang menarik.

Dalam belajar, seorang siswa akan berhasil jika pada dirinya terdapat keinginan untuk belajar. Keinginan atau dorongan untuk belajar inilah bisa dikatakan motivasi. Menurut Sardiman, *motivation is an essential condition of learning*. Hasil belajar akan menjadi optimal jika ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa (Sardiman, *op.cit.*, p. 84-85).

Motivasi juga dapat berguna sebagai pendorong usaha seseorang dalam pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam proses belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan didasari motivasi dan usaha yang tekun dalam belajar akan melahirkan prestasi yang baik, selain itu bahwa intensitas motivasi seseorang siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi belajarnya (Sardiman, *op.cit.*, h. 85-86).

E. Hasil Belajar PAI

Winkel menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Kemudian masih menurut Winkel, bahwa aspek perubahan itu mengacu kepada taksonomi tujuan pengajaran yang dikembangkan oleh Bloom, Simpson dan Harrow yang mencakup kognitif, afektif dan psikomotor (Purwanto, *op.cit.*, h. 45).

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Namun demikian, pengungkapan perubahan tingkah laku seluruh ranah itu, khususnya ranah rasa murid, sangat sulit. Hal ini disebabkan perubahan hasil belajar itu ada yang bersifat intangible (tak dapat diraba). Oleh karena itu, yang dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah hanya mengambil cuplikan perubahan tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik yang berdimensi cipta dan rasa maupun yang berdimensi karsa (Muhibbin Syah, 2012:216).

Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Tujuan pendidikan bersifat ideal sedangkan hasil belajar bersifat actual. Hasil belajar merupakan realisasi tercapainya tujuan pendidikan, sehingga hasil belajar yang diukur sangat tergantung kepada tujuan pendidikannya (Purwanto, *op.cit.*, h. 47).

Hasil belajar disini harus dievaluasi. Evaluasi berfungsi untuk melihat kembali apakah tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak, dan juga apakah proses belajar mengajar telah berlangsung efektif untuk memperoleh hasil belajar dengan baik.

F. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dalam proses pembelajaran sangat berpengaruh dan membantu terhadap ketercapaian hasil belajar siswa yang optimal.
2. Motivasi peserta didik mampu menjadi alat untuk pengendalian diri sehingga seseorang tidak terjerumus kedalam tindakan-tindakan bodoh yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
3. Siswa dengan motivasi tinggi akan mendapatkan hasil belajar yang tinggi pula terlebih didukung dengan pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL) yang memiliki banyak manfaat maka hasil belajarnya pun akan tinggi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dengan motivasi tinggi secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap hasil belajar.

G. Saran

1. Pendidik hendaknya memodifikasi pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta menggunakan strategi-strategi pembelajaran dan media-media pembelajaran dan memberikan motivasi- motivasi belajar dalam setiap pembelajaran yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan motivasi belajar yang tinggi dan kecerdasan intelegensi.

2. Para siswa harus dapat menggali dan mengembangkan motivasi belajar yang terdapat dalam diri disamping kecerdasan intelegensi.
3. Buku ini dapat kiranya bermanfaat sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang peduli dalam memajukan dunia pendidikan, dan dapat dikembangkan oleh pemerhati dan pelaku pendidikan lainnya dengan penelitian lebih lanjut yang sempurna dan lebih tajam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Edisi Revisi V)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Departemen Agama RI, *Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2004*.
- Depatremen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 756.
- Hamzah B. Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
- Jauhar, Mohammad, *Implementasi Paikem dari Behavioristik Sampai Kontruktivistik Sebuah Pengembangan Berbasis CTL*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011)
- Jauhar, Mohammad, *Implementasi Paikem dari Behavioristik Sampai Konstruktivistik, Sebuah Pengembangan Pembelajaran Berbasis CTL (Contextual Teaching and Learning)*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011)
- Jhonshon, B. Elaine, *CTL Menjadikan kegiatan Belajar Mengajar Mengasyikan dan bermakna*, (Bandung: Kaifa 2011)
- Komalasari, Kokom, *Pembelajaran Kontekstual: Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: PT Rmaja Rosdakarya, 2002)
- Rosalin, Elin, *Gagasan Merancang Pembelajar Kontekstual*, (Bandung: PT Karsa Mandiri Persada, 2008)
- Rusman, *Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011).
- Sondang P Siagian, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Sugiyono, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kompetensi dan Prakteknya)*,(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011 cetakan ke sembilan).
- Suprijono, Agus, *Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Syah, Muhibbin, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012).
- Syaodih Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif(Konsep Dasar dan Implementasinya pada KTSP)*, (Jakarta: Kencana, 2010, Cet. 4).
- Warsita, Bambang, *Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Wilis Dahar, Ratna, *Teori-teori Belajar dan Pembelajaran*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Wuryani Djiwandono, Sri Esti, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002).
- Yatim Riyanto, *Paradigma Baru Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana, 2012).

BAB 8

KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU DAN DISIPLIN BELAJAR SISWA

A. Pendahuluan

Peserta didik merupakan generasi yang akan menentukan nasib bangsa di kemudian hari. Hasil belajar yang baik dari peserta didik akan sangat menentukan kehidupannya nanti, karena keberhasilan suatu bangsa dalam memperoleh tujuannya tidak hanya ditentukan oleh melimpah ruahnya sumber daya alam, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.

Guru merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran di kelas. Berhasil atau tidaknya suatu kelas banyak ditentukan oleh profesionalisme seorang guru. Selain itu, guru juga memegang tugas yang sangat penting yaitu mengatur kehidupan kelas. Bagaimana pun suasana kehidupan kelas merupakan hasil kerja seorang guru. Iklim pembelajaran yang kondusif di kelas, siswa tekun belajar atau sebaliknya merupakan hasil rekayasa dan pemikiran seorang guru.

Menurut Mulyasa profesionalisme guru di Indonesia masih sangat rendah, hal tersebut disebabkan karena belum adanya perubahan pola mengajar dan sistem konvensional ke sistem kompetensi, beban kerja guru yang tinggi, dan masih banyak guru yang belum melakukan penelitian tindakan kelas. Atas dasar itulah standar kompetensi guru dibentuk agar benar-benar terbentuk guru yang profesional dan mempunyai kompetensi yang sesuai dalam mengajar (Mulyasa, 2007).

Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang Kompetensi Guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus

dimiliki, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Seorang guru yang berijazah S1 kependidikan belum tentu memperlihatkan kompetensi yang baik, seperti bisa mengajar dengan terampil.

Oleh karenanya pemerintah membuat Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan guru profesional selain memiliki kualifikasi akademik minimal S1, juga harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian.

Begitu pentingnya peran guru dalam mentransformasikan input pendidikan, sampai banyak pakar menyatakan bahwa di sekolah tidak akan ada perubahan atau peningkatan kualitas tanpa adanya perubahan dan peningkatan kualitas guru. Sayangnya, dalam kultur masyarakat Indonesia sampai saat ini pekerjaan guru masih cukup tertutup, bahkan atasan guru seperti kepala sekolah dan pengawas sekali pun tidak mudah untuk mendapatkan data dan mengamati realitas keseharian *performance* guru dihadapan siswa.

Memang program kunjungan kelas oleh kepala sekolah atau pengawas, tidak mungkin ditolak oleh guru, akan tetapi tidak jarang terjadi guru berusaha menampakkan kinerja terbaiknya baik pada aspek perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran hanya pada saat dikunjungi, selanjutnya ia akan kembali bekerja seperti sediakala, kadang tanpa persiapan yang matang serta tanpa semangat dan antusiasme yang tinggi.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, ada guru yang masih menerapkan metode mencatat pelajaran sampai selesai atau memberikan tugas menyelesaikan soal-soal latihan kemudian meninggalkan kelas hingga pelajaran selesai, sehingga suasana kelas berubah menjadi tidak kondusif karena guru tidak hadir di kelas tanpa ada alasan yang jelas. Bahkan seringkali siswa keluar kelas karena gurunya tidak ada dan guru kurang menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada siswa. Dalam hal penilaian, guru kadang hanya mengandalkan perasaan semata tidak berdasarkan hasil belajar anak yang sesungguhnya sehingga dapat dikatakan dalam penilaian belum menerapkan azas konsisten dan sistematis. Fenomena tersebut sangat memperhatikan, dan dapat diasumsikan bahwa kinerja guru belum optimal dalam

melaksanaan standar proses sesuai dengan Permendiknas No. 65 Tahun 2013.

Akhlak merupakan hal yang sangat penting terutama dalam kehidupan sehari-hari, baik tidaknya kepribadian seseorang dapat terlihat dalam bertingkah laku dan bertutur kata. Dengan akhlak yang baik seseorang tidak akan terpengaruh pada hal-hal yang negatif. Dalam agama Islam telah diajarkan kepada semua pemeluknya agar menjadi manusia yang berguna bagi dirinya serta berguna bagi orang lain. Manusia berakhlak adalah manusia yang suci dan sehat hatinya. Menjadi orang yang lebih baik dan berakhlak merupakan harapan setiap orang dan memiliki putera yang berakhlak merupakan harapan setiap orang tua. Demikian juga dengan seorang pendidik yang mengharapkan memiliki siswa yang berakhlak.

Pelaksanaan pembelajaran aqidah akhlak hendaknya bertujuan membentuk kepribadian yang baik dan yang paling penting adalah usaha mencari ridha Allah SWT. Jauh dari pekerjaan tercela, mencuri, berbohong, jarang shalat, sehingga melalui pembelajaran akidah akhlak siswa mampu memahami pesan-pesan yang dapat membawa dirinya pada kemuliaan tinggi yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam serta dapat menjadi panutan bagi masyarakatnya kelak ketika sudah dewasa nanti (Mahmud Samir Al-Munir, 2004).

Gerakan Disiplin Nasional (GDN) dalam kapasitasnya sebagai sebuah gerakan, berusaha untuk memobilisir segala potensi, baik yang masih tersembunyi maupun yang tampak. Salah satu potensi yang mahal adalah kualitas sumber daya manusia yang masih terlalu heterogen dalam menegakkan disiplin, maka jika GDN tercapai secara serempak dan menyeluruh dalam segala kehidupan, bangsa kita tidak hanya akan maju dalam aspek tertentu, tetapi hampir pasti aspek-aspek secara integral akan memberi bukti hasil kerja keras, sehingga tercipta budaya bersih, dan budaya kerja atau budaya belajar secara optimal.

Penulis memiliki anggapan bahwa kedisiplinan sangatlah penting ditanamkan pada anak-anak, karena dengan adanya penanaman sikap disiplin pada anak yang sedini mungkin akan dapat menampakkan tingkah laku yang disiplin pula. Dengan adanya sikap yang selalu disiplin baik pada diri anak didik atau pada guru, tentunya proses belajar mengajar yang berlangsung di

kelas akan lebih berjalan lancar dan efektif sehingga akan dapat menciptakan hasil yang optimal.

Seorang siswa dapat disebut disiplin apabila siswa melakukan suatu pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan, peraturan, norma yang berlaku dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari siapapun. Disiplin belajar siswa antara lain selalu mengikuti pelajaran, memperhatikan penjelasan guru, segera menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya, tidak meninggalkan kelas sebelum waktunya, selalu menyelesaikan tugas rumah tepat waktu, rutin belajar di rumah, menghargai waktu dan sebagainya.

Kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh guru akan memberikan dampak positif pada peningkatan disiplin siswa dan hasil belajar. Karena guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik akan menjadi cerminan bagi para peserta didik.

B. Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulannya sebagai berikut: Pertama, Terdapat pengaruh antara persepsi siswa tentang kompetensi kepribadian guru terhadap hasil belajar siswa; Kedua, Terdapat pengaruh antara disiplin belajar siswa hasil belajar siswa; Ketiga, Terdapat pengaruh antara Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Kepribadian Guru dan Disiplin Belajar Siswa terhadap hasil belajar siswa..

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2010). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. RINEKA CIPTA..
- Dodi Umami Rijal dan Erni Roesminingsih, *Pengaruh Kompetensi Pedagogig dan Motivasi Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa dalam Ujian Nasional di SMA Negeri se Kota Mojokerto*,(Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan Vol. 3 no. 3, 2014) h. 81
- E. Mulyasa. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. (2007)
- Gendro Wiyono. *Merancang Penelitian Bisnis dengan alat analisis SPSS & Smart PLS*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN. (2010).
- Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. (2006).
- Ismayanti Maya. *Pengaruh kedisiplinan, kompetensi dan kinerja guru PAI terhadap prestasibelajar siswa di MTsN se-Kabupaten Blitar, Tulung Agung*, Tesis. (2015)
- Mahmud Samir Al-Munir. *Guru Teladan dibawah Bimbingan Allah*, Jakarta: Gema Insani (2004)
- Prasetyo Puguh. *Pengaruh Persepsi Siswa tentang Kinerja Guru dan kompetensi guru Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Keuangan Siswa Kelas XI Program Keahlian AkuntansiSMK Negeri 1 Juwiring Klaten Tahun Ajaran 2010/2011*, Klaten: Tesis. (2015).
- Riduwan. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung : ALFABETA. (2010). Notoatmojo, Soekidjo. *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta : PT. RINEKA CIPTA, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. (2010)
- Sumantri Bambang, *Pengaruh Disiplin Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMK PGRI 4 Ngawi Tahun Pelajaran 2009/2010*, (Media Prestasi Vol.. VI No. 3 Edisi Desember 2010) h.117
- Umi Rosidah. *Profesionalisme guru, Motivasi siswa dan Prestasi siswa (Studi Kasus di MTs Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)*. (2008)

BAB

9

KEBIJAKAN OTONOMI SEKOLAH DAN OTONOMI BIROKRASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

A. Pendahuluan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan kepada kita semua mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Termasuk pula di dalamnya berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik.

Sehubungan dengan hal tersebut, H.A.R. Tilaar dalam E. Mulyasa (2002: 20) mempertegas bahwa pendidikan merupakan suatu keharusan. Menurutnya ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensi desentralisasi pendidikan. Ketiga hal tersebut adalah (a) pembangunan masyarakat demokrasi, (b) pengembangan sosial kapital, dan (c) peningkatan daya saing bangsa Indonesia.

Kalau kita mau jujur, sebenarnya, masih banyak daerah di Indonesia ini yang belum siap menerima berbagai kewenangan, termasuk menjalankan kewenangan bidang pendidikan. Alasan yang sering di dengar adalah: karena (a) sumber daya manusia mereka belum memadai, (b) sarana dan prasarana mereka belum tersedia, (c) anggaran pendapatan asli daerah (PAD) mereka sangat rendah, (d) mental mereka terhadap sebuah perubahan belum siap, serta (e) mereka juga gamang atau takut terhadap upaya pembaruan.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistik kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Sistem pendidikan yang sentralistik diakui kurang bisa mengakomodasi keberagaman daerah, keberagaman sekolah, serta keberagaman peserta didik, bahkan cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan.

Menguatnya aspirasi bagi otonomi dan desentralisasi pendidikan tidak terlepas dari kenyataan adanya kelemahan konseptual dan penyelenggaraan pendidikan (Hasbullah, 2006: 2), terutama dalam hal: (1) kebijakan pendidikan nasional sentralistik dan serba seragam, yang pada gilirannya mengabaikan keragaman sesuai dengan realitas kondisi ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah; (2) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan lebih berorientasi kepada pencapaian target tertentu, seperti kurikulum, yang pada gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh ranah dan potensi peserta didik.

Disadari bahwa pemberian porsi yang lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, membawa sejumlah implikasi, seperti: bidang administrasi, kelembagaan, keuangan, perencanaan, dan sebagainya. Karena itu, kesiapan daerah untuk dapat menjalankan peran yang lebih besar menjadi sentral dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan.

Masih menurut Hasbullah, diantara persoalan yang dihadapi pendidikan di daerah sekarang adalah menyangkut mutu lulusan yang masih rendah, kondisi fisik sekolah yang memprihatinkan, kekurangan guru dan kualifikasi yang tidak sesuai, ketidakmerataan penyelenggaraan pendidikan, masalah relevansi, kurikulum, dan hal-hal lainnya. Kesemuanya itu merupakan pekerjaan rumah yang cukup besar bagi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Kelompok-kelompok yang dipertemukan melalui industri pendidikan, seperti dosen, mahasiswa, guru dan murid, sering memainkan peran penting dalam memberikan masukan pada sistem politik. Kelompok-kelompok mahasiswa telah mempengaruhi pandangan pemerintah tentang berbagai sektor kehidupan publik. Dalam hal ini, Moh. Sirozi (2005: 53)

menyatakan bahwa sikap kritis dan dinamis yang dimiliki mahasiswa seringkali mempengaruhi kebijakan publik pemerintah. Guru-guru juga sering memainkan peran politik penting dalam masyarakat.

Melalui guru-guru, ide tentang nasionalisme ditransmisi dari para pemimpin politik kepada pers. Perlu diingat bahwa keterlibatan guru dalam dunia politik bisa didorong oleh keinginan untuk mengekspresikan aspirasi politik tertentu.

Menjadi birokrat kini serba dilematis dan membingungkan (Iwan K. Hamdan, 2007: 82) disatu sisi harus bekerja keras melayani rakyat yang kompleks dan berat, di sisi lain, peraturan daerah yang makin hari makin tumpang tindih dan berubah ubah. Kondisi ini diperparah oleh sistem pengawasan keuangan yang semakin ketat, serta multi penafsiran antara pelaksana dengan para penegak hukum, contohnya dalam Implementasi Kepres No. 80 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Berdasarkan Kepres tersebut menjadikan Pejabat Pelaksana Pembuat Komitmen (PPPK) pemerintah selalu jadi bulan-bulanan pemeriksa jika terjadi kontrak pada realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Selain itu, beliau menuturkan juga, pemberlakuan Permenagri No. 13 tentang Pengaturan Keuangan Daerah. Seluruh mekanisme administrasi keuangan daerah mengacu kepada Permendagri ini, sejak perencanaan, penggunaan anggaran hingga pelaporannya. Masalah muncul diantara pejabat dan hingga level pelaksana, seputar bagaimana mengimplementasikannya ditingkat transaksi keuangan. Sosialisasi dan pemahaman tentang aturan inilah yang menjadi sebab terganggunya kinerja pemerintah daerah.

B. Kebijakan Otonomi Sekolah dan Otonomi Birokrasi Pendidikan

Menurut H.A.R Tilaar (2008: 453), didalam sistem pendidikan nasional terdapat dua domain, yakni domain kebijakan pendidikan dan domain kebijakan publik. Dalam kebijakan publik yang merupakan suatu landasan dalam sistem pendukung eksternal dari sistem pendidikan nasional meliputi tiga aspek, yaitu: aspek kebudayaan, aspek politik, dan aspek ekonomi. Diatas fondasi inilah yang berupa kebijakan-kebijakan publik dalam

bidang kebudayaan, politik, dan ekonomi, serta merupakan landasan bagi pembangunan sistem pendidikan nasional.

Dalam domain kebijakan pemerintah inilah berisi tiga pilar utama sebagai sistem pendukung internal yaitu: para penyusun kebijakan pendidikan, manajemen pendidikan, dan layanan pendidikan. Diatas pilar-pilar sistem pendukung internal terjadilah proses belajar mengajar yang meliputi tiga unsur utama, yakni: tujuan, metodologi, dan evaluasi pendidikan.

Didalam sistem pendidikan nasional terjadi proses pendidikan dibawah atap nilai-nilai moral yaitu nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai moral ini memayungi keseluruhan sistem pendidikan nasional serta keseluruhan kebijakan pendidikan dan kebijakan publik.

1. Kebijakan Otonomi Sekolah

Kebijakan desentralisasi pendidikan memiliki beberapa kekuatan dan juga kelemahan (Sam M. Chan, 2005: 10-11). Kekuatannya adalah: (1) sudah merupakan kebijakan yang populis, (2) mendapat dukungan yang kuat dari berbagai pihak, (3) sebagai hal yang telah lama ditunggu menyusul adanya perubahan sosial politik, (4) kesiapan anggaran yang cukup dengan diterapkannya anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBN, dan (5) efisiensi perjalanan anggaran sebagai wujud pemangkasan birokrasi. Adapun kelemahan yang mungkin timbul dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan melalui Undang-Undang Otonomi Daerah adalah: (1) kurang siapnya SDM daerah terpencil, (2) tidak meratanya pendapatan asli daerah, khususnya daerah-daerah miskin, (3) mental korup yang telah membudaya dan mendarah daging, (4) menimbulkan raja-raja kecil di daerah surplus, (5) dijadikan komoditas, dan (6) belum jelasnya pos-pos pendidikan, sehingga merepotkan Depdiknas dalam mengalokasikannya.

Hasil penelitian Balitbang Depdikbud (1991) menyimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Manajemen sekolah secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas guru dan pengembangan sumber belajar.

Desentralisasi pengelolaan sekolah perlu dikatakan dalam rangka mengisi kebhinekaan dalam wadah negara kesatuan bangsa: bukan berdasarkan kepentingan kelompok dan daerah yang sempit. Pelaksanaan desentralisasi dalam pengelolaan sekolah memerlukan kesiapan berbagai perangkat pendukung di daerah. Setidaknya terdapat empat hal yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan desentralisasi berhasil (E. Mulyasa, 2022: 23). Keempat hal yang dimaksud adalah (1) peraturan perundang-undangan yang mengatur desentralisasi pendidikan dari tingkat daerah, yakni provinsi sampai tingkat kelembagaan; (2) pembinaan kemampuan daerah; (3) pembentukan perencanaan unit yang bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan pendidikan; serta (4) perangkat sosial, berupa kesiapan masyarakat setempat untuk menerima dan membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan desentralisasi tersebut.

2. Kebijakan Otonomi Birokrasi Pendidikan

Menurut pakar Administrasi publik UGM, Miftah Thoha dalam Iwan K. Hamdan (2007: 92), birokrasi pemerintah daerah harus melakukan *repositioning*, baik dalam bidang kelembagaan maupun di bidang sistem mekanisme kerja. *Repositioning* tersebut harus dilakukan melalui reformasi nilai-nilai paradigma baru yang diakibatkan oleh faktor-faktor lingkungan strategis lainnya, baik lokal, nasional maupun global.

Visi birokrasi pemerintah kabupaten/kota dicirikan pada empat ciri utama (Iwan K. Hamdan, 2007:92), yaitu: Pertama, kecepatan. Organisasi birokrasi yang sukses ditandai oleh adanya kecepatan dalam mengerjakan sesuatu hal. Organisasi melakukan respon kepada pengguna jasa secara cepat, dan melakukan perubahan strategis lebih cepat ketimbang sebelumnya; Kedua, fleksibilitas. Birokrasi yang bergerak lebih cepat dalam menanggapi perubahan merupakan birokrasi yang fleksibel. Fleksibilitas birokrasi dapat dilihat dari kemampuan orang-orang untuk mengerjakana pekerjaan yang multiple, dan secara kokoh masyarakat mempelajari keterampilan baru; mereka juga mempunyai kemauan untuk berganti penugasan dan lokasi, sehingga bisa menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang berbeda-beda.

Ketiga, Integrasi. Birokrasi yang mampu berubah arah secara cepat dan fleksibel dalam menghadapi perubahan mempunyai proses yang bisa merealisasikan konsep perubahan kedalam seluruh *bloodstream* intuisi. Konsep perubahan tersebut juga mampu di serap dan di pahami oleh seluruh pegawai, sehingga bisa mendorong inisiatif baru secara cepat, dan mampu memobilisasi sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan. Keempat, inovasi. Birokrasi yang berhasil dalam peraturan perubahan yang cepat, menunjukkan bahwa birokrasi tersebut menemukan esensi dan inovasi. Melakukan suatu jenis pekerjaan atau tugas dalam konteks dan cara yang sekarang berlaku, pada hakekatnya perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan. Jika tidak mampu melakukan perubahan, maka oraganisasi tersebut akan dengan mudah ketinggalan.

Pada bagian berikutnya, Miftah Thoha juga menyatakan bahwa perlunya melakukan reformasi birokrasi pemerintah di masa-masa yang akan datang diawali dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, birokrasi pemerintah yang akan datang haruslah berorientasi pada pasar atau *customer*. Setiap departemen/dinas/badan/biro harus mengenali siapa *customer*-nya masing-masing. Sehingga rencana strategis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan aspirasinya.

Kedua, di dukung oleh staf birokrasi dan pejabat yang profesional dengan menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sehingga faktor kecepatan, fleksibilitas, inovasi dan integrasi bisa dilaksanakan dengan baik.

Ketiga, desentralisasi merupakan sistem dan kinerja administrasi pemerintah yang diharuskan. Dengan demikian, sentralisasi dan cara-cara otoritarian yang ditinggalkan, sementara otonomi, desentralisasi dan demokrasi yang diwujudkan.

Keempat, organisasi kelembagaan birokrasi ramping tidak terlalu banyak pembidangan hierarkinya. Dengan demikian, lembaga pemerintahan yang akan datang mengurangi kekakuan hirarki menggunakan struktur

organisasi yang bersifat logical dengan telah diperkenalkan *information technology* dalam mekanisme kerjanya.

Kelima, organisasi birokrasi pemerintah memberi tempat pada jabatan politik. Hal ini dimungkinkan karena perubahan-perubahan sistem politik baru dengan banyaknya partai politik yang akan langsung atau tidak langsung mewarnai sistem birokrasi pemerintahan yang akan datang.

3. Otonomi Daerah Kabupaten/Kota

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan diberikan kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Kewenangan daerah kabupaten/kota, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 9 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali: bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fisikal, agama, serta bidang tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Adapun bidang-bidang pembangunan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi: Bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi serta tenaga kerja.

Pelimpahan kewenangan kepada daerah membawa konsekuensi terhadap pembiayaan guna mendukung proses desentralisasi sebagai termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tahun 1999. Selanjutnya dikeluarkan pula Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan daerah, yang bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab dan pasti, serta mewujudkan sistem

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah yang jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, Indra Djati Sidi dalam E. Mulyasa (2002:6), mengemukakan bahwa ada empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah, yaitu: Peningkatan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan, relevansi pendidikan, serta pemerataan pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah kepada pengelolaan berbasis masyarakat. Peningkatan peran serta orang tua dan masyarakat pada level operasional melalui komite sekolah.

Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Hal ini berkenaan dengan penerapan formula pembiayaan pendidikan yang adil dan transparan, pemerataan mutu pendidikan dengan adanya standar kompetensi minimal, serta pemerataan pelayanan pendidikan bagi siswa pada semua lapisan masyarakat.

Secara empiris dan realita di lapangan, harus diakui bahwa masih terdapat daerah tertentu yang belum siap menerima kewenangan dari pemerintah pusat, khususnya dalam bidang pendidikan. Sedangkan menurut Sam M. Cham dan Tuti T. Sam (2005:4), kemungkinan hal-hal yang menyebabkan daerah tertentu belum siap menerima desentralisasi pendidikan antara lain :

- a. Sumber daya manusia (SDM) belum mencukupi. Terdapat daerah tertentu yang kualitas SDM-nya belum dapat dengan baik memahami, menganalisis, serta mengaplikasikan konsep desentralisasi pendidikan.
- b. Sarana dan prasarana belum tersedia secara cukup dan memadai. Hal ini berhubungan erat dengan ketersediaan dana yang ada di setiap daerah. Selama ini, mungkin daerah-daerah tertentu asik dan terlena dengan sistem *dropping* yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

- c. Anggaran pendapatan asli daerah (PAD) mereka sangat rendah. Beberapa daerah yang selama ini kita kenal dengan daerah tertinggal, merasa keberatan untuk langsung menerima beban kewenangan kebijakan desentralisasi pendidikan.
- d. Secara psikologis, mental mereka belum siap menghadapi sebuah perubahan. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Namun, tidak semua orang memiliki pandangan dan sikap yang sama terhadap sebuah perubahan. Sebagian diantara mereka melihat perubahan sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan.
- e. Mereka agak gamang atau takut terhadap upaya pembaruan. Salah satu bentuk pembaruan dalam bidang pendidikan yaitu upaya pembaruan. Pembaruan dalam bidang pendidikan saat ini kita kenal dengan sebutan pembaruan kurikulum. Setiap kali terjadi pembaruan kurikulum, para guru kembali disibukkan dengan berbagai kegiatan, seperti penataran, uji coba model, uji mcoba mekanisme, sosialisasi kurikulum, dan sebagainya.

4. Keuntungan dan Kerugian Otonomi Sekolah

Berdasarkan penjelasan di atas, keuntungan dari kebijakan otonomi sekolah adalah:

- a. Pihak sekolah dapat leluasa untuk mengatur keperluan rumah tangga sekolahnya, terutama keperluan keuangan sekolahnya sendiri.
- b. Pihak dapat menentukan sendiri bentuk dan isi kurikulum yang akan diberlakukannya.
- c. Pihak sekolah dapat merancang kondisi masa depan sekolahnya sesuai dengan potensi sekolah yang ada.
- d. Warga sekolah dapat lebih memahami keperluan sekolah serta program kerja sekolahnya sendiri.
- e. Masyarakat di sekitar sekolah dapat memahami dan menerima program kerja sekolah secara lebih baik.

Sedangkan kerugian akibat dari kebijakan otonomi sekolah adalah:

- a. Pihak sekolah menjadi lebih repot dalam membuat anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

- b. Administrasi sekolah lebih terbuka, sehingga memungkinkan dilakukan audit oleh institusi terkait, seperti penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- c. Pihak sekolah menjalin komunikasi yang dinamis dan kreatif dengan masyarakat sekitarnya, khususnya dengan anggota komite sekolah maupun dewan pendidikan setempat.
- d. Pihak sekolah mendapat beban kerja yang berat, terutama dalam mengatur atau mengelola keuangan negara yang dibebankan kepada sekolah.
- e. Pihak sekolah harus ekstra berhati-hati dalam membuat program kerja, mengingat adanya campur tangan pihak lain (komite sekolah dan dewan pendidikan) dalam implementasi program kerja sekolah yang bersangkutan.

5. Keuntungan dan Kerugian Otonomi Birokrasi Pendidikan

Berdasarkan penjelasan di atas, keuntungan dari sistem birokrasi pendidikan yang dikembangkan di daerah kabupaten/kota antara lain:

- a. Proses rekrutmen, rotasi, mutasi dan promosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat dikerjakan secara lebih cepat, lebih mudah, dan lebih baik.
- b. Sistem penerimaan siswa baru, dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, serta sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan dapat diberlakukan secara selektif dan transparan.
- c. Pengelolaan keuangan sekolah menjadi lebih cepat dan lebih banyak di kelola di sekolah.
- d. Persediaan kas sekolah lebih terjamin dan lebih terkendali.
- e. Evaluasi dan pembinaan lembaga sekolah beserta warga sekolahnya dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.

Sedangkan kerugian yang bisa muncul dari pemberlakuan sistem birokrasi pendidikan di daerah otonomi antara lain:

- a. Sistem administrasi keuangan sekolah makin berbelit atau makin jelimet.
- b. Sistem kepegawaian (rekrutmen, rotasi, mutasi, dan promosi) tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan menjadi lebih kompleks.

- c. Kebijakan strategis dari pimpinan sekolah belum tentu bersinergi dengan kebijakan strategis kepala daerah otonomi yang bersangkutan.
- d. Ada kemungkinan munculnya tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dari latar belakang pendidikan selain fakultas keguruan dan ilmu pendidikan serta fakultas tarbiyah.
- e. Agenda sekolah harus menyesuaikan diri dengan agenda program pembangunan daerah otonomi yang bersangkutan.

C. Analisis Kebijakan Otonomi Sekolah dan Otonomi Birokrasi Pendidikan

1. Analisis Kebijakan Otonomi Sekolah di Kabupaten/Kota

Paradigma Manajemen Berbasis Sekolah beranggapan bahwa satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas sekolah. Dalam kaitan ini, Hamzah B. Uno (2007: 85) berpendapat bahwa kepala sekolah, guru dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus dihasilkan dari interaksi ketiga pihak tersebut.

Kemandirian setiap satuan pendidikan adalah salah satu sasaran dan kebijakan desentralisasi pendidikan. Sehingga sekolah-sekolah menjadi lembaga yang otonom dengan sendirinya. Pergeseran menuju sekolah-sekolah yang otonom adalah ajakan lantang yang memerlukan berbagai kajian serta perencanaan yang mendalam. Paradigma baru untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan partisipatif, tidak dapat dilaksanakan didalam suatu lingkungan yang tidak demokratis. Namun, pengembangan demokratisasi pendidikan tidak harus menunggu birokrasinya menjadi demokratis dulu, tetapi harus dilakukan secara simultan dengan konsep yang jelas dan transparan.

Kemampuan untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan diperlukan program yang sistematis dengan melakukan *capacity building*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan setiap satuan pendidikan secara berkelanjutan, baik dalam bidang manajemen pendidikan maupun peran-peran pembelajaran. Dalam kaitan ini, Hamzah B. Uno (2007: 87) menyebutkan adanya empat tahapan pokok yang harus dilakukan secara berkesinambungan.

Tahap pertama, dinamakan tahap praformal, yaitu satuan pendidikan yang belum memenuhi standar teknis yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan secara minimal. Satuan pendidikan ini perlu dilengkapi terlebih dahulu fasilitasnya agar dapat dinaikan ke tahap berikutnya.

Tahap kedua, dinamakan tahap formalitas, satuan pendidikan ini sudah memenuhi standar teknis secara minimal, seperti jumlah dan kualifikasi guru, jumlah kualitas ruang kelas, jumlah dan kualitas buku pelajaran, serta jumlah dan kualitas fasilitas pendidikan lainnya. *Capacity building* dilakukan melalui peningkatan kemampuan administrator (kepala sekolah) dan pelaksana pendidikan (guru, instruktur, dan tutor).

Tahap ketiga, dinamakan tahap transisional, satuan pendidikan yang sudah mampu memberikan pelayanan minimal pendidikan yang bermutu, seperti kemampuan memberdayakan sumber-sumber secara optimal, meningkatkan kreativitas guru, pendayagunaan perpustakaan, menambah anggaran dan dukungan fasilitas pendidikan dari sumber masyarakat, dan kemampuan lainnya yang mendukung pelayanan pendidikan.

Tahap keempat, dinamakan tahap otonomi, satuan pendidikan yang sudah mampu memberikan pelayanan di atas standard pelayanan minimal (SPM) dan akan bertanggung jawab terhadap *klien* serta *stakeholder* pendidikan.

2. Analisis Kebijakan Otonomi Birokrasi Pendidikan di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan sebaiknya tidak dilakukan melalui suatu mekanisme penyerahan “kekuasaan birokrasi” dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Depdiknas tidak hanya berkepentingan dalam mengembangkan kabupaten/kota dalam mengelola pendidikan, tetapi juga berkepentingan dalam mewujudkan otonomi satuan pendidikan. Depdiknas memiliki keleluasaan untuk

membangun kapasitas setiap penyelenggaraan pendidikan, yaitu sekolah-sekolah.

Kebijakan otonomi birokrasi pendidikan di kabupaten dan kota di pengaruhi oleh hasil interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu pihak penentu kebijakan, pihak pelaksana kebijakan, dan pihak pengguna kebijakan (Baedhowi, 2006: 96). Selanjutnya beliau menegaskan bahwa ketiga aktor tersebut dalam pemerintahan kabupaten/kota adalah: Bupati/Wali kota dan DPRD sebagai penentu kebijakan; Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan; serta sekolah dan masyarakat sebagai pengguna kebijakan.

Namun demikian, interaksi yang terjadi cenderung di laksanakan secara tidak seimbang diantara ketiga aktor tersebut. Aktor penentu kebijakan selalu lebih dominan, baik dalam proses penentuan maupun dalam implementasi kebijakannya, dinas pendidikan sebagai implemator, sering berperan hanya sebagai pelaksana atas dasar “instruksi” dari penentu kebijakan. Selain itu, sekolah dan masyarakat sebagai pengguna kebijakan, tidak diberi kesempatan yang seimbang dalam menentukan arah kebijakan. Karena kenyataannya keterlibatan publik dalam penentuan dan dalam pelaksanaan kebijakan belum di mobilisasi secara signifikan.

Kebijakan pendidikan dalam era otonomi daerah di kabupaten/kota seharusnya diputuskan atas dasar interaksi antara tiga aktor utama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota. Ketiga aktor tersebut adalah: (1) Bupati/Walikota sebagai penentu kebijakan; (2) komisi E DPRD sebagai lembaga legislatif yang menetapkan peraturan daerah dan melakukan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan eksekutif; serta (3) dinas pendidikan sebagai unit organik pemerintah daerah yang secara teknis bertanggung jawab dalam implementasinya.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Otonomi Sekolah di Kabupaten/Kota

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan otonomi sekolah antara lain:

- a. Sebagian besar tenaga pendidik sudah berpendidikan strata satu serta memahami sistem kurikulum yang berlaku.
- b. Sebagian besar tenaga kependidikan berkependidikan diploma dan mampu menguasai pengelolaan data melalui komputer.
- c. Sebagian sarana dan prasarana persekolahan sudah terpenuhi.
- d. Sistem kepemimpinan dan manajemen pendidikan yang dikembangkan lebih demokratis.
- e. Karakter siswa dan orang tua murid yang responsif terhadap program pendidikan sekolah.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan otonomi sekolah antara lain:

- a. Budaya kerja warga sekolah belum mendukung atau belum siap berkembang kearah yang lebih baik.
- b. Persaingan sekolah semakin sengit dan tak menentu.
- c. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan sekolah.
- d. Kebijakan pemerintah daerah otonomi yang kurang sesuai dengan kebijakan pimpinan sekolah.
- e. Masih kentalnya semangat primordialisme di kalangan warga sekolah.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Otonomi Birokrasi Pendidikan di Kabupaten/Kota

Faktor pendukung kebijakan otonomi birokrasi pendidikan di kabupaten/kota adalah:

- a. Sumber daya manusia di lingkungan dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota serta unit pelayanan teknis daerah bidang pendidikan di setiap kecamatan sudah tersedia dan sudah memadai serta sudah cukup bagus.
- b. Teknologi informasi dan komunikasi perkantoran sudah tersedia dalam jumlah yang cukup.
- c. Manajemen sistem informasi kependidikan sudah dapat berjalan dengan lancar.
- d. Kepemimpinan birokrasi pendidikan mulai berjiwa reformis dan semakin dinamis

- e. Perlakuan pihak pemerintah provinsi terhadap keberadaan birokrasi pendidikan di kabupaten/kota semakin bijak.

Faktor penghambat kebijakan otonomi birokrasi pendidikan di kabupaten/kota antara lain:

- a. Kebijakan bupati/wali kota yang sangat dominan, sehingga kreativitas kepala sekolah terhambat.
- b. Rendahnya inovasi pendidikan yang dikembangkan pimpinan sekolah.
- c. Rendahnya inovasi instruksional yang dikembangkan dewan guru di seluruh jenis dan jenjang pendidikan.
- d. Faktor politik kepartaian yang mendominasi arah pembinaan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Alokasi dana operasional sekolah yang terbatas dan serba dibatasi oleh institusi tertentu.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan serta mengacu pada pembatasan masalah yang telah ditegaskan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan di sekolah (pada tingkatan mikro) harus dihasilkan dari interaksi ketiga pihak tersebut. Kemandirian setiap satuan pendidikan adalah salah satu sasaran dari kebijakan desentralisasi pendidikan. Sehingga sekolah-sekolah menjadi lembaga yang otonom dengan sendirinya.
2. Kebijakan otonomi birokrasi pendidikan di kabupaten dan kota di pengaruhi oleh hasil interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan, yaitu: pihak penentu kebijakan, pihak pelaksana kebijakan, dan pihak pengguna kebijakan. Ketiga aktor tersebut dalam pemerintahan kabupaten/kota adalah: Bupati/Wali Kota dan DPRD sebagai penentu kebijakan; Dinas Pendidikan sebagai pelaksana kebijakan serta sekolah dan masyarakat sebagai pengguna kebijakan.

3. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kebijakan otonomi sekolah antara lain: (1) sebagian besar tenaga pendidik sudah berpendidikan strata satu serta memahami sistem kurikulum yang berlaku; (2) sebagian besar tenaga kependidikan berpendidikan diploma serta memahami pengolahan data melalui komputer; (3) sebagian sarana dan prasarana persekolahan sudah terpenuhi; (4) sistem kepemimpinan dan manajemen pendidikan yang dikembangkan lebih demokratis; serta (5) karakter siswa dan orang tua murid yang responsif terhadap program pendidikan sekolah.
4. Faktor pendukung kebijakan otonomi birokrasi pendidikan di kabupaten/kota adalah: (1) sumber daya manusia di lingkungan dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota serta unit pelayanan teknis daerah bidang pendidikan di setiap kecamatan sudah tersedia dan sudah memadai serta sudah cukup bagus; (2) teknologi informasi dan komunikasi perkantoran sudah tersedia dalam jumlah yang cukup; (3) manajemen sistem informasi kependidikan sudah dapat berjalan dengan lancar; (4) kepemimpinan birokrasi pendidikan mulai berjiwa reformis dan semakin dinamis; serta (5) perlakuan pihak pemerintah provinsi terhadap keberadaan birokrasi pendidikan di kabupaten/kota semakin bijak.

Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari tulisan ini, kami mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Seluruh warga sekolah hendaknya mampu memanfaatkan peluang yang di berikan pemerintah agar sekolah melaksanakan program pendidikannya secara otonomi. Dalam hal ini, kepala sekolah memegang peran penting sebagai manajer sekaligus sebaga *leader* di sekolahnya.
2. Seluruh tenaga kependidikan, baik yang berada di lingkungan dinas pendidikan kabupaten/kota maupun yang berada di lingkungan sekolah agar bersiaga untuk menguasai teknologi komunikasi dan informasi, serta sistem informasi manajemen kependidikan yang kini sedang dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baedhowi, *Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*, Unnes Perss, Semarang, 2006.
- E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Iwan K. Hamdan. *Pendidikan dan Birokrasi di Banten*. Penerbit Atsaurah Perss, Serang, 2007.
- M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sam M. Chan Dan Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Eara Otonomi Daerah*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Syaukani HR, *Pendidikan Paspur Masa Depan: Prioritas Pembangunan Dalam Otonomi Daerah*, Penerbit Nuansa Madani, Jakarta, 2006.

BAB 10

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH BERBASIS MORAL DAN NILAI UNTUK VISI INDONESIA 2030

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem politik terbuka akan mendapatkan banyak pengaruh dan harus mampu mengikuti ritme perubahan. Sistem politik di China yang dulunya sangat tertutup kini berusaha membuka diri meski terkesan sangat hati-hati dan sedikit demi sedikit. Kemampuan Tiongkok dalam menata sistem politiknya dapat dijadikan contoh yang baik, agar lebih peduli terhadap sistem politik di negaranya (Endang Komara, 2015: p. 117-124).

China dan India dengan segala ekspansinya, berdasarkan sejumlah parameter terkini dan prediksi ke depan, jelas merupakan pemenang dalam dunia pertarungan terbuka di era globalisasi, dimana tidak ada lagi hambatan tidak hanya pada pergerakan informasi, modal, barang, jasa, manusia, tetapi juga ideologi negara dan nasionalisme. Ketika Tiongkok membuka diri kepada dunia dua dekade lalu, masyarakat hanya membayangkan potensi Tiongkok sebagai pasar raksasa dengan lebih dari satu miliar konsumen sehingga sangat menarik bagi perusahaan ritel dan manufaktur dunia. Belakangan, Tiongkok tidak hanya menarik dan berkembang sebagai pasar, tetapi juga sebagai basis produksi berbagai produk manufaktur untuk memasuki pasar global. Awal abad ke-21 Tiongkok ini seperti abad ke-19 di Inggris (Kompas, 20 Mei 2006).

Pada bagian selanjutnya diperoleh informasi bahwa Tiongkok memasok 50 persen lebih banyak produksi kamera dunia, 30 persen lebih banyak pendingin udara/AC cair, 30 persen

pesawat televisi, 25 persen mesin cuci, 20 persen lemari es, dan masih banyak lagi.

Ada beberapa faktor yang mendukung Tiongkok melakukan hal tersebut, antara lain: Pertama, perusahaan-perusahaan teknologi asing berebut masuk untuk berinvestasi di Tiongkok, demi memanfaatkan akses pasar Tiongkok yang besar dan pertumbuhan pesat; Kedua, perusahaan lokal yang menarik modal dari investor Tiongkok di luar negeri (khususnya Taiwan) juga semakin terampil memproduksi barang-barang berteknologi tinggi. Ketiga, universitas-universitas di Tiongkok mampu mencetak insinyur baru dalam jumlah besar setiap tahunnya, dengan upah yang relatif murah dibandingkan merekrut insinyur asing. Keempat, negara ini memiliki infrastruktur yang relatif baik untuk mengangkut komponen dan barang dari luar dan juga ke seluruh negeri. Kelima, kebijakan pemerintah yang sangat mendukung antara lain investasi, perpajakan, dan perizinan bea cukai. Keenam, pengembangan kawasan ekonomi khusus (20 zona) sebagai mesin pertumbuhan ekonomi agar pembangunan ekonomi lebih fokus dan pembangunan infrastruktur juga lebih efisien (Kompas, 20 Mei 2006).

Kini Indonesia nampaknya semakin gamang menghadapi globalisasi, apalagi di tengah tekanan sentimen nasionalis di dalam negeri. Di pihak pemerintah sendiri, karena menilai telah berhasil menjalankan liberalisasi ekonomi tahap pertama, pemerintah cenderung menganggap remeh tantangan yang menanti di hadapan kita. Hal ini tercermin dari sikapnya yang menganggap remeh dan cenderung berpikir pendek. Padahal tantangannya akan semakin berat dan kompleks seiring dengan semakin dalamnya integrasi internasional. Tidak jelas bagaimana perekonomian dan bangsa menghadapi persaingan yang semakin besar yang tidak dapat dibendung lagi (Kompas, 20 Mei 2006).

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kecenderungan pola kepemimpinan kepala sekolah selama ini; bagaimana dinamika nilai dan moral kepemimpinan kepala sekolah; dan bagaimana karakteristik pendidikan dalam konteks Visi Indonesia 2030?

Fred R. David dalam Nanang Fattah (2016:7), menjelaskan bahwa: nilai-nilai unggulan daya saing dan etika bisnis dalam konteks manajemen bisnis strategis adalah: a. keunggulan

kompetitif; B. strategi bisnis; C. perumusan misi dan visi organisasi; D. kemampuan merespons tuntutan eksternal, yaitu peluang dan ancaman; e. kemampuan peningkatan kapasitas organisasi/faktor internal; F. kemampuan menentukan tujuan strategis/jangka panjang; dan g. kemampuan untuk membuat kebijakan perusahaan.

Dalam konteks perubahan paradigma kepala sekolah yang lebih ditekankan pada kepemimpinan pembelajaran, maka kepala sekolah harus memahami pentingnya penguasaan beberapa kecakapan hidup bagi siswa sebagai hasil kerangka kompetensi abad 21.

Mutiani dalam tulisannya tentang “Reaktualisasi Implementasi Nilai Pancasila Bagi Demokrasi Indonesia” (Jurnal Sosiadiaktika, Volume 2, No. 2 Desember 2015 hal. 16-183, UIN Jakarta), menyimpulkan bahwa: Pancasila adalah dasar negara. Negara Indonesia yang telah ditetapkan oleh para pendiri negara harus menjadi acuan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai tantangan dalam mengusung ideologi Pancasila tidak akan mampu menggantikan Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Pancasila adalah ideologi sejati bangsa Indonesia.

Toto Suharto dalam tulisannya tentang “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia” dalam Jurnal Kajian Islam ISLAMICA, Volume 9, Nomor 1, September 2014, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia , P. 81-109, disebutkan bahwa: ada enam nilai dasar yang ditanamkan dalam pendidikan Muhammadiyah, yaitu: Pertama, pendidikan Muhammadiyah diselenggarakan dengan mengacu pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits; Kedua, 'Roh al-ikhlas' menerima Ridho Allah sebagai landasan dan inspirasi dalam upaya mendirikan dan menjalankan amal usaha di bidang pendidikan. Ketiga, menerapkan prinsip kerjasama dengan tetap menjaga sikap kritis; Keempat, selalu menjaga dan menghidupkan kembali prinsip pembaharuan, inovasi dalam menjalankan amal usaha di bidang pendidikan; Kelima, mempunyai budaya berpihak pada pihak yang mengalami kesengsaraan dengan melakukan proses kreatif sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat Indonesia; Keenam, memperhatikan dan melaksanakan asas

keseimbangan dalam mengelola lembaga pendidikan, antara akal sehat dan kesucian hati (sebagaimana tertuang dalam Keputusan Tanfidz Kongres Satu Abad Muhammadiyah: Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 di Yogyakarta, Pusat Pimpinan Muhammadiyah, 2010, hal.128).

B. Kepemimpinan

Terkait dengan kepemimpinan berbasis nilai dan moral, Daniel Goleman (2002:39) mengidentifikasi empat dimensi kecerdasan emosional yang dibutuhkan seorang pemimpin, yaitu: kesadaran diri, manajemen diri (terkait kompetensi individu), Kesadaran Sosial, dan Hubungan. Manajemen (terkait kompetensi sosial).

Indikator dimensi baru yang keempat mencakup hal-hal berikut:

1. Dimensi kesadaran diri, dengan indikator antara lain:
 - a. Emosi Kesadaran Diri: Membaca emosi seseorang dan mengenali dampaknya, menggunakan "akal sehat" untuk memandu keputusan.
 - b. Penilaian diri yang akurat: Mengetahui kelebihan dan keterbatasan diri.
 - c. Percaya diri : Perasaan yang baik terhadap kemampuan dan kesanggupan seseorang.
2. Dimensi manajemen diri, dengan indikator antara lain:
 - a. Pengendalian Diri Emosi : menjaga agar emosi dan dorongan emosi tetap terkendali.
 - b. Transparansi: menampilkan kejujuran, integritas dan kepercayaan
 - c. Kemampuan beradaptasi: Fleksibilitas dalam beradaptasi terhadap perubahan situasi atau mengatasi hambatan.
 - d. Prestasi : Dorongan untuk meningkatkan kinerja agar memenuhi standar yang sempurna
 - e. Inisiatif: Kesiapan untuk bertindak dan memanfaatkan peluang
 - f. Optimisme : Melihat sisi positif dari suatu peristiwa

3. Dimensi kesadaran sosial, dengan indikator antara lain:
 - a. Empati: Merasakan emosi orang lain, memahami perspektif mereka, dan menaruh perhatian aktif pada kekhawatiran mereka.
 - b. Kesadaran organisasi: alur membaca, jaringan keputusan, dan politik di tingkat organisasi.
 - c. Layanan: Kenali dan penuhi kebutuhan pengikut, klien, atau pelanggan.
4. Dimensi Manajemen Hubungan , dengan indikator antara lain:
 - a. Kepemimpinan yang inspiratif: Membimbing dan memotivasi dengan visi yang meyakinkan
 - b. Pengaruh: Adakan berbagai taktik untuk mengundang
 - c. Kembangkan orang lain: Perkuat kemampuan orang lain melalui umpan balik dan bimbingan.
 - d. Ubah katalis: Mulai, kelola, dan pimpin ke arah yang baru
 - e. Manajemen konflik: Selesaikan perselisihan.
 - f. Membangun Ikatan: Menumbuhkan dan memelihara jaringan hubungan.
 - g. Kerja tim dan kolaborasi: Kolaborasi dan membangun tim.

C. Kepala Sekolah

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah juga cenderung maju semakin pesat, sehingga menuntut penguasaan yang profesional. Menyadari hal tersebut, menurut E.Mulyasa (2007, 25), setiap kepala sekolah dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan secara terarah, terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam kerangka inilah perlunya perbaikan manajemen kepala sekolah secara profesional untuk mensukseskan program pemerintah yang digulirkan yaitu otonomi daerah, desentralisasi pendidikan, manajemen berbasis sekolah, kurikulum berbasis kompetensi, penilaian, pendidikan dasar luas. , kecakapan hidup, pembelajaran kontekstual, dan UU Sistem Pendidikan Nasional, semuanya menuntut peran aktif dan kinerja profesional kepala sekolah.

Pada bagian selanjutnya E. Mulyasa (2007: 42) menyatakan bahwa secara umum kepala sekolah di Indonesia belum bisa dikatakan sebagai manajer yang profesional. Sebab pengangkatannya bukan berdasarkan kemampuan dan pendidikan profesionalnya, namun lebih pada pengalaman menjadi guru. Hal ini juga dikemukakan dalam laporan Bank Dunia (1999) bahwa salah satu penyebab menurunnya mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya profesionalisme kepala sekolah sebagai pengelola pendidikan di tingkat lapangan.

D. Nilai

Achmad Sanusi (2009: 97-98), menyatakan ada enam jenis nilai, yaitu:

1. Nilai fisis, seperti ukuran, berat, tinggi, bentuk, letak, jarak, kekerasan, panas, energi;
2. Nilai-nilai logis-rasional-ilmiah, seperti kesimpulan dan kesesuaian/keakuratan data tentang unsur-unsur dan fungsinya, kinerjanya, keterkaitannya;
3. Nilai estetika, seperti kebersihan, kesucian, keindahan, keanggunan, kemandirian dan perbandingan antara bagian dan keseluruhan;
4. Nilai-nilai etika, seperti cinta kasih, hormat, sopan santun, kejujuran, keadilan, dalam hubungan antar manusia, antar kelompok, dan lain-lain.
5. Nilai-nilai teologis, seperti ketuhanan, kepercayaan, dan cara beribadah.
6. Nilai teleologis, seperti manfaat dan kegunaan praktis/instrumental, harga.

Danah Zohar & Ian Marshall (2000: 263) menunjukkan bahwa ada Tujuh Langkah Menuju Kecerdasan Spiritual Yang Lebih Besar, yaitu: (1) Sadar akan keberadaan saya saat ini, (2) Merasa kuat bahwa saya ingin berubah, (3) Berpikir tentang apa inti diri saya dan tentang motivasi terdalam saya, (4) Menemukan dan memecahkan hambatan, (5) Menjelajahi banyak kemungkinan untuk kemajuan, (6) Berkomitmen pada diri sendiri pada suatu jalan, dan (7) Tetap sadar bahwa ada banyak cara. Lebih lanjut Danah Zohar & Ian Marshall (2000: 277) mengajukan beberapa pertanyaan pokok terkait peningkatan kecerdasan spiritual, yaitu:

Baris 1: Tugas, pertanyaan utamanya adalah: (1) Kelompok apa yang Anda nikmati dalam hidup Anda? (2) Di antara kelompok berikut (jika ada) manakah Anda yang pernah diasingkan? (3) Apakah ada kelompok yang ingin Anda tempati secara lebih penuh? (4) Apa kode moral Anda sekarang?

Jalur 2: Pertahanan, pertanyaan utamanya adalah: (1) Apakah ada orang yang dengan senang hati Anda berikan lebih dari yang Anda terima saat ini? (2) Apakah ada orang yang Anda lupakan, sakiti, atau dendam? (3) Apakah ada seseorang yang Anda inginkan atau ingin Anda bantu tetapi tidak bisa? (4) Apakah orang lain merasa Anda mudah diajak bicara?

Baris 3: Pengertian, pertanyaan pokoknya adalah: (1) Apakah Anda mempunyai ketertarikan aktif terhadap gaya hidup orang-orang di sekitar Anda? (2) Jika Anda merasa terjebak dalam suatu masalah, biasanya Anda mengesampingkannya, atau mencoba pendekatan lain? (3) Dapatkah Anda melihat beberapa nilai pada kedua sisi argumen? (4) Apakah Anda secara intelektual mencari sesuatu?

Jalur 4: Transformasi Pribadi, pertanyaan utamanya adalah: (1) Seberapa jauh hal ini dalam hubungan, tujuan, seni, panggilan, dan sebagainya? (2) Ingatkah seseorang, mimpi, lamunan, atau kisah yang memenuhi Anda dengan gairah atau hasrat romantis, namun tidak mencapai kesimpulan yang benar-benar membahagiakan? (3) Dapatkah Anda melihat bahwa emosi dan kerinduan Anda terpotong dari kain yang sama dengan kain milik penulis, seniman, atau musisi yang Anda hormati? (4) Apakah ada contoh pemberontak yang Anda kenal atau simpati?

Baris 5: Persaudaraan, pertanyaan utamanya adalah: (1) Dapatkah Anda membayangkan diri Anda bertukar peran dengan hal lain di sana? (2) Apakah ada orang yang membuat Anda merasa tidak nyaman? Mengapa? (3) Apakah keadilan penting bagi Anda? (4) Apakah Anda merasa terganggu atau malu dengan masalah kematian?

Jalur 6: Pelayanan Kepemimpinan, pertanyaan pokoknya adalah: (1) apakah Anda sudah diterima menjadi pemimpin suatu kelompok? (2) Apakah Anda mewarisi pandangan masyarakat atau peran Anda di dalamnya? (3) Dapatkah Anda selalu menemukan, meskipun menghadapi kesulitan, energi batin yang dibutuhkan untuk menghadapi keadaan darurat? (4) Apakah Anda bersedia

untuk membela dan memperhitungkan apa yang paling Anda hargai, meskipun hal itu tidak memiliki peluang untuk diterima oleh orang lain?

Kajian Muhammad Ali, Masdar Hilmy, dan Ahmad Najib Burhan dalam Toto Suharto (2014: 101), menyatakan bahwa untuk mewujudkan hubungan antar bangsa yang adil, damai dan manusiawi diperlukan adanya saling pengertian dan saling membutuhkan, Nahdlatul Ulama bertekad mengembangkan ukhuwwah Islamiyah, ukhuwwah wataniyah, dan ukhuwwah Insaniyah yang mengusung kepentingan nasional dan internasional dengan berpegang teguh pada prinsip al-Ikhlash (ketulusan), al-'Adalah (keadilan), al-Tawassuf (moderat), al-Tawazun (keseimbangan) dan al-Tasamuh. (toleransi), menyebutkan Nahdlatul Ulama menerapkan Islam moderat dan bahkan menjadi bagian dari Islam arus utama Indonesia, sekelas dengan Muhammadiyah.

E. Moral

Untuk mengembangkan kepemimpinan moral, Michele Borba (2001: 8) memperkenalkan tujuh tuntutan moral yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut, yaitu: (1) Empati, mengidentifikasi dan merasakan kekhawatiran orang lain, (2) Hati Nurani, mengetahui hak dan cara yang baik untuk bertindak dan bertindak seperti itu, (3) Pengendalian diri, mengatur pikiran dan tindakan sehingga Anda menekan tekanan apa pun di dalam atau di luar dengan cara yang Anda tahu dan rasakan benar, (4) Hormat, menunjukkan nilai Anda pada orang lain dengan cara memperlakukan mereka dengan sopan dan penuh perhatian, (5) Kebaikan, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain, (6) Toleransi, menghormati martabat dan hak semua orang, peristiwa di mana keyakinan dan perilaku berbeda dengan kita, (7) Adil, memilih berpikiran terbuka dan bertindak adil.

Fungsi budaya secara umum sulit dibedakan dengan fungsi budaya kelompok atau fungsi budaya organisasi karena budaya merupakan fenomena sosial. Namun terlihat beberapa fungsi kebudayaan seperti yang diungkapkan Sofyan Sauri dalam Achmad Sanusi (2009: 65), yaitu sebagai pedoman moral bagi masyarakat, antara lain: (1) Sebagai identitas dan citra suatu masyarakat.

Identitas ini terbentuk oleh berbagai faktor, seperti sejarah, kondisi dan sisi geografi, sistem sosial, politik dan ekonomi, serta perubahan masyarakat, (2) sebagai suatu komunitas yang mengikat. Kebersamaan menjadi faktor pengikat yang kuat bagi seluruh anggota masyarakat, (3) Sebagai sumber, kebudayaan merupakan sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumber daya. Kebudayaan dapat menjadi komoditas perekonomian, misalnya wisata budaya, (4) sebagai penggerak. Jika kebudayaan terbentuk melalui proses belajar mengajar, maka kebudayaan bersifat dinamis, (5) Sebagai kemampuan membentuk nilai tambah, (6) Sebagai pola tingkah laku. Kebudayaan memuat norma-norma perilaku dan menguraikan batas-batas toleransi sosial, (7) sebagai warisan. Kebudayaan disosialisasikan dan diajarkan kepada generasi penerus, (8) sebagai substitusi formalisasi, (9) sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Dilihat dari sudut pandang ini, pembangunan seharusnya merupakan proses kebudayaan, dan (10) sebagai proses yang menjadikan bangsa kongruen dengan negara sehingga terbentuklah negara bangsa.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa memang membuat dunia menjadi terbuka. Namun, hanya mereka yang siap yang bisa memanfaatkan peluang tersebut. Cara mencari dan mengasah manusia unggul Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, Agnes Aristiarini dalam Kompas edisi 19 Mei 2016 menyebutkan lima langkah yang harus dilakukan pemerintah, yaitu: Pertama, perlu sistem seleksi yang ketat namun transparan dan terorganisir dengan baik. sehingga anak-anak yang berbakat dapat diidentifikasi sedini mungkin. Pencarian anak berbakat juga dapat dilakukan dengan memperbanyak lomba sains dan matematika. Mereka yang menang ditampung di balai latihan khusus agar kemampuannya semakin terasah. Kedua, menyiapkan sekolah unggul dengan guru yang berkompeten dan kurikulum yang mengoptimalkan kemampuan anak berbakat. Semua itu untuk mengarahkan mereka menjadi pemimpin di berbagai bidang. Ketiga, pengiriman mahasiswa unggul ke luar negeri. Indonesia bisa mencontoh Kazakhstan yang setiap tahunnya mengirimkan 3.000 calon mahasiswa ke luar negeri. Mereka 10-15 tahun ke depan diharapkan bisa membangun negaranya setelah pulang kampung. Keempat, meningkatkan kesejahteraan guru dan memberikan kesempatan belajar seluas-

luasnya sehingga dapat mendorong anak cerdas memilih profesi guru. Di Taiwan misalnya, menjadi guru sangat populer karena gaji guru yang bekerja sampai jam 15.00 sama dengan gaji insinyur yang bekerja sampai jam 21.00. Kelima, menerjemahkan berbagai buku ilmiah populer, menyebarkannya ke daerah terpencil, dan menjualnya dengan harga yang sangat murah. Sebab, hanya dengan buku bagus mahasiswa unggul bisa mengoptimalkan kemampuannya, siapkah bangsa ini bersaing menuju tahun 2030?

Pada bagian lain, Agnes Aristiarini dalam Kompas edisi 19 Mei 2016 menegaskan, jati diri Indonesia bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Untuk membangun keindonesiaan, diperlukan kerja keras melalui rekayasa politik dan upaya pemupukan secara terus menerus. Pembangunan karakter bangsa dapat dimulai dengan penjabaran ilmu pengetahuan ke dalam pandangan hidup dan nilai-nilai budaya.

Sementara itu, Rikard Basun dalam Kompas edisi 19 Mei 2016 menjelaskan, hanya bangsa dan negara yang mempunyai kemampuan menguasai teknologi tinggi dan canggih yang akan mendapat manfaat. Negara-negara yang tidak mampu melakukan antisipasi akan terus mengalami kemerosotan dan hanya berada di pinggiran panggung dunia yang membawa kemajuan. Arah kemajuan pembangunan setiap bangsa akan sangat bergantung pada kemampuan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan handal. Lalu bisa terjadi, negara yang sudah maju akan maju, atau sebaliknya negara yang tidak maju bisa menjadi maju bahkan terpuruk.

Sedangkan Sri Hartati Samhadi dalam Kompas edisi 19 Mei 2016 menegaskan bahwa Indonesia kini terlihat semakin gamang menghadapi globalisasi. Apalagi di tengah tekanan sentimen nasionalisme di Tanah Air. Di pihak pemerintah sendiri, karena menganggap telah berhasil melakukan liberalisasi ekonomi tahap pertama, pemerintah cenderung menganggap remeh tantangan yang menanti di hadapan kita. Hal ini tercermin dari sikapnya yang menganggap remeh dan cenderung berpikiran pendek. Padahal tantangannya akan semakin berat dan kompleks seiring dengan semakin dalamnya integrasi internasional. Tidak jelas bagaimana perekonomian dan bangsa menghadapi persaingan yang lebih besar yang tidak dapat dibendung.

Di sisi lain, Khairina dalam Kompas edisi 19 Mei 2016 juga menegaskan bahwa untuk mengatasi keterbelakangan sekaligus mencegah bertambahnya pengangguran, Indonesia perlu meningkatkan produktivitas dan mengupgrade produk-produk unggulan. Upgrading bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana dan tidak muluk-muluk, misalnya peningkatan pelayanan, ketepatan waktu dalam pengiriman barang, dan sistem packing yang baik. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan sistem pendidikan agar pekerja dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ditingkatkan. Mau tidak mau, perusahaan harus memberikan pelatihan internal bagi karyawannya. Selama ini terdapat kecenderungan perusahaan enggan melakukan pelatihan internal karena rendahnya turnover. Jika berbagai upaya peningkatan daya saing produk unggulan Indonesia telah dilakukan, maka banyak peluang untuk kembali membesarkan Indonesia agar tidak tertinggal dari negara lain. Pasar lokal dan pasar dunia belum dimanfaatkan secara optimal.

F. Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Nilai Menuju Visi Indonesia 2030

Achmad Sanusi (2009: 97-98) menyatakan ada enam jenis nilai, yaitu nilai fisik, nilai logika-rasional-pengetahuan, nilai estetika, nilai etika, nilai teologis, dan nilai teleologis.

Uraian lebih lanjut pernyataan Achmad Sanusi adalah sebagai berikut:

1. Nilai-nilai fisik seperti berat badan kepala sekolah, tinggi badan kepala sekolah, dan bentuk tubuh kepala sekolah diharapkan sangat mempengaruhi pola kepemimpinan kepala sekolah menuju visi Indonesia 2030.
2. Nilai-nilai yang bersifat logis-rasional-ilmiah, seperti kinerja kepala sekolah dan keterkaitan kepala sekolah dengan kepala sekolah lain yang mendampingi masyarakat sekitar serta kepemimpinan atasannya dalam pemerintahan, sangat diharapkan dapat mempengaruhi perjalanan kepemimpinan kepala sekolah menuju visi Indonesia 2030;
3. Nilai-nilai estetika seperti kebersihan lingkungan sekolah, keindahan alam sekitar sekolah, dan hubungan sosial antar pegawai di lingkungan sekolah diduga kuat mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menuju visi Indonesia 2030;

4. Nilai-nilai etika seperti rasa cinta kepala sekolah terhadap guru dan siswa, sopan santun kepala sekolah terhadap pegawai sekolah dan orang tua, serta kejujuran dan keadilan kepala sekolah dalam mengambil keputusan penting diharapkan sangat mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menuju visi Indonesia 2030.
5. Nilai-nilai teologis seperti keyakinan akan takdir Tuhan dan takdir manusia, serta beragamnya cara beribadah, akan mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menuju visi Indonesia 2030.
6. Nilai-nilai teleologis seperti penerapan praktis program kerja sekolah serta penentuan harga barang dan biaya kegiatan sekolah yang telah dijadwalkan akan mempengaruhi proses kepemimpinan kepala sekolah menuju Visi Indonesia 2030.

Lebih lanjut Danah Zohar & Ian Marshall (2000: 277) mengajukan beberapa pertanyaan pokok yang berkaitan dengan peningkatan kecerdasan spiritual yaitu *Duty*, *Nurturing*, *Understanding*, *Personal Transformation*, *Brotherhood* dan *Servant Leadership*. Lebih lanjut penulis menguraikannya sebagai berikut: Pertama, sehubungan dengan Tugas, pertanyaan utamanya adalah: (1) Kelompok manakah yang Anda nikmati dalam hidup Anda? Biasanya kelompok guru Matematika dan IPA (MIPA) lebih disukai oleh kepala sekolahnya, dengan alasan lebih tanggap dalam melaksanakan tugas, lebih kreatif dalam bekerja, serta lebih efektif dan efisien dalam proses kerjanya; (2) Manakah dari kelompok berikut yang merupakan pesaing Anda? Tidak menutup kemungkinan di antara para guru MIPA yang berpotensi menjadi pesaing kepala sekolah, setidaknya menjadi kader utama dalam kepemimpinan sekolah selanjutnya. (3) Apakah ada kelompok lain yang ingin Anda kembangkan lebih lanjut? Biasanya terdapat kelompok guru statis sebagai calon pelatih dan dapatkah lebih diberdayakan untuk melaksanakan program pendidikan sekolah yang telah disepakati oleh dewan guru dan komite sekolah secara lebih lengkap? (4) Bagaimana sikap kepala sekolah menghadapi kelompok guru yang pro dan kontra terhadap program pendidikan sekolah? Kepala sekolah harus bersikap dengan sikap dua golongan, menghindari konflik horizontal dan mengutamakan tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan.

Kedua, mengenai pemeliharaan, pertanyaan utamanya adalah: (1) Apakah saat ini ada orang lain yang akan Anda berikan kepemimpinan lebih dari yang Anda terima? Biasanya semua kepala sekolah akan memberikan sebagian kewenangan kepemimpinannya kepada guru yang menduduki tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah atau wakil kepala sekolah dalam bidang kurikuler sebagai pengelola tugas sehari-hari apabila kepala sekolah berhalangan sementara (2) Apakah ada guru atau tenaga administrasi? staf yang cenderung menyakiti atau menyimpan dendam terhadap hadiah Anda? Selama proses kepemimpinan berjalan dengan baik, demokratis, dan berkeadilan, tentu tidak ada lagi yang akan membalas dendam terhadap kepemimpinan kepala sekolah; Namun jika pengalaman kepemimpinan dirasa tidak adil, maka akan ada guru yang merupakan anggota pemerintah tertentu yang menaruh dendam terhadap kepemimpinan kepala sekolah; (3) Apakah ada seseorang yang ingin Anda bantu tetapi tidak bisa? Bisa jadi, walaupun jumlahnya sedikit, misalnya penjaga sekolah atau petugas kebersihan sekolah yang ijazahnya rendah, kadang tidak punya ijazah; (4) Apakah ada orang yang merasa mudah berbicara dengan Anda? Biasanya ada, terutama bendahara sekolah atau kepala tata usaha, karena kedua pegawai tersebut lebih sering bertemu dan berkomunikasi langsung dengan kepala sekolah dalam hubungan kerja sekolah.

Ketiga, Pengertian, pertanyaan pokoknya adalah: (1) Apakah Anda mempunyai minat aktif terhadap gaya hidup orang-orang di sekitar Anda? Sebagai kepala sekolah hendaknya dapat menyesuaikan kehidupan dengan ritme kehidupan di lingkungan sekolah, tidak norak dan tidak mengucilkan diri; (2) Jika Anda merasa terjebak dalam suatu masalah, biasanya Anda mencoba pendekatan lain? Nah, ada pepatah “ada banyak jalan menuju Roma, maka apapun permasalahan yang dialami kepala sekolah, ia harus dihadapi dan dicari alternatif pemecahan masalah dengan berbagai pendekatan yang mungkin bisa dikembangkan; (3) Dapatkah Anda melihat beberapa nilai-nilai di kedua sisi argumen Anda? Setiap argumen pasti mengandung nilai baik atau buruk, tergantung pada pentingnya momen dan situasi saat itu, (4) Apakah Anda secara intelektual sedang mencari sesuatu? kepala sekolah yang intelektual, mereka selalu mencari sesuatu yang baru untuk mengembangkan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya.

Keempat, Transformasi Pribadi, pertanyaan utamanya adalah: (1) Sejauh mana hal ini dalam hubungan, sebab, seni, panggilan, dan sebagainya? (2) Ingatkah seseorang, mimpi, lamunan, atau kisah yang memenuhi Anda dengan gairah atau hasrat romantis, namun tidak mencapai kesimpulan yang benar-benar membahagiakan? (3) Dapatkah Anda melihat bahwa emosi dan kerinduan Anda terpotong dari kain yang sama dengan kain milik penulis, seniman, atau musisi yang Anda hormati? (4) Apakah ada contoh pemberontak yang Anda kenal atau simpati?

Kelima, persaudaraan, pertanyaan utamanya adalah: (1) Dapatkah Anda membayangkan diri Anda bertukar peran dengan sesuatu atau yang lain? (2) Apakah ada orang yang membuat Anda merasa tidak nyaman? Mengapa? (3) Apakah keadilan penting bagi Anda? (4) Apakah Anda merasa terganggu atau malu dengan masalah kematian?

Keenam, jasa kepemimpinan, pertanyaan pokoknya adalah: (1) apakah Anda sudah diterima menjadi pemimpin suatu kelompok? (2) Apakah Anda mewarisi pandangan masyarakat atau peran Anda di dalamnya? (3) Dapatkah Anda selalu menemukan, meskipun menghadapi kesulitan, energi batin yang dibutuhkan untuk menghadapi keadaan darurat? (4) Apakah Anda bersedia untuk membela dan memperhitungkan apa yang paling Anda hargai, meskipun hal itu tidak memiliki peluang untuk diterima oleh orang lain?

Nahdlatul Ulama bertekad mengembangkan ukhuwwah Islamiyah, ukhuwwah wataniyah, dan ukhuwwah Insaniyah yang mengusung kepentingan nasional dan internasional. Melalui pengembangan persaudaraan Islam, akan terjalin persaudaraan umat Islam di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia yang beriman dan beriman menjadi beriman dan bertaqwa. Melalui pengembangan ukhuwwah wathaniyah akan terbentuk semangat kebersamaan untuk membangun tanah air Indonesia sebagai tanah air bagi seluruh bangsa yang tinggal di Indonesia. Melalui pengembangan ukhuwwah Insaniyah, seluruh pelajar Indonesia bersedia bergaul dengan bangsa lain di dunia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan apapun.

G. Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Moral Menuju Visi Indonesia 2030

Untuk mengembangkan kepemimpinan moral, Michele Borba (2001: 8) memperkenalkan tujuh tuntutan moral yang baik untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu: (1) Empati, identifikasi dan rasa perhatian orang lain, (2) Hati Nurani, mengetahui cara yang benar dan layak untuk dilakukan. bertindak, (3) Kendalikan diri, atur pikiran dan tindakan sehingga Anda menghentikan tekanan dari dalam atau dari luar dan bertindak sesuai yang Anda tahu dan rasakan benar, (4) Hormat, menunjukkan nilai orang lain dengan memperlakukan mereka dengan baik. sopan santun dan perhatian, (5) Kebaikan, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain, (6) Toleransi, menghargai harkat dan hak semua orang, yang mempunyai keyakinan dan perilaku berbeda dengan diri sendiri, (7) Keadilan, memilih menjadi berpikiran terbuka dan bertindak adil.

Tujuh tuntutan moral yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Empati, mengenali dan merasakan perhatian orang lain,
2. Hati nurani, mengetahui cara bertindak yang baik dan benar,
3. Kendalikan diri Anda, atur pikiran dan tindakan Anda sehingga Anda menghentikan tekanan dari dalam atau luar dan bertindak sesuai yang Anda tahu dan rasakan benar,
4. Hormat, menunjukkan nilai orang lain dengan memperlakukan mereka dengan sopan dan penuh perhatian,
5. Kebaikan, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain,
6. Toleransi, menghormati martabat dan hak semua orang, yang berbeda keyakinan dan perilaku dengan kita,
7. Keadilan, memilih berpikiran terbuka dan bertindak adil.

Beberapa fungsi kebudayaan yang menjadi pedoman moral masyarakat (Sofyan Sauri dalam Achmad Sanusi, 2009: 65), antara lain: (1) Sebagai identitas dan citra suatu masyarakat; (2) Sebagai komunitas yang mengikat; (3) Sebagai sumber inspirasi, kebanggaan dan sumber daya; (4) Sebagai penggerak; (5) Sebagai kemampuan membentuk nilai tambah, (6) Sebagai pola perilaku, (7) Sebagai warisan; (8) Sebagai pengganti formalisasi, (9) Sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan, dan (10) Sebagai proses

yang menjadikan bangsa kongruen dengan negara sehingga terbentuklah negara bangsa.

Uraian lebih lanjut dari pernyataan Sofyan Sauri dan Achmad Sanusi antara lain: (1) Sebagai identitas dan citra suatu masyarakat. Identitas ini terbentuk oleh berbagai faktor, seperti sejarah, kondisi dan situasi geografi, sistem sosial, politik dan ekonomi, serta perubahan masyarakat, (2) sebagai suatu komunitas yang mengikat. Kebersamaan dalam beragama, bermasyarakat dan berbangsa merupakan faktor pengikat yang kuat bagi seluruh anggota masyarakat, (3) Sebagai sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumber daya. Kebudayaan menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan musik dan tari nasional; Bahasa sebagai bagian dari kebudayaan mampu mempersatukan bangsa; Kebudayaan dapat menjadi komoditas perekonomian di kawasan pariwisata seperti wisata budaya, (4) Sebagai penggerak. Apabila kebudayaan terbentuk melalui proses belajar mengajar, maka kebudayaan bersifat dinamis, karena dapat dipelajari dan dilestarikan oleh generasi penerus serta dimodifikasi ke arah yang lebih baik oleh generasi sekarang; (5) Sebagai kemampuan pembentuk nilai tambah, kebudayaan mampu meramaikan sebagian masyarakat yang haus akan kebahagiaan. (6) Sebagai suatu pola tingkah laku, kebudayaan memuat norma-norma tingkah laku yang harus dijadikan pedoman hidup masyarakat sekitar dan menguraikan batas-batas toleransi sosial yang juga harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (7) Sebagai warisan, kebudayaan disosialisasikan kepada generasi muda sejak usia dini hingga pendidikan tinggi dan diajarkan kepada generasi penerus melalui berbagai media modern dan metode terkini; (8) Sebagai pengganti formalisasi, kebudayaan menjadi penunjuk arah pergaulan generasi muda yang harus selalu dijadikan pedoman agar nilai-nilai 'kebhinekatunggal-ikaan' tetap terjaga. (9) Sebagai mekanisme adaptasi terhadap Dengan adanya perubahan, budaya dapat dikolaborasikan dengan budaya asing serta berbagai budaya daerah yang beragam. Dilihat dari sudut pandang ini, pembangunan seharusnya merupakan suatu proses kebudayaan, menuju peradaban yang lebih baik dan mengakar demi kepentingan bangsa dan negara; dan (10) Sebagai proses yang menjadikan bangsa selaras dengan negara sehingga terbentuklah

negara bangsa yang pada gilirannya akan menjaga nilai-nilai budaya dalam konteks kebangsaan Indonesia.

H. Contoh Penerapan Nilai dan Moral

Contoh nilai-nilai yang dikembangkan di masyarakat sekitar sekolah

Kebanyakan orang beranggapan bahwa belajar harus dilakukan oleh semua orang, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Kewajiban belajar telah difasilitasi oleh pihak sekolah melalui pelaksanaan proses pembelajaran yang umumnya berlangsung mulai pukul 07.00 hingga pukul 13.00 pada setiap hari kerja. Jika pihak sekolah lebih tepatnya guru mata pelajaran memberikan tugas-tugas belajar yang harus dikerjakan siswa di rumah masing-masing dalam bentuk “pekerjaan rumah”, maka keseharian orang tua terganggu dengan aktivitas siswa yang masih belajar di rumah karena ada sebuah “pekerjaan rumah” yang diberikan oleh guru mata pelajaran tertentu. Orang tua terpaksa mengerjakan “sebagian besar” pekerjaan keluarga di rumah dengan tenaga ekstra berat, sementara anak tercinta fokus pada tugas sekolah yang harus dikerjakan di rumah.

Terkait dengan kesediaan pimpinan sekolah untuk menerima dana BOS, sebagian besar masyarakat menganggap biaya pendidikan di sekolah tersebut gratis. Hal ini terbukti ketika pihak sekolah membuat surat edaran tentang biaya kegiatan ekstrakurikuler tertentu, sehingga secara spontan para orang tua siswa bertindak “menolak” untuk memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada sekolah yang telah menerima dana BOS. Mereka, masyarakat umum, lupa bahwa BOS adalah singkatan dari Bantuan Operasional Sekolah, artinya dana yang diberikan pemerintah kepada sekolah hanya sekedar “bantuan” sejumlah biaya operasional sekolah. Jika dihitung dalam satuan tahunan, ternyata sebagian besar sekolah mengalami “defisit” finansial jika hanya menggunakan dana BOS pemerintah. Oleh karena itu, pihak sekolah masih berupaya mendapatkan tambahan dana dari berbagai sumber, di antaranya dari orang tua (dalam bentuk sumbangan sukarela), dunia industri (dalam jumlah nominal tertentu), dan dunia usaha (dalam bentuk barang dan jasa). sebagai kegiatan pendukung).

Siswa yang sudah mengikuti ujian akhir dan rajin, pasti akan dinyatakan naik ke kelas yang lebih tinggi, dan siswa yang sudah mengikuti program ujian akhir harus dinyatakan lulus. Orang tua beranggapan bahwa siswa yang rajin bersekolah akan rajin beraktivitas. Sehingga pada pertemuan tersebut orang tua yakin bahwa anaknya harus naik kelas, dan nyatanya anak tersebut dinyatakan naik kelas. Hanya segelintir siswa dengan kasus berat saja yang mengalaminya sehingga tidak bisa lulus. Hal serupa juga terjadi pada siswa yang akan mengikuti ujian akhir berbasis komputer. Dengan kelengkapan tugas, ulangan, dan catatan kehadiran yang cukup baik, maka besar harapan anak-anak kelas III dapat lulus. Bagaimana jika ternyata tidak lulus atau dinyatakan tidak naik kelas, maka orang tua akan bernyanyi dengan lagu-lagu yang pedih dan menyayat jiwa.

Contoh dinamika moral yang berkembang di masyarakat secara umum

Jika siswa masih rajin belajar di rumah, maka orang tua menjadi terganggu aktivitasnya karena anak tidak dapat membantu kepentingan keluarga. Saat seluruh anggota keluarga mengadakan acara bersama, ada seorang anak yang tidak mau menghadiri acara keluarga, dengan alasan sibuk mengerjakan banyak pekerjaan rumah. Fenomena seperti ini tidak perlu terjadi jika saja anak mempunyai agenda belajar yang diketahui oleh orang tuanya, sedangkan agenda keluarga sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu dengan anaknya. Sedemikian rupa maka akan dicari hari, tanggal, jam dan tempat tertentu yang cocok untuk mengadakan acara keluarga.

Jika sekolah memberikan surat edaran tentang pembayaran sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan siswa di sekolah, maka orang tua selalu mempertanyakan penggunaan dana BOS dan enggan memenuhi surat edaran tersebut. Padahal jumlah dana BOS yang diterima tidak cukup untuk memenuhi seluruh pendanaan program pendidikan di sekolah. Misalkan orang tua mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan sekolah dalam satu tahun, mungkin mereka akan mendapat tawaran dari pihak sekolah.

Jika seorang siswa sudah mengikuti ujian akhir, namun oleh wali kelasnya dinyatakan tidak naik ke kelas yang lebih tinggi, maka orang tua akan kecewa dengan kepemimpinan wali kelas tersebut.

Buntut dari kekecewaan tersebut adalah akan dilakukannya kampanye hitam yang memberikan kesan kepada kerabatnya bahwa “tidak perlu” menyekolahkan anak-anak terbaiknya ke sekolah bermasalah tersebut. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka nama baik sekolah kita menjadi buruk di benak masyarakat sekitar.

Jika siswa yang sudah mengikuti ujian akhir sekolah, kemudian dinyatakan tidak lulus, maka orang tua sangat kecewa dengan keputusan pimpinan sekolah. Sebaiknya orang tua menanyakan terlebih dahulu kepada wali kelas tentang keberadaan siswa di kelasnya. Bisa jadi, data wali kelas menunjukkan siswa yang tidak lulus terbukti tidak masuk kelas lebih dari satu bulan. Jika hal ini dilakukan, maka para orang tua pun cenderung bersedia menerima kenyataan bahwa anaknya layak dinyatakan tidak lulus.

I. Kesimpulan

Sebagian besar kepala sekolah belum memahami secara optimal tentang nilai-nilai kehidupan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sekitar sekolah yang dikelolanya, serta tidak menyadari dinamika perkembangan moral masyarakat secara umum, sehingga menyebabkan cita-cita membentuk masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera sebagaimana tertuang dalam Visi Indonesia 2030 menemui hambatan dan gangguan yang cukup serius.

Berdasarkan pembahasan, maka kesimpulan bab ini adalah: Pertama, pola kepemimpinan kepala sekolah selama ini cenderung kurang memperhatikan aspek nilai kehidupan yang berkembang di lingkungan sekolah dan kurang tanggap terhadap dinamika moral yang berkembang di masyarakat sekitar sekolah; Perlakuan terhadap proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di lingkungan sekolah mengalami permasalahan psikologis, budaya, dan sosial yang serius; Selain itu, terdapat jarak sosial budaya antara warga sekolah dengan warga sekolah. Kedua, nilai-nilai kehidupan yang dikembangkan sekolah dibangun berdasarkan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran atau bidang studi yang diajarkan di sekolah; sedangkan dinamika moral yang berkembang di masyarakat sekitar sekolah kurang mendapat simpati dari kepala sekolah dengan dalih sekolah adalah lembaga sosial yang diakui keberadaannya oleh negara. Ketiga, karakteristik dunia pendidikan dalam konteks Visi Indonesia 2030 nampaknya

belum mampu membina dan mengembangkan lebih jauh, terarah, dan produktif nilai-nilai kehidupan yang dikembangkan di lingkungan sekolah; Padahal tuntutan moral yang berkembang di masyarakat sekitar sepertinya belum ditanggapi oleh pimpinan sekolah dan personel sekolah.

Lebih lanjut, sebagai rekomendasi, seluruh kepala sekolah di Indonesia khususnya di Kota dan Kabupaten Serang hendaknya lebih serius dalam memahami nilai-nilai kehidupan yang berkembang di masyarakat sekitar sekolah dan lebih menyadari dinamika perkembangan moral masyarakat di lingkungan sekolah. umum yang berdampak pada keberlangsungan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Jika kedua hal tersebut tidak dilakukan oleh kepala sekolah, maka Visi Indonesia 2030 yang kita cita-citakan akan sangat sulit diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sanusi. (2009). Refleksi Diri 80 Tahun, Bandung: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara.
- Ahmad Sanusi. (2009). Spiral Dinamis, Bandung: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara, hal. 65.
- Ahmad Zainal Hamdi. (2005). "Islam Lokal: Ruang Perumpamaan Universalitas dan Lokalitas", Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat Ulumuna IAIN Mataram, VolumeIX, Edisi 15, Nomor 1, Januari-Juni 2005, hal. 104-123
- Dadi Permadi & Daeng Arifin, (2010). Kepemimpinan Transformasional Pimpinan dan Komite, Bandung: Penerbit PT. Sarana Panca Karya Nusa.
- Danah Zohar & Ian Marshall, (2000). KECERDASAN SPIRITUAL: Kecerdasan Tertinggi, Bloomsbury Publishing, London.
- Daniel Goleman, dkk. (2002). KEPEMIMPINAN BARU: Mengubah Kepemimpinan Seni menjadi Ilmu Hasil, Harvard Business School Press, Amerika Serikat.
- Diane Lapp, Hilary Bender, Stephan Ellenwood, (1975). MENGAJAR DAN BELAJAR; Penerapan Filosofis, Psikologis, Kurikuler, Macmilan Publishing, New York.
- E.Mulyasa, (2007). Menjadi Prinsipal Profesional, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Endang Komara dalam tulisannya tentang "Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi" dalam Jurnal Socio Didaktika, Vol. 2, Nomor 2, Desember 2015 hal. 117-124.
- Hartarto Sastrosenoarto. (2006). INDUSTRIALISASI DAN PENGEMBANGAN SEKTOR DAN JASA PERTANIAN MENUJU VISI INDONESIA 2030, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hendraman, Revolusi Kinerja Utama, Publisher Index, Jakarta, 2015, hal. 83-84.
- John NG, (2008). DIM SUM LEADERSHIP: Tips untuk Eksekutif yang Sibuk, Diterbitkan oleh ARMOR Publishing, Singapura.

KOMPAS, Globalisasi dan Indonesia 2030, Sabtu 20 Mei 2006, halaman 34.

Michele Borba (2001). MEMBANGUN KECERDASAN MORAL: Kebajikan Penting yang Mengajari Anak Melakukan Hal yang Benar, Jossey-Bass Publihing, San Francisco.

Mutiani dalam tulisannya tentang “Reaktualisasi Implementasi Nilai Pancasila Bagi Demokrasi Indonesia” (Jurnal Sosiologi, Volume 2, No. 2 Desember 2015 hlm. 16-183, UIN Jakarta, Indonesia

Nanang Fattah, (2016). Manajemen Strategis Berbasis Nilai, Bandung, Penerbit Remaja Rosdakarya.

Susan Smith Kuczmariski & Thomas D.Kuczmariski, (1995). KEPEMIMPINAN Berbasis Nilai: PEMBANGUNAN KEMBALI, KARYAWAN, KOMITMEN, KINERJA & PRODUKTIVITAS, Englewood Cliffs, New Jersey.

Thomas J.Sergiovanni, (1992). KEPEMIMPINAN MORAL: Mencapai Inti Peningkatan Sekolah, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, California.

Toto Suharto dalam tulisannya tentang “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia” dalam Jurnal Kajian Islam dalam ISLAMICA, Volume 9, Nomor 1, September 2014, hal. 81-109, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia.

BAB 11

IMPLEMENTASI METODE PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DAN KURIKULUM 2013

A. Pendahuluan

Keberhasilan atau kegagalan guru dalam menjalankan proses belajar mengajar banyak ditentukan oleh kecakapannya dalam memilih dan menggunakan metode belajar. Sering dijumpai seorang guru memiliki pengetahuan luas terhadap materi yang akan diajarkan, namun tidak berhasil dalam mengajar. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya penguasaan metode mengajar. Di sinilah, terlihat betapa pentingnya metode mengajar bagi seorang guru (Ahmad Munjid Nasih dan Lilik Nur Kholidah, 2009:31).

Pendidikan di Indonesia mengalami beberapa kali perbaikan kurikulum mulai pada zaman penjajahan belanda, zaman jepang, dan pasca kemerdekaan. Kurikulum yang pernah dikembangkan meliputi: Kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952, Kurikulum periode 1964, Kurikulum periode 1968, Kurikulum periode 1975, Kurikulum periode 1984, Kurikulum periode 1994, Kurikulum periode 2004 (KBK), Kurikulum KTSP dan yang terbaru sekarang adalah Kurikulum 2013.

Seiring dengan perkembangan zaman, kurikulum mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan keadaan yang semakin berkembang, teknologi yang semakin canggih, dan perkembangan sains pada zaman sekarang, maka kurikulum disusun menyesuaikan dengan perkembangan. Kurikulum mengalami perubahan dengan bertahap untuk menyesuaikan dengan keadaan dan perubahan agar menjadi lebih baik.

Beberapa tahun belakangan ini perubahan kurikulum kembali terjadi untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Pihak pemerintah menyebutnya sebagai “*pengembangan kurikulum*” bukan “*perubahan kurikulum*”. Istilah ini bisa jadi untuk menghindari dampak psikologis, dan bukan persoalan substansinya kenapa kurikulum itu terjadi perubahan (Imas Kurinasih & Berlin Sani, 2014: 32).

Upaya penyempurnaan kurikulum demi mewujudkan Sistem Pendidikan Nasional yang kompetitif dan relevan dengan perkembangan zaman terus dilakukan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional kita untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu, menghasilkan produk pendidikan yang kreatif, mandiri, produktif, dan juga memiliki karakter yang kuat.

Pihak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui bahwa penyusunan Kurikulum 2013 sudah dimulai sejak tahun 2010. Wakil Presiden Budiono menegaskan mengenai ide relevansi dan beban pelajaran di sekolah. Akibatnya terjadi beban berlebihan dari peserta didik, tetapi tidak jelas apakah peserta didik mendapatkan sesuatu yang seharusnya dari pendidikannya. Sudah waktunya tegas Budiono memikirkan apa yang seyogyanya diajarkan agar manusia Indonesia mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

(<http://www.kompashariini.blogspot.com/2012/08/kompas-edisi-rabu-29agustus-2012.html?m=1>).

Kurikulum 2013 lebih bersifat tematik integratif yang berarti bahwa ada mata pelajaran yang akan terkait satu sama lain, yakni dengan kata lain mata pelajaran bukan dihilangkan melainkan di gabung. Di tingkat SMP/MTs, jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10 dan jumlah jam pelajaran bertambah dari 32 jam menjadi 38 jam per-minggu.

Pelaksanaan kurikulum terbagi atas dua tingkatan, yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pada pelaksanaan kurikulum sekolah, maka kepala sekolah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Sedangkan pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas, maka yang berperan besar adalah guru (Muwahid Shulham dan Soim, 2013:58).

Dengan disiapkannya Kurikulum 2013 ini menjadi tantangan bagi para guru (tenaga pendidik) untuk dapat menerapkan dan menyesuaikan Kurikulum 2013. Pada Kurikulum 2013, guru tidak lagi dibebani dengan kewajiban membuat silabus. Silabus dan bahan ajar di buat oleh pemerintah, sedangkan guru hanya menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan media pembelajaran. Dengan perubahan yang terjadi guru memaksimalkan dalam penyusunan materi yang berkaitan, penyampaian materi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan berfikir peserta didik agar dapat membangun karakter dan emosionalnya, serta penilaian yang sesuai.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi seperti sekarang ini juga harus diikuti oleh setiap individu. Begitupun dalam dunia pendidikan, guru harus mampu dan siap menghadapi perubahan yang terjadi dilingkungannya terutama dalam hal pendidikan. Dalam persiapan implementasi Kurikulum 2013 masih banyak terjadi kekurangan yang bisa menghambat keberhasilan dari tujuan Kurikulum 2013.

Penerapan Kurikulum 2013 sendiri sudah berlangsung beberapa tahun lalu. Karenanya, kepala sekolah dan guru dari sekolah tertentu ditetapkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Namun demikian, ada berbagai kesulitan yang dihadapi, mulai dari perubahan pola kegiatan belajar mengajar di kelas dari guru mengajar dan murid belajar. Masih banyak kekurangan yang ada dalam perencanaan implementasi kurikulum. Kondisi seperti sekarang ini menunjukkan bahwa pemerintah terlalu tergesa-gesa dan cenderung memaksakan adanya perubahan kurikulum ini.

Sejauh ini masih banyak terjadi pro-kontra di kalangan praktisi pendidikan terkait dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pihak yang mendukung kurikulum baru ini menyatakan, Kurikulum 2013 memadatkan pelajaran sehingga tidak membebani siswa, lebih fokus pada tantangan masa depan bangsa, dan tidak memberatkan guru dalam penyusunan kurikulum pengajaran. Pihak yang kontra menyatakan, Kurikulum 2013 kurang fokus karena menggabungkan beberapa mata pelajaran. Ini terlalu ideal karena tidak mempertimbangkan kemampuan dari setiap masing-masing guru.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulisty. Menurutnya kebijakan pemerintah untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis observatif integratif itu dinilai mengabaikan kesiapan guru. Belum banyak guru yang tahu bagaimana konsep Kurikulum 2013. Pemerintah tidak mempertimbangkan kondisi heterogen guru terutama guru dipedalaman, mereka tidak mudah untuk beradaptasi dengan hal-hal yang baru apalagi dalam waktu yang singkat

(http://www.airlangga-edu.com/?page=artikel_detail&&no=19).

Kurangnya pemahaman dari guru dalam menerapkan Kurikulum 2013 bisa menimbulkan kesalahan yang dilakukan oleh guru sendiri. Masih banyak guru yang beranggapan dalam Kurikulum 2013 ini guru tidak lagi perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas, padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap dijelaskan oleh guru. Banyak juga guru-guru yang belum siap secara mental dengan implementasi Kurikulum 2013 ini, karena kurikulum ini menuntut guru lebih kreatif, dan pada kenyataan sangat sedikit para guru yang seperti itu, sehingga membutuhkan waktu yang panjang agar bisa membuka cakrawala berfikir guru. Selain itu guru tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan Kurikulum 2013, karena pemerintah cenderung melihat guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama.

Belajar dari pengalaman perubahan-perubahan kurikulum yang rutin dilakukan oleh pemerintah, seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan, jangan hanya sekedar mengkaji isi substansi dari sebuah kurikulum. Namun juga harus mengkaji dan mempertimbangkan operasional penerapan kurikulum baru di sekolah-sekolah. Ada beberapa hal yang seharusnya diperhatikan pemerintah dalam menerapkan kebijakan implementasi Kurikulum 2013 ini. *Pertama*, kesiapan guru sebagai elemen terpenting dalam mewujudkan tujuan kurikulum. *Kedua*, kesiapan sekolah mulai dari kondisi sekolah dan infrastruktur yang ada di setiap sekolah. *Ketiga*, kesiapan dokumen seperti buku pelajaran, buku panduan untuk guru, dan dokumen lain sebagai pendukung. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan serta mengkaji kembali tentang kesiapan dari guru, sekolah, dan dokumen yang mendukung proses penerapan Kurikulum 2013, karena belajar dari perubahan-perubahan

kurikulum yang terdahulu masih banyak kekurangandan perubahan Kurikulum 2013 bukan sekedar menjadi agenda tahunan yang justru merugikan.

B. Penerapan Metode Pendidikan Agama Islam terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013

Penerapan metode pendidikan Agama Islam pada umumnya bersifat random, dimana pendidik menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, karena jika hanya menggunakan satu metode guru kesulitan dalam menyampaikan pelajaran dan siswa akan merasa bosan dan akan berdampak pada hasil belajar siswa.

Metode Artikulasi merupakan model pembelajaran yang pesannya berantai berarti apa yang disampaikan guru, murid harus mampu menyampaikannya kepada murid yang lain secara terus menerus, begitu sebaliknya.

Metode Ceramah adalah penyampaian materi secara lisan oleh guru terhadap kelasnya dengan menggunakan alat atau media belajar untuk memperjelas materi yang disampaikannya, serta menurut Uswatun Hasanah, Guru Pendidikan Agama Islam, merangkap sebagai guru ekstra kurikuler memahami bahwa metode ini juga bisa diartikan sebagai penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya sedangkan murid mendengarkan secara teliti dan mencatat materi pokok yang telah disampaikan (Wawancara dengan ibu Uswatun hasanah, guru mata pelajaran ekstra kurikuler 5 September 2015).

Metode penugasan menurut Sudirman N. (1991 - 141), adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar, sedangkan menurut Slameto (1991-115) mengemukakan bahwa metode resitasi adalah cara penyampaian bahan pelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan dalam rentang waktu tertentu dan hasilnya harus di pertanggungjawabkan dihadapan guru. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode resitasi adalah memberikan tugas kepada siswa diluar jam pelajaran dan pada akhirnya dapat di pertanggungjawabkan dihadapan Guru tersebut.

Metode hafalan, berasal dari kata “hafal” yang artinya telah masuk dalam ingatan dan dapat diucapkan diluar kepala (Wawancara dengan ibu Uswatun Hasanah, Guru Bahasa Indonesia, 5 September 2015). Jadi, menghafal berarti berusaha mempelajari sesuatu agar masuk kedalam ingatan supaya hafal sehingga dapat diucapkan diluar kepala.

Metode praktek merupakan metode mengajar dimana siswa melaksanakan kegiatan latihan praktek agar siswa memiliki ketegasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari, dalam praktek ini para siswa diajarkan etika, seperti etika bertanya, etika sesama murid dan lain sebagainya.

C. Kendala yang dialami Guru Pendidikan Agama Islam dalam menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013

Kendala yang banyak dialami oleh guru dalam menerapkan metode Pendidikan Agama Islam di SMA, SMK dan MA adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai terutama untuk menerapkan Kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk terus berusaha agar para siswa dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh tenaga pendidik, dengan demikian para guru harus berusaha agar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bisa tersampaikan secara baik dan maksimal serta diterima oleh siswa.

Pada umumnya pengembangan KTSP yang beragam ini tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dimana Standar Nasional Pendidikan itu sendiri terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana, dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari delapan standar nasional pendidikan tersebut yaitu standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Menurut Suyatma (2008) berbagai kendala dan permasalahan masih saja dihadapi sekolah maupun guru. Kendala yang dialami sekolah tersebut secara umum seperti kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan sekolah. Sebagian besar guru belum bisa diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide kreatif untuk menjabarkan panduan kurikulum itu (KTSP), baik di atas kertas

maupun di depan kelas. Selain disebabkan oleh rendahnya kualifikasi, juga disebabkan pola kurikulum lama yang terlanjur mengekang kreativitas guru. Selanjutnya yaitu mengenai belum maksimalnya sosialisasi dan pelatihan terhadap guru-guru, bahkan masih ada guru-guru yang belum mendapat sosialisasi dan pelatihan tentang kurikulum, sehingga masih banyak para guru dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang belum memahami KTSP, dan masih banyak guru-guru yang berpersepsi sebagai penerima-pasif pengambilan keputusan kurikulum.

Dalam lampiran Permendiknas no. 22 tahun 2006 secara normatif ditemukan bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan di Indonesia memiliki fungsi yang mendasari pembangunan bangsa dan negara terutama dalam hal peningkatan SDM yang berkualitas serta masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri.

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan merupakan kunci sukses tercapainya tujuan nasional. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran mata pelajaran PAI dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti penyusunan program pembelajaran, dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pada penyusunan program pembelajaran, komponen yang pertama yaitu silabus yang dalam penyusunannya terdapat kesulitan mencari materi karena pengembangannya yang terlalu luas.

Kemudian dalam RPP, sangat dipengaruhi adanya sarana penunjang media, sumber buku yang ada di sekolah dan kemampuan guru dalam mengembangkan metode dan media. Sarana dan prasarana untuk pengembangan RPP yang baik kurang mendapat perhatian dari sekolah. Permasalahan selanjutnya yaitu terdapat dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar adalah jumlah jam pelajaran.

Menurut Muslich (2007: 10) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP

terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Terkait dengan penyusunan KTSP, BSNP telah membuat Panduan Penyusunan KTSP. Panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pengembangan KTSP memiliki prinsip seperti yang dimuat dalam SI (Standar Isi) dan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain, (1) berpusat pada potensi, (2) beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, (6) belajar sepanjang hayat, (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang dilaksanakan di masing - masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Terkait dengan penyusunan KTSP, BSNP telah membuat Panduan Penyusunan KTSP. Panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan (Muslich, 2007: 10).

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain, (1) berpusat pada potensi, (2) beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (5) menyeluruh dan berkesinambungan, (6) belajar sepanjang hayat, (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Secara umum tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan

secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk (1) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumberdaya yang tersedia, (2) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama, (3) meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.

Sedangkan Kurikulum 2013 Berdasarkan hasil pantauan kami bahwa di SMA, SMK dan MA yang berada di daerah Cinangka diperoleh beberapa masalah dalam penerapan Kurikulum 2013, baik dari sudut pandang kompetensi guru, kesiapan siswa, sumber belajar, proses pembelajaran dan penilaian, maupun dari sudut pandang materi ajarnya, *Pertama* terdapat beberapa guru yang belum melakukan pelatihan dalam penerapan Kurikulum 2013. Akibatnya pembelajaran dilakukan yang bersangkutan cenderung menggunakan pola lama, yaitu ceramah, tanya jawab, dan latihan. Padahal seharusnya menurut Kurikulum 2013, pembelajaran di kelas sangat dianjurkan menggunakan pendekatan ilmiah (scientific). Menurut hasil wawancara penulis dengan beberapa guru di SMA, MA dan SMK, mereka sudah membaca dan bertanya pada guru-guru yang telah melakukan pelatihan sosialisai Kurikulum 2013, namun beliau mengakui belum memahami sepenuhnya pendekatan yang dimaksudkan dengan pendekatan ilmiah tersebut. Pada awal pertemuan sudah diusahakan menggunakan pendekatan ilmiah yang disarankan Kurikulum 2013, namun siswa terlihat kebingungan dengan pendekatan yang diterapkan, maka tidak ada salahnya jika menggunakan pendekatan lain yang lebih sesuai sehingga siswa dapat memahami apa yang disampaikan. *Kedua* kesiapan siswa belajar, kegiatan menulis dan menghafal masih melekat pada benak mereka selama SMP/Mts. Siswa tidak terbiasa dengan soal-soal yang membutuhkan nalar. Sebagai gambaran ketika siswa di beri soal cerita, rata-rata siswa tidak memahami soal cerita yang membutuhkan penalaran. Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah menghendaki siswa agar terbiasa mengamati, menanya, menalar, mencoba dan membuat kesimpulan dari semua mata pelajaran.

Dengan demikian ada kesenjangan mendasar antara dengan pendekatan ilmiah yang diterapkan pada Kurikulum 2013. Artinya penerapan Kurikulum 2013 membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membuahkan hasil. Mengubah kebiasaan adalah hal yang tidak mudah dan membutuhkan kesabaran dan waktu yang cukup. Dengan demikian kesiapan belajar siswa, dalam hal ini pola pikir dan kebiasaan siswa, perlu dicermati dan difahami terlebih dahulu sebelum menerapkan pendekatan ilmiah yang diamanatkan Kurikulum 2013. *Ketiga*, permasalahan sumber belajar. Sumber belajar pada umumnya dibatasi pada buku pegangan siswa dan guru. Pemerintah telah menyediakan buku untuk pegangan siswa dan buku pegangan guru sebagai bahan Kurikulum 2013. Penyediaan satu-satunya buku pegangan siswa dalam pembelajaran menjadi sorotan serius para ahli, betapa Kurikulum 2013 sangat bagus untuk mengembangkan produktivitas siswa, kreatif, afektif dan inovatif ditunjang dengan disediakannya buku pegangan ini dalam pembelajaran. Artinya bila guru dan siswa benar-benar diwajibkan menggunakan buku pegangan tersebut, maka bagaimana guru dapat menumbuhkan kreativitas siswa pada umumnya. Berbeda halnya bila hal itu tidak wajib, maka guru leluasa berkreasi menggunakan berbagai media ataupun metode pembelajaran. Guru yang kreatif biasanya memotivasi siswanya untuk berkreasi, kreatifitas guru dalam menyampaikan materi sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. *Keempat*, proses pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 65 tahun 2013 tentang standar Proses, proses pembelajaran dalam Kurikulum 2013 sangat menyarankan proses pembelajaran yang menyentuh ketiga ranah kompetensi siswa, yaitu ranah pengetahuan (kognitif), ranah sikap (afektif), dan ranah keterampilan. Ranah kognitif diketahui melalui aktivitas, menerima, menjalankan, menghargai, menghayati dan mencipta. Pendekatan pembelajaran yang seperti itu adalah pendekatan ilmiah, pembelajarn berbasis penelitian dan pembelajaran berbasis masalah. Sesuai dengan uraian di atas bahwa pembelajaran belum sepenuhnya menerapkan proses yang sesuai dengan Kurikulum 2013, dari hasil wawancara bahwa materi yang harus disampaikan terlalu banyak.

Jika menerapkan seluruhnya proses pembelajaran dengan cara ilmiah, maka dikhawatirkan materi tidak tersampaikan sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena siswa dan guru belum siap secara mental dalam menerapkan Kurikulum 2013, walaupun sudah mengikuti pelatihan sosialisasi Kurikulum 2013. *Kelima*, penilaian, penilaian secara tertulis belum dilakukan secara komprehensif sebagaimana yang disarankan dalam penilaian otentik pada Kurikulum 2013. Secara sederhana penilaian otentik sering di sebut dengan *authentic assesement*. *Authentic Assesement* adalah suatu asesemen penilaian yang menuntut peserta didik menunjukkan prestasi dan hasil belajar berupa kemampuan dalam kehidupan nyata dalam bentuk kinerja atau hasil kerja (Supardi, hal. 259). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian menyebutkan penilain pendidikan merupakan proses pengumpulan dan penggalian informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup: penilaian otentik, penilain diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, Ujian Tengan Semeser, Ujian Akhir Semester, ujian tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah. Penilain otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran. Penilain diri merupakan penilain diri yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan secara relatif dan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/kelompok didalam dan diluar kelas, khususnya pada sikap, prilaku dan keterampilan.

NO	KURIKULUM 2013	KTSP
1	SKL (Standar Kompetensi Kelulusan) ditentukan terlebih dahulu setelah itu baru ditentukan SI (Standar Isi)	SI (Standar Isi) ditentukan terlebih dahulu, setelah itu baru ditentukan SKL (Standar Kompetensi Kelulusan)

NO	KURIKULUM 2013	KTSP
2	Kompetensi lulusan meliputi aspek soft skills dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan	Lebih menekankan pada aspek pengetahuan
3	Di jenjang SD digunakan Tematik Terpadu untuk kelas I-VI	Di jenjang SD digunakan Tematik Terpadu untuk kelas I-III
4	Jumlah jam pelajaran perminggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibandingkan KTSP	Jumlah pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibandingkan Kurikulum 2013
5	Proses pembelajaran setiap tema dilakukan dengan pendekatan ilmiah yaitu standar proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta	Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari Eksplorasi, Elaborasi dan Konfirmasi
6	TIK bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran	TIK sebagai mata pelajaran
7	Standar penilaian menggunakan penilaian otentik yaitu mengukur semua kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil	Penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan
8	Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib	Pramuka bukan ekstrakurikuler wajib

NO	KURIKULUM 2013	KTSP
9	Penjurusan mulai kelas X untuk jenjang SMA/MA	Penjurusan mulai kelas XI
10	BK lebih menekankan mengembangkan potensi siswa	BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa

Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ujian tingkat kompetensi yang selanjutnya disebut UTK meliputi sejumlah kompetensi dasar yang merepresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. Sebenarnya penilaian guru sudah komprehensif, hanya saja secara administratif belum ada bukti tertulis adanya penilaian ranah afektif misalnya, karena memang tidak diminta dan lagi pula sangat rumit seperti yang pernah diterapkan pada awal penerapan KTSP. Permasalahan-permasalahan diatas tidak seharusnya muncul bila penerapn Kurikulum2013 dikalakukan dengan pertimbangan dan perencanaan yang matang.

D. Perbedaan dan persamaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013

Perkembangan kurikulum diharapkan dapat menjadi penentu masa depan anak bangsa, oleh karena itu, kurikulum yang baik akan sangat diharapkan dapat dilaksanakan di Indonesia sehingga akan menghasilkan masa depan anak bangsa yang cerah yang berimplikasi pada kemajuan bangsa dan negara.

Kurikulum yang terbaru yaitu Kurikulum 2013 yang mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2013-2014 pada sekolah yang ditunjuk pemerintah maupun sekolah yang siap melaksanakannya. Meskipun masih prematur, namun ada beberapa hal yang dirasakan oleh banyak kalangan terutama yang langsung berhadapan dengan kurikulum itu sendiri.

Dan berikut ini perbedaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum KTSP. Adapun perubahan-perubahan yang ada dalam Kurikulum 2013 dari kurikulum sebelumnya antara lain adalah:

1. Perubahan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Penyempurnaan SKL memperhatikan pengembangan nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dengan fokus pada pencapaian kompetensi. Pada setiap jenjang pendidikan rumusan empat kompetensi inti (penghayatan dan pengamalan agama, sikap keterampilan, dan pengetahuan) menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar pada setiap kelas.

2. Perubahan Standar Isi

Perubahan Standar Isi dari kurikulum sebelumnya yang mengembangkan kompetensi dari mata pelajaran menjadi fokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran melalui pendekatan tematik integratif (Standar Proses).

3. Perubahan Standar Proses

Perubahan pada Standar Proses berarti perubahan strategi pembelajaran. Guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran aktif yang menyenangkan. Peserta didik difasilitasi untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan dan mencipta.

4. Perubahan Standar Evaluasi

Penilaian otentik yang mengukur kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan berdasarkan hasil dan proses. Sebelumnya penilaian hanya mengukur hasil kompetensi.

Beberapa konsekwensi akibat perubahan substansi tersebut adalah:

- a. Penambahan jumlah jam belajar di SD yang sebelumnya 26 jam/minggu menjadi 32 jam/minggu. Dari 10 mata pelajaran dipangkas menjadi 6 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, Agama, Matematika, Sosial Budaya dan Olah Raga. Pelajaran IPA dan IPS ditiadakan dan diintegrasikan ke mata pelajaran lain.
- b. Penambahan jumlah jam belajar di SMP yang sebelumnya 32 jam/minggu menjadi 38 jam/minggu. Kalau belajarnya 5 hari berarti setiap hari anak belajar 8 jam setiap hari.

- c. Penambahan Jumlah jam pelajaran Agama pada SD yang bertambah dari 2 jam/minggu menjadi 4 jam/minggu dan di tingkat SMP dari 2 jam/minggu menjadi 3 jam/minggu.
- d. Jumlah mata pelajaran dikurangi tapi jumlah jam belajar ditambah
- e. Mata pelajaran IPA diintegrasikan dalam Mapel Bahasa Indonesia.

E. Metode Pendidikan Agama Islam yang cocok dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013

Hilda Taba dalam S. Nasution menyatakan bahwa kurikulum adalah “*a plan for learning*” yakni sesuatu yang direncanakan untuk pelajaran anak (S. Nasution,, 2008: 2). Kemudian Caswel dan Campbell dalam Nana Syaodih Sukmadinata menyatakan bahwa kurikulum adalah pengalaman-pengalaman yang disusun untuk siswa di bawah bimbingan guru (Nasution, *Op.Cit.*, hal. 1). Mutu bangsa di kemudian hari bergantung pada pendidikan yang dikecap oleh anak-anak sekarang. Apa yang dicapai di sekolah, ditentukan oleh kurikulum sekolah itu (Nana Syaodih Sukmadinata, 2012: 4). Pengetahuan dan pengamalan siswa terhadap agama Islam di masa datang juga dipengaruhi oleh kurikulum yaitu Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI).

Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum harus mencerminkan kepada falsafah sebagai pandangan hidup suatu bangsa, karena ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan bangsa itu kelak, banyak ditentukan dan tergambarkan dalam kurikulum pendidikan bangsa tersebut. Berkenaan dengan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, ada beberapa ketentuan yang menjadi landasan pembentukan Kurikulum Pendidikan Agama Islam secara luas, yaitu:

1. Asas agama; Seluruh sistem yang ada dalam masyarakat Islam, termasuk sistem pendidikannya harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah, muamalah dan hubungan-hubungan yang berlaku di dalam masyarakat.

2. Asas falsafah; Dasar filosofis memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islam, sehingga susunan Kurikulum Pendidikan Agama Islam mengandung kebenaran, terutama dari sisi nilai-nilai sebagai pandangan hidup.
3. Asas psikologi; Kurikulum Pendidikan Agama Islam disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui peserta didik.
4. Asas sosial; Pembentukan Kurikulum Pendidikan Agama Islam harus mengacu ke arah realisasi individu dalam masyarakatnya.
5. Asas tujuan; Pada tujuan Pendidikan Agama Islam baik SD, SMP, maupun SMA, secara redaksional sama, yaitu bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan ahlak mulia dengan melalui pemberian pengetahuan dan pengalaman, sehingga setelah proses pendidikan berakhir, peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berbangsa dan bernegara (Abdul Rachman Shaleh, 2006: 90).

Dalam realitas sejarahnya, pengembangan Kurikulum PAI tersebut ternyata mengalami perubahan-perubahan paradigma, walaupun dalam beberapa hal tertentu paradigma sebelumnya masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Hal ini dapat dicermati dari fenomena berikut:

1. Perubahan dari tekanan pada hapalan dan daya ingat tentang teks-teks dari ajaran agama Islam, serta disiplin mental spiritual sebagaimana pengaruh dari Timur Tengah, kepada pemahaman tujuan, makna dan motivasi beragama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran PAI;
2. Perubahan dari cara berpikir tekstual, normatif, dan absolutis kepada cara berpikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama Islam;
3. Perubahan dari tekanan pada produk atau hasil pemikiran keagamaan Islam dari para pendahulunya kepada proses atau metodologi sehingga menghasilkan produk tersebut.
4. Perubahan pada pola pengembangan Kurikulum PAI yang hanya mengandalkan pada para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum PAI ke arah keterlibatan yang luas dari para pakar,

guru, peserta didik, masyarakat untuk *mengidentifikasi tujuan PAI dan cara-cara mencapainya* (Muhaimin, 2007:10-11).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kurikulum PAI dipengaruhi oleh kurikulum yang diberlakukan secara nasional. Pada era reformasi ini ada dua versi Kurikulum Berbasis Kompetensi yang diberlakukan secara nasional di Indonesia setelah lahirnya UU Sisdiknas no 20 tahun 2003, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 dan KBK tahun 2006 yang selanjutnya lebih dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

F. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, kurikulum merupakan sebuah program yang direncanakan secara sistematis, yakni perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran. Oleh sebab itu, dalam penerapannya kurikulum memiliki komponen yang saling berkaitan antara komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kedua, Kurikulum 2013 dianggap penting dan perlu untuk menggantikan kurikulum lama yaitu KTSP. Substansi perubahan kurikulum 2013 adalah perubahan pada: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi (kompetensi inti dan kompetensi dasar), Standar Proses, dan Standar Penilaian. *Ketiga*, Komparasi KTSP dan kurikulum 2013 yaitu terdapat pada prinsip dan karakter dari masing-masing kurikulum tersebut diantaranya yaitu perbedaan pada jumlah mata pelajaran yang ada di sekolah dan perubahan dalam proses pembentukan perangkat pembelajaran yang berkarakter dan ini berawal dari konsep dasar yaitu tematik – integratik. *Keempat*.1) Pembelajaran di lakukan di dalam kelas. 2) Metode ceramah masih mendominasi jalannya pembelajaran meskipun tidak semua guru, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. 3) Tanya jawab yang di terapkan sudah nampak atau sudah mendapat respon dari siswa. 4) Diskusi sudah berjalan dengan baik, karena terdapat banyak siswa yang aktif dan berani menyampaikan pendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman Shaleh. (2006), *Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Ahmad Munjid Nasih dan Lilik Nur Kholidah. (2009). *Metode dan teknik pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung, PT Refika Aditama.
- <http://www.kompashariini.blogspot.com/2012/08/kompas-edisi-rabu-29agustus-2012.html?m=1>. Akses 15 Mei 2014
- http://www.airlangga-edu.com/?page=artikel_detail&&no=19. Akses 05 Juni 2014
- Imas Kurinasih & Berlin Sani. *Implementasi Kurikulum 2013 (konsep dan penerapan)*. (Surabaya: Kata Pena, 2014), hal. 32
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Hal. 192
- Muhaimin. (2007). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada)*.
- Muwahid Shulham dan Soim. (2013), *Manajemen Pendidikan Islam*. (Yogyakarta : teras).
- Nusa Putra dan Santi Lisnawati, (2012). *Penelitian Kualitatif PAI* (Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2012). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*,(Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Supardi, *Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Aгаа Islam*, Haja Mandiri, hal. 259
- S. Nasution. (2008). *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta : Bumi Aksara)
- Wawancara dengan Ibu Rohanah Selaku Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Cinangka, tanggal 5 september 2015 10.00 WIB
- Wawancara dengan ibu Uswatun hasanah Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Cinangka dan guru mata pelajaran ekstra kurikuler tanggal 5 september 2015 13.00 WIB
- Wawancara dengan Ibu Tiroh, S. Pd. Selaku Guru Bahasa Inggris di SMKN 1 Cinangka, tanggal 12 september 2015 11.00 WIB

Wawancara dengan Lana Atmimnur, sebagai Wakasek dan Pembina
Ekstra kurikuler tanggal 12 september 2015 11.00 WIB

Wawancara dengan bapak Uut Sutisna, selaku Kepala Madrasah Aliyah
Mathla'ul Anwar Keph, Cinangka tanggal 3 Oktober 2015

BAB

12

PERAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM PENINGKATAN MUTU SEKOLAH

A. Pendahuluan

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan di era global ini. Sumber daya manusia tersebut harus memiliki kompetensi tertentu agar bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada di lapangan. Kompetensi yang dimiliki bisa dibidang komunikasi, teknologi, pertanian dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia di atas, pemerintah mulai membuka sekolah menengah kejuruan (SMK) di berbagai bidang. Kearah depan ternyata SMK tumbuh dengan pesat, karena banyak kesempatan menanti di dunia kerja.

Banyak kalangan menilai bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, apalagi jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di Negara lain. Hasil survey United Nation Development Program atau UNDP) yang dilakukan pada tahun 2005 tentang mutu pendidikan di kawasan Asia, menempatkan Indonesia di rangking 10 dari 14 negara (Irfan Jaya, <http://vancebatosai.blogspot.com>),.

Rendahnya sumber daya manusia Indonesia berdasarkan hasil survey United Nation Development Program atau (UNDP) akibat rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, karena itu salah satu kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasional ialah peningkatan mutu dan relevansi pendidikan (Abdul Hadis dan Nurhayat, 2012: 2),. Selain itu, perluasan dan pemerataan pendidikan serta akuntabilitas juga menjadi kebijakan pembangunan pendidikan nasional (UUSPN No 20 Tahun 2003).

Di era globalisasi saat ini, Indonesia harus mampu meningkatkan mutu pendidikan, sehingga tidak kalah bersaing dengan negara lain. Negara kita harus mencetak orang-orang yang berjiwa mandiri dan mampu berkompetisi di tingkat dunia. Saat ini, Indonesia membutuhkan orang-orang yang dapat berpikir secara efektif, efisien dan juga produktif. Hal tersebut dapat diwujudkan jika kita mempunyai tenaga pendidik yang handal dan mampu mencetak generasi bangsa yang pintar dan bermoral.

Banyak permasalahan kebijakan pendidikan menjadi diskusi, khususnya kebijakan mengenai guru Pendidikan Agama Islam. Topik kualitas guru Pendidikan Agama Islam selalu menjadi pembahasan. Karena negara menganggap bahwa guru Pendidikan Agama Islam memiliki peran penting di tengah-tengah permasalahan krisis moral tersebut. Guru Pendidikan Agama Islam menjadi barisan terdepan dalam membenahi moral bangsa.

Salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah karena lemahnya para guru dalam menggali potensi anak didik. Para pendidik seringkali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki siswanya. Kelemahan para pendidik kita, mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi para siswa. Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan siswa bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dalam menuntut ilmu. Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada anak didik untuk kreatif. Itu harus dilakukan sebab pada dasarnya gaya berfikir anak tidak bisa diarahkan.

Selain kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswa, kurikulum yang sentralistik membuat potret pendidikan semakin buram. Kurikulum hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Lebih parah lagi, pendidikan tidak mampu menghasilkan lulusan yang kreatif. Jadi para lulusan hanya pintar mencari kerja dan tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, padahal lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas. Kualitas Indonesia sangat memprihatinkan, berdasarkan analisa dari badan dunia (UNESCO), kualitas guru Indonesia menempati peringkat terakhir dari 14 negara berkembang di Asia pasifik (*Wawan Jakwan, <http://www.fisika79.wordpress.com>,*).

Dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informatika dan komunikasi dalam pendidikan, pendekatan pendidikan yang tepat, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang profesional, metode evaluasi pendidikan yang tepat, serta sumber daya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, berpengalaman, dan professional (Abdul Hadis dan Nurhayati, Op-cit hal 3).

Dan faktor yang tidak kalah penting yaitu adanya standar nasional pendidikan yang menjadi norma acuan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencakup standar : isi, proses, kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasana, standar pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan (<http://www.scribd.com/doc/183861226/Peraturan-Pemerintah-Nomor-19-Tahun-2005>).

Dalam perspektif mikro atau tinjauan secara sempit dan khusus, faktor dominan yang berpengaruh dan berkontribusi besar terhadap mutu pendidikan ialah guru yang profesional dan guru yang sejahtera. Oleh karena itu, guru sebagai suatu profesi harus profesional dalam melaksanakan berbagai tugas pendidikan dan pengajaran, pembimbingan dan pelatihan yang diamanahkan kepadanya (Abdul Hadis dan Nurhayati, Loc.cit hal 4).

Menurut Husaini Usman, ada tiga faktor yang menjadi penyebab rendahnya mutu pendidikan di negara kita, yaitu faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education production atau input-input analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Faktor kedua, yaitu penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, sedangkan faktor ketiga, yaitu peran serta masyarakat, khususnya orangtua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim (Usman Husaini, 2014: 112).

Guru yang bermutu adalah mereka yang mampu membelajarkan murid secara efektif sesuai dengan kendala, sumber daya dan lingkungannya. Di lain pihak, upaya menghasilkan

guru yang bermutu juga merupakan tugas yang tidak mudah. Mutu guru juga berarti tenaga pengajar yang mampu melahirkan lulusan yang bermutu, sesuai dengan dengan kebutuhan penyelenggaraan berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Di lain pihak, mutu guru sangat berkaitan dengan pengakuan masyarakat akan status guru sebagai jabatan profesional (Abin Syamsuddin Makmun, 2012: 15).

B. Karakteristik Guru PAI

Karakteristik guru adalah segala tindak tanduk atau sikap dan perbuatan guru baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Misalnya, sikap guru dalam meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengetahuan, memberi arahan, bimbingan dan motivasi kepada peserta didik, cara berpakaian, berbicara, dan berhubungan baik dengan peserta didik, teman sejawat, serta anggota masyarakat lainnya (Yunus Abu bakar dan Syarifan Nurjan, 2009: 7).

Dengan meningkatkan karakter guru profesional yang dimiliki oleh setiap guru, maka kualitas mutu pendidikan akan semakin baik.

Seorang ahli Pendidik Islam, An-Nahlawi (Arifuddin Arif, 2008: 64.) membagi karakteristik guru profesional muslim dalam beberapa bentuk berikut ini:

1. Mempunyai watak dan sifat rabbaniyah yang terwujud dalam tujuan, tingkah laku dan pola pikirnya.
2. Bersifat ikhlas, melaksanakan tugasnya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan menegakkan kebenaran.
3. Bersifat sabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada siswa
4. Jujur dalam menyampaikan apa yang diketahuinya.
5. Senantiasa membekali diri dengan ilmu.
6. Mampu menggunakan metode mengajar secara bervariasi.
7. Mampu mengelola kelas dan peserta didik, tegas dalam bertindak dan profesional.
8. Mengetahui kehidupan psikis peserta didik.
9. Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi jiwa, keyakinan atau pola berfikir peserta didik.
10. Berlaku adil terhadap peserta didiknya.

Sementara Al-Abrasy (Arifuddin Arif, 2008: 66) memberikan batasan tentang karakteristik guru profesional adalah :

1. Seorang pendidik hendaknya memiliki sifat zuhud, yaitu melaksanakan tugasnya bukan semata-mata karena materi, tetapi lebih dari itu karena mencari keridhaan Allah Swt.
2. Seorang pendidik hendaknya bersih fisiknya dari segala macam kotoran dan bersih jiwanya dari segala macam sifat tercela.
3. Seorang pendidik hendaknya ikhlas dan tidak riya' dalam melaksanakan tugasnya.
4. Bersikap pemaaf terutama terhadap peserta didiknya, sabar dan sanggup menahan amarah, senantiasa membuka diri dan menjaga kehormatannya.
5. Mampu mencintai peserta didiknya sepertianaknya sendiri.
6. Mengetahui karakter peserta didiknya, seperti : pembawaan, kebiasaan, perasaan, dan berbagai potensi yang dimilikinya.
7. Menguasai pelajaran yang diajarkannya dengan baik dan profesional.

Menurut Imam al-Ghazali (Abidin Ibnu, 1998: 42) salah satu ulama yang terkenal di dunia islam, karakteristik guru profesional adalah sebagai berikut :

1. Guru ialah orang tua kedua didepan murid
2. Guru sebagai pewaris ilmu Nabi
3. Guru sebagai penunjuk jalan dan pembimbing keagamaan murid
4. Guru sebagai sentral figur bagi murid
5. Guru sebagai motivator bagi murid
6. Guru sebagai seorang yang memahami tingkat perkembangan intelektual murid
7. Guru sebagai teladan bagi murid.

Dalam dunia pendidikan, keberadaan peran dan fungsi guru merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, baik dijalur pendidikan formal maupun informal. Oleh sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan ditengah air, tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu sendiri.

Guru dalam Islam adalah orang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didiknya dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektif, potensi kognitif maupun potensi psikomotorik. Guru juga berarti orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan serta mampu berdiri sendiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dan dia mampu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang mandiri (Muhammad Nurdin,, 2004:156).

Tugas mengajar dan mendidik diumpamakan dengan sumber-sumber air yang berpadu menjadi satu berupa sungai yang mengalir sepanjang masa. Guru merupakan sumber pengetahuan bagi murid-muridnya, namun pada umumnya orang tidak memandang guru sebagai orang yang mempunyai intelegensi tinggi. Hal ini terjadi pula pandangan bahwa guru Pendidikan Agama Islam madrasah kurang dapat mengelola proses pendidikan khususnya dalam hal proses belajar. Seharusnya pandangan seperti itu tidak tumbuh dalam masyarakat. Karena seluruh pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, semata-mata ditentukan oleh faktor lingkungan dan pendidikan yang diterimanya. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam sangat perlu.

Berdasarkan keikhlasan dan kasih sayangnya, guru selanjutnya berperan sebagai penunjuk jalan bagi peserta didiknya dalam mempelajari dan mengkaji pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Hendaknya seorang guru tidak segan-segan memberikan pengarahan kepada peserta didiknya agar mempelajari ilmu secara runtut, setahap demi setahap. Hal ini mengingat bahwa manusia tidak mampu merangkum ilmu pengetahuan secara serempak dalam satu masa perkembangannya.

C. Mutu Sekolah

Menurut Juran, mutu adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk didasari atas lima ciri yaitu teknologi (kekuatan), psikologis (citra atau status), waktu (kehandalan), kontraktual (jaminan) dan etika (sopan santun) (Abdul Hadis, 2012: 84).

Dalam kelembagaan sekolah, pengguna produk merupakan dunia industri, dimana siswa sebagai produk harus bisa menjadi tenaga ahli yang dibutuhkan dunia kerja. Pengguna produk atau perusahaan membutuhkan pekerja yang mengerti teknologi, pekerja yang handal, bisa kerja sesuai target, dapat diandalkan dan memiliki etika kerja.

Menurut Crosby, mutu adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau criteria mutu yang telah ditentukan. Standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi (Ibid, hal 85).

Mutu dari sisi produsen dapat diartikan sebagai yang diungkapkan Suyadi adalah, mutu suatu produk adalah keadaan fisik, fungsi, dan sifat suatu produk bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan sesuai nilai uang yang telah dikeluarkan.

Sekolah yang bermutu dinilai dari keadaan fisik bangunannya, suasana proses pembelajarannya dan output keluaran peserta didiknya. Apakah output sesuai dengan selera dunia industry, memiliki keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan pencari kerja.

W. Edwards Deming menyatakan bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Dalam arti ini, mutu adalah apa saja yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kalau dilihat dari definisi di atas, keinginan konsumen yang selalu berubah-ubah akan memengaruhi mutu suatu produk sesuai dengan yang dikehendaki konsumen (Ibid,hal. 85).

Menurut Peneliti, pendapat Deming dengan Suyadi hampir sama, bahwa mutu itu harus sesuai dengan pangsa pasar. Jadi dapat disimpulkan mutu di sini bukanlah hal yang tetap, melainkan hal yang selalu berubah-ubah mengikuti keinginan pelanggan.

Menurut Edwar Sallis, mutu dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Dalam artian absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar, merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Sesuatu yang bermutu bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat diungguli. Adapun mutu itu relatif dipandang sebagai sesuatu yang melekat pada sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Oleh karena itu, produk ataulayanandianggap

bermutu bukannya karena ia mahal dan eksklusif, tetapi karena memiliki nilai, misalnya keaslian produk, wajar, dan familiar (Umiarso dan Imam Gojali, 2011: 121).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam terhadap mutu sekolah di lokasi penelitian yaitu SMK Bhakti Anindya, SMKN 8 dan SMK Tiara Aksara Kota Tangerang

DAFTAR PUSTKA

- Al-Abrasyi, M.Athiyah. *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam*, (Bandung : Pustaka setia, 2003)
- Arif, Arifudin. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Kultura GP Press, 2008. Bakar, Yunus Abu & Nurjan, Syarifan. *Profesi Keguruan*, Surabaya: AprintA, 2009.
- Hadis, Abdul & Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2012)
- <http://www.fisika79.wordpress.com>, diakses 16 Januari 2014.
- [http://www.scribd.com/doc/183861226/Peraturan-Pemerintah-Nomor-19- Tahun-2005-tentang-Standar-Nasional-Pendidikan-Lengkap](http://www.scribd.com/doc/183861226/Peraturan-Pemerintah-Nomor-19-Tahun-2005-tentang-Standar-Nasional-Pendidikan-Lengkap) diakses 13 November 2013.
- Husaini, Usman. *Manajemen: Teori, Praktik & Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Ibnu, Abidin. *Pemikiran Al-Ghazli tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Jakwan, Wawan. "*Pendidikan dan Pengajaran*",
- Jaya, Irfan. "*Permasalahan Pendidikan di Indonesia*", <http://vancebatosai.blogspot.com>, diakses 24 Oktober 2011.
- Makmun, Syamsuddin Abin. *Psikologi Kependidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nurdin, Muhammad. *Kiat Menjadi Guru Profesional*, Yogyakarta: Priskasophie, 2004.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta : BP Panca Usaha, 2003)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syah, Darwyan & Supardi. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Umiarso & Gojali, Imam. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2011.

BAB 13

DAMPAK PROFESIONALISME GURU DAN KREATIVITAS BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR

A. Pendahuluan

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utamanya. Guru sebagai pengajar atau pendidik, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan dari upaya pendidikan selalu bermuara pada faktor guru.

Peran guru di sekolah memiliki peran ganda, di pundak merekalah terletak mutu pendidikan. guru juga seorang manajerial yang akan mengelola proses pembelajaran, merencana pembelajaran, mendesain pembelajaran, melaksanakan aktifitas pembelajaran bersama siswa dan melakukan pengontrolan atau kacakapan prestasi siswa-siswa (Martinis Yamin, 2009:55).

Guru merupakan suatu komponen yang paling utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar melatih, meneliti mengembangkan, mengelola dan memberikan petunjuk dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, guru harus menguasai ilmu pengetahuan yang akan dia ajarkan kepada anak didik juga harus mengetahui metode-metode apa yang harus dipraktikan dalam pengajarannya.

Tujuan siswa dilatih menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Lebih lanjut sebagaimana dikatakan oleh Nana Sudjana, mengatakan bahwa salah satunya adalah untuk meningkatkan motivasi dan menumbuhkan sifat kreatif.

Dalam menyelesaikan masalah, setiap siswa memerlukan waktu yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh motivasi untuk menyelesaikan masalah dan strategi yang digunakan dalam memecahkan masalah yang berbeda (Nana Sudjana, 2001:72).

Sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional, telah dilakukan pengkajian ulang terhadap kurikulum. Sehingga terjadi penyempurnaan kurikulum dari waktu ke waktu. Salah satunya dengan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), yang proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung untuk mengembangkan kompetensi dalam berbagai mata pelajaran, termasuk didalamnya Pendidikan Agama Islam (PAI).

Salah satu dari materi ajar Pendidikan Agama Islam (PAI) yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa kelas IX SMP adalah kemampuan menggunakan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Tuntutan kurikulum ini harus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), sehingga perlu diterapkan dengan inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa, dan tidak membosankan, sehingga pembelajaran yang berlangsung lebih menyenangkan. Rendahnya kreativitas siswa dalam proses pembelajaran dapat mengakibatkan proses belajar menjadi kurang optimal, sehingga materi yang diajarkan atau disajikan menjadi tidak tuntas dan hasil belajar akan menurun.

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil ulangan harian tengah semester, hasil belajar Pendidikan Agama Islam di kelas IX SMPN 2 Mancak Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, kurang memuaskan. Tujuh puluh lima persen (75%) nilai ulangan harian tentang sifat komutatif, asosiatif, dan distributif mereka masih kurang dari 6.

Atas dasar data tersebut, seorang guru harus mampu menumbuhkan mental siswa dalam belajar. Menurut ahli psikologi bahwa kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar disebut sebagai motivasi belajar, sehingga seorang guru harus mampu menunjukkan kebutuhan dasar (tujuan) dari belajar yang pada akhirnya dapat menumbuhkan atau mendorong siswa dalam mencapai keinginan atau tujuan dan cita-cita tersebut, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan.

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut : Pertama, apakah ada Pengaruh Profesionalisme Guru terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Mancak Kabupaten Serang; Kedua, apakah ada Pengaruh Kreativitas Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Mancak; Ketiga, apakah ada pengaruh profesionalisme guru dan kreativitas belajar siswa terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam di SMPN 2 Mancak Kabupaten Serang ?

2. Kegunaan Penelitian

Seorang peneliti ketika melakukan penelitian, baik berupa penelitian besar atau kecil pasti mempunyai harapan agar penelitian yang dilakukannya bermanfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : Secara Teori, Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, sebelum menentukan kebijakan, khususnya kebijakan yang berkenaan dengan perekrutan guru. Secara Praktis, memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang pendidikan, khususnya dalam masalah peningkatan hasil belajar siswa, serta sebagai bahan masukan bagi para orang tua agar lebih memperhatikan dan mampu memotivasi anaknya dalam belajar.

B. Kerangka Teori

1. Profesionalisme Guru

M. Surya dkk, mengartikan bahwa professional mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya (M. Surya, 2003: 45.). Sedangkan Syafrudin Nurdin mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah professional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (Syafrudin Nurdin, 2002:15).

Dari semua pendapat para ahli diatas, menunjukkan bahwa profesional dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan atau dididik untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan mereka mendapat imbalan atau hasil berupa upah atau uang karena melaksanakan pekerjaan tersebut.

Kemudian kata profesi mendapat akhiran *isme*, yang dalam bahasa Indonesia menjadi berarti sifat. Sehingga istilah Profesionalisme berarti sifat yang harus dimiliki oleh setiap profesional dalam menjalankan pekerjaannya sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksana atau dijalankan dengan sebaik- baiknya, penuh tanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya dengan dilandasi pendidikan dan ketrampilan yang dimilikinya. Sedangkan pengertian profesional itu sendiri berarti orang yang melakukan pekerjaan yang sudah dikuasai atau yang telah dibandingkan baik secara konsepsional, secara teknik atau latihan (A.M. Sadirman, 2001:131).

Profesioanalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar (Tim Penyusun Kamus, 2002:377).

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Dalam pandangan masyarakat, guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat- tempat tertentu, tidak harus di lembaga formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau di mushalla, di rumah dan sebagainya (Syaiful Bahri Djamarah, 2000:31). Sedang dalam Islam, guru adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Orang yang paling bertanggung jawab tersebut adalah orang tua peserta didik (Ahmad Tafsir, *Op. Cit.* hlm 74.).

Menurut Al-Ghazali dalam bukunya Zainuddin, dkk. menyatakan bahwa guru secara umum dapat diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran (Zainuddin, 2001: 50). Sedangkan yang dimaksud guru dalam hal ini adalah sebagai seorang pendidik dan merupakan sosok manusia yang menjadi panutan bagi anak didiknya dan juga merupakan sebagai penentu arah bagi kemajuan suatu bangsa.

Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa guru adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengajar atau orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.

Menurut Amien Daiem Indrakusuma menyatakan bahwa guru adalah pihak atau subyek yang melakukan pekerjaan mendidik (Amien Daiem Indrakusuma, 2003:179). Sedangkan M. Athiyah Al Abrasyi menyatakan bahwa guru adalah spiritual father atau bapak rohani bagi seorang murid, memberi santapan jiwa, pendidikan akhlak dan membenarkannya, meghormati guru itulah mereka hidup dan berkembang (M. Athiyah Al- Abrasyi, 2001:136).

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan di atas, maka secara umum dapat diartikan bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi afektif, potensi kognitif, maupun potensi psikomotor. Dari pengertian atau definisi “profesionalisme” dan “guru” di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa profesionalisme guru mempunyai pengertian suatu sifat yang harus ada pada seorang guru dalam menjalankan pekerjaannya sehingga guru tersebut dapat menjalankan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab serta mampu untuk mengembangkan keahliannya tanpa mengganggu tugas pokok guru tersebut.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kemampuan profesionalisme seorang guru pada hakikatnya adalah bermuara pada keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang anak sebagai peserta didik, objek belajar dan situasi kondusif berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Atas dasar pengertian yang demikian dikatakan bahwa pekerjaan seorang guru dalam arti seharusnya adalah pekerjaan profesionalisme yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan mereka yang tidak dapat mengerjakan pekerjaan lain.

2. Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum yang dapat menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif, yaitu

suasana belajar menyenangkan, menarik memberi rasa aman, memberikan ruang pada siswa untuk berpikir aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya.

Mengomentari mengenai rendahnya kualitas pendidikan saat ini, merupakan indikasi perlunya keberadaan guru profesional. Untuk itu, guru diharapkan tidak hanya sebatas menjalankan profesinya, tetapi guru harus memiliki interest yang kuat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kaidah-kaidah profesionalisme guru yang dipersyaratkan.

Seorang guru dapat dikatakan sebagai guru yang profesional jika mereka mampu menghasilkan anak didik yang beda dari lainnya. Maksudnya seorang guru yang profesional harus bisa menjadikan anak didiknya memiliki pengetahuan yang luas serta mampu menguasai pelajaran yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Seorang guru yang profesional dituntut untuk mampu membuat suatu terobosan baru tentang sistem pembelajaran. Tentang bagaimana cara membuat suatu metodologi pembelajaran yang efektif untuk diterapkan kepada anak didiknya. Metodologi pembelajaran yang unik dan menarik akan sangat membantu anak didik dalam memahami pelajaran yang diberikan.

Profesionalisme guru dalam mengajar juga akan terwujud jika seorang guru memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Dalam pelaksanaannya, antara kecerdasan yang satu dan lainnya harus seimbang. Misalnya, seorang guru yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi, namun tidak diimbangi dengan kecerdasan moral yang tinggi pula, maka akan berpegaruh pada anak didiknya. Anak didik hanya akan mementingkan keberhasilan daripada proses, atau mereka hanya mencari nilai yang bagus tanpa menghiraukan cara yang digunakan halal atau haram.

Profesionalisme yang tinggi hanya dimiliki oleh guru yang memiliki wawasan yang luas. Seorang guru harus menguasai materi secara mendalam. Sehingga mampu mengeksplorasikan materi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh murid. Guru yang berwawasan luas, selalu mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Selain itu,

juga mampu memanfaatkan teknologi dan informasi untuk menunjang pembelajarannya.

Profesionalisme guru dalam mengajar juga tercermin dari cara penyampaian materi pelajaran. Seorang guru harus berkonsentrasi pada materi yang dibahas, sehingga hasilnya bisa maksimal. Disamping itu, dengan profesionalisme yang tinggi dalam mengajar, akan memberi motivasi bagi siswa untuk lebih mengembangkan bakat dan kemampuannya. Sehingga, profesionalisme yang tinggi sangat penting dimiliki bagi seorang guru.

Guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru profesional, mereka harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru yang profesional (Martinis Yamin, 2009:19). Tentang pentingnya profesionalisme ini disebutkan dalam firman Allah dalam Surat Al-Isra' ayat 84 yang berbunyi :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar (profesional) jalannya. (QS. Al-Isra': 84) (Departemen Agama, 2004:289).

Guru yang profesional memiliki kemampuan profesional, personal, dan sosial. Hal ini jelas dikemukakan oleh Cece Wijaya, dkk. mengatakan bahwa "sebuah profesi, dalam artian yang umum, adalah bidang pekerjaan dan pengabdian tertentu. Yang karena hakikat dan sifatnya yang membutuhkan persyaratan dasar, ketrampilan teknis, dan sikap kepribadian tertentu" (Cece Wijaya, dkk, 2000:81).

Guru dalam era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini bukan hanya sekadar mengajar (*transfer of knowledge*) melainkan harus menjadi manajer belajar. Hal tersebut mengandung arti, setiap guru diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas dan aktivitas siswa, memotivasi siswa, menggunakan multimedia,

multimetode, dan multisumber agar mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Jika dilihat kondisi real pendidikan yang ada di daerah, masih banyak ditemukan guru berada dalam situasi yang kurang menguntungkan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.

Banyak guru yang ditempatkan di dalam ruang yang penuh sesak dengan anak didik dengan perlengkapan yang kurang memadai, dengan dukungan manajerial yang kurang mutakhir. Di tempat yang demikian itulah, guru-guru itu diharapkan mampu melaksanakan tugas yang maha mulia untuk mendidik generasi penerus anak bangsa. Hal ini akan bertambah lebih berat dan kompleks, bilamana dihadapkan lagi dengan luapan perkembangan IPTEK, tetapi dengan dukungan fasilitas dan sarana yang minim serta dengan iklim kerja yang kurang menyenangkan. Selain itu, beban guru ditambah lagi dengan berbagai tugas di luar kegiatan akademik yang banyak menyita waktu dan tenaga para guru.

Pendidikan yang baik, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat modern dewasa ini dan sifatnya yang selalu menantang, mengharuskan adanya pendidik yang profesional. Hal ini berarti bahwa di masyarakat diperlukan pemimpin yang baik, di rumah diperlukan orang tua yang baik dan di sekolah dibutuhkan guru yang profesional. Akan tetapi, dengan ketiadaan pegangan tentang persyaratan pendidikan profesional, maka hal ini menyebabkan timbulnya bermacam-macam tafsiran orang tentang arti guru yang baik, tegasnya guru yang profesional.

Umumnya dengan mudah orang menyetujui bahwa tugas sebagai seorang guru baiknya dipandang sebagai tugas profesional. Tetapi tidak semua menyadari bahwa profesionalisasi tenaga pelaksana itu bukan hanya terletak dalam masa-masa persiapan (pendidikan pendahuluan), tetapi juga di dalam pembinaan dan cara-cara pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dengan kata lain, profesionalisasi guru tidak selesai dengan diberikannya lisensi mengajar kepada mereka yang berhasil menamatkan pendidikannya. Untuk menjadi guru ini baru mencakup aspeknya yang formal. Kualifikasi yang formal

ini masih perlu dijiwai dengan kualifikasi riil dan hanya mungkin diwujudkan dalam praktek.

3. Kompetensi Profesional Guru Agama Islam

Sebagaimana layaknya makna profesional bagi guru umum, maka guru agama mestilah seorang profesional. Seperti kesimpulan di atas, bahwa guru profesional adalah guru yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang pendidikan.

Kemampuan atau kompetensi mempunyai kaitan yang erat dengan intraksi belajar mengajar dalam proses pembelajaran. Dimana seseorang guru akan ragu-ragu menyampaikan materi pelajaran jika tidak dibarengi dengan kompetensi seperti penguasaan bahan, begitu juga dengan pemilihan dan penggunaan metode yang tidak sesuai dengan materi akan menimbulkan kebosanan dan mempersulit pemahaman belajar siswa. Dengan demikian profesionalitas seseorang guru sangat mendukung dalam rangka merangsang motivasi belajar siswa dan sekaligus tercapainya intraksi belajar mengajar sebagai mestinya.

Proses intraksi belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas timbal balik yang langsung dalam situasi pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu. Intraksi guru dengan siswa bukan hanya dalam penguasaan bahan ajaran, tetapi juga dalam penerimaan nilai-nilai, pengembangan sikap serta mengatasi kesulitan-kesulitan yang di hadapi oleh siswa. Dengan demikian, dalam intraksi belajar mengajar dalam rangka menimbulkan motivasi belajar siswa, guru bukan hanya saja sebagai pelatih dan pengajar tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing.

Sesuai dengan kutipan di atas, maka seorang guru profesional adalah guru yang mempunyai strategi mengajar, menguasai bahan, mampu menyusun program maupun membuat penilaian hasil belajar yang tepat.

Selain hal di atas, guru juga mesti memiliki kemampuan dalam membangkitkan motivasi bagi belajar siswa. Mengenai hal ini menurut R. Ibrahim dan Nana Syaodih S., mengatakan bahwa kemampuan yang mesti dimiliki oleh guru, yaitu :

“Pertama, menggunakan cara atau metode dan media mengajar yang bervariasi. Dengan metode dan media yang bervariasi kebosanan pun dapat dikurangi atau dihilangkan. Kedua, memilih bahan yang menarik minat dan dibutuhkan siswa. Sesuatu yang dibutuhkan akan menarik perhatian, dengan demikian akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Ketiga, Memberikan saran antara lain ujian semester, ujian tengah semester, ulangan harian dan juga kuis. Keempat, memberikan kesempatan untuk sukses. Bahan atau soal yang sulit yang hanya bisa dicapai siswa yang pandai. Agar siswa yang pandai juga bisa maka diberikan soal yang sesuai dengan kepandaiannya. Kelima, diciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Dalam hal ini dilakukan guru dengan cara belajar yang punya rasa persahabatan, punya humor, pengakuan keberadaan siswa dan menghindari celaan dan makian. Keenam, Mengadakan persaingan sehat melalui hasil belajar siswa. Dalam persaingan ini dapat diberikan pujian, ganjaran ataupun hadiah” (R. Ibrahim dan Nana Syaodih S.,2006:33-34.)

Sejalan dengan kutipan di atas, maka profesionalitas guru adalah rangka motivasi siswa untuk sukses dalam belajar akan terlihat dengan kemampuan dalam intraksi belajar mengajar yang muncul indikator penggunaan metode dan media yang bervariasi, pemilihan bahan yang menarik minat, pemberian kesempatan untuk sukses, penyajian suasana belajar mengajar yang menyenangkan dan juga pengadaan persaingan sehat.

Apabila profesionalitas guru yang memiliki indikator seperti di atas, direalisasikan dalam intraksi belajar mengajar maka siswa akan aktif mengikuti intraksi belajar mengajar, menyelesaikan tugas-tugas dengan penuh kesadaran, mudah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Pada kondisi yang seperti itu, maka kesuksesan belajar dapat tercapai secara maksimal.

4. Kreativitas Belajar Siswa

Kreativitas adalah hasil dari interaksi antara individu dan lingkungannya seseorang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada dengan demikian baik berubah

dalam individu maupun di dalam lingkungan dapat menunjang atau dapat menghambat upaya kreatif (Utami Munandar, 2004: 12). Kreativitas juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata, yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya (Dedi Supriyadi 1009: 7).

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. "belajar juga adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya" (Slameto, 2003:2).

Tornace dan Myres dikutip oleh Triffinger dalam Semiawan dkk berpendapat bahwa belajar kreatif adalah :

"Menjadi peka atausadar akan masalah, kekuarangan-kekurangan, kesenjangan dalam pengetahuan, unsur-unsur yang tidak ada, ketidak harmonisan dan sebagainya. Mengumpulkan informasi yang ada, membataskan kesukaran, atau menunjukkan (mengidentifikasi) unsur yang tidak ada, mencari jawaban, membuat hipotesis, mengubah dan mengujinya, menyempurnakan dan akhirnya mengkomunikasikan hasil-hasilnya" (Conny Semiawan, dkk. 2007: 34).

Sedangkan proses belajar kreatif menurut Torance dan Myres berpendapat bahwa proses belajar kreatif sebagai : "keterlibatan dengan sesuatu yang berarti, rasa ingin tahu dan mengetahui dalam kekaguman, ketidak lengkapan, kekacauan, kerumitan, ketidakselarasan, ketidakteraturan dan sebagainya" (*Ibid*, hlm 35).

Kesederhanaan dari struktur atau mendiagnosis suatu kesulitan dengan mensintesis informasi yang telah diketahui, membentuk kombinasi dan mendivergensi dengan menciptakan alternatif-alternatif baru, kemungkinan-kemungkinan baru, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Semiawan, dkk., mengatakan bahwa :

“Mempertimbangkan, menilai, memeriksa, dan menguji kemungkinan- kemungkinan baru, menyisihkan, memecahkan yang tidak berhasil, salah dan kurang baik, memilih pemecahan yang paling baik dan membuatnya menarik atau menyenangkan secara estesis, mengkonunikasi hasil-hasilnya kepada orang lain” (Ibid, hlm 365).

Dengan demikian dalam belajar kreatif harus melibatkan komponen- komponen pengalaman belajar yang paling menyenangkan dan paling tidak menyenangkan lalu menemukan bahwa pengalaman dalam proses belajar kreatif sangat mungkin berada di antara pengalaman-pengalaman belajar yang sangat menenangkan, pengalaman-pengalaman yang sangat memberikan kepuasan kepada kita dan yang sangat bernilai bagi kita.

Jadi, kreativitas belajar dapat diartikan sebagai kemampuan siswa menciptakan hal-hal baru dalam belajarnya baik berupa kemampuan mengembangkan kemampuan formasi yang diperoleh dari guru dalam proses belajar mengajar yang berupa pengetahuan sehingga dapat membuat kombinasi yang baru dalam belajarnya.

Sebagaimana halnya dengan pengalaman belajar yang sangat menyenangkan, pada belajar kreatif dilihat secara aktif serta ingin mendalami bahan yang dipelajari. Dalam proses belajar secara kreatif digunakan proses berpikir *divergen* (proses berpikir ke macam-macam arah dan menghasilkan banyak alternatif penyelesaian) dengan proses berpikir konvergen (proses berpikir yang mencari jawaban tunggal yang paling tepat) berpikir kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasy, M. Athiyah., (2001)., *Dasar- Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Penerbit: Bulan Bintang, Jakarta.
- Aqib, Zainal., (2003)., *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran*, Penerbit: Insan Cendikia, Surabaya.
- Arikunto, Suharsimi., (2002)., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Djamarah, Syaiful Bahri., (2000)., *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Cetakan Ke-1. Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
-, (2006)., *Strategi Belajar Mengajar*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta. Ibrahim, R. dan Syaodih S., Nana., (2006)., *Perencanaan Pengajaran*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Edisi Ke-III, Cetakan Ke-2. Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Indrakusuma, Amien Daiem., (2003)., *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Penerbit: Usaha Nasional, Surabaya.
- Munandar, Utami., (2004)., *Pengembangan Emosi dan Kreativitas*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurdin, Syafrudin. (2000)., *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Penerbit: Pers, Ciputat.
- Rohadi., (2003), *Media Pendidikan*, Penerbit Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Sadirman, A.M., (2001)., *Interaksi dan Motivasi Belajar*, Penerbit: Rajawali Pres, Jakarta.
- Semiawan, Conny., dkk. (2007)., *Pendekatan Keterampilan Proses*, Penerbit: PT. Gramedia, Jakarta.
- Slameto., (2003)., *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Surya, M., dkk, (2003)., *Kapita Selekta Kependidikan SD*, Penerbit: Universitas Terbuka, Jakarta.

- Tafsir, Ahmad., (2001)., *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*, Penerbit: PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa., (2002)., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
- Usman, Muhammad Uzer., (2002)., *Menjadi Guru Profesional*, Penerbit: PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Wijaya, Cece., dkk. (2000)., *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Penerbit: Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Yamin, Martinis., (2009)., *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, Penerbit: Gaung Persada Press, Jakarta.
- Zainuddin, dkk., (2001)., *Seluk Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, Cetakan Ke-1. Penerbit: Bumi Aksara, Jakarta.

BAB 14

KOMPETENSI DAN MOTIVASI KERJA GURU DIKAITKAN DENGAN HASIL BELAJAR SISWA

Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. Hal ini disebabkan gurulah yang berada dibarisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Gurulah yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan (Kunandar, 2007: 5).

Guru sebagai pemegang amanat harus bertanggung jawab atas segala amanat yang diserahkan kepadanya, hal ini dijelaskan dalam firman Allah Surat An Nisa ayat 58: *“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. (QS An Nisa : 58) (Kementerian Agama RI, 2012 : 113).*

Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan pembelajaran, memiliki posisi yang sangat menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru ialah merancang, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi dan peran penting dalam merencanakan kehidupan bangsa. Kedudukan guru dalam kegiatan pembelajaran juga sangat strategis dan menentukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan tugas guru ialah kinerjanya dalam merencanakan/merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses belajar mengajar. Pemerintah dan masyarakat memiliki harapan besar terhadap guru. Guru diharapkan menjadi seorang profesional dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan kewajiban sebagai

pendidik. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005***).

Guru merupakan penanggung jawab proses belajar mengajar yang berlangsung didalam kelas. Selain itu, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas pengajaran yang dilaksanakannya. Guru adalah salah satu komponen manusia dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan (Sardiman, 2004): 125).

Guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah. Semua komponen lain, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, biaya, dan sebagainya akan berarti apabila esensi pembelajaran yaitu interaksi guru dengan peserta didik berkualitas. Karena itu Undang Undang No. 14 tentang Guru dan Dosen pasal 8 memberikan persyaratan yang kompleks untuk menjadi guru mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah yaitu dikatakan bahwa: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen).

Oleh karena itu, guru merupakan salah satu unsur dibidang pendidikan yang harus berperan aktif dan menempatkan keudukannya sebagai tenaga profesional. Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya “ suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang” (Kunandar, 2008: 45).

Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi guru yang terpenting. Bila kompetensi ini tidak ada pada diri seorang guru, maka ia tidak akan berkompeten dalam melakukan tugasnya dan hasilnya pun tidak akan optimal. Dalam syari'at Islam, meskipun tidak terpaparkan secara jelas, namun terdapat hadits yang menjelaskan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan oleh ahlinya (orang yang berkompeten dalam tugasnya tersebut). Allah SWT mengistimewakan manusia dengan akal, kesanggupan membedakan serta kesanggupan menerima ilmu dan berbagai pengetahuan serta membuat gagasan-

gagasan yang menjadikannya mampu menguasai alam wujud (Masyhur Amin, 2008: 25). Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia yang telah dianugerahkan Allah SWT.

Penguasaan empat kompetensi mutlak harus dimiliki setiap guru untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional seperti yang disyaratkan Undang Undang Guru dan Dosen. Kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ditampilkan dalam bentuk perilaku cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru dalam menjalankan profesinya (E. Mulyasa, 2008: 25).

Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Artinya suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus. Berdasarkan Undang Undang Guru dan Dosen (UU RI No. Th. 2005), disebutkan bahwa seorang guru yang profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain: memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus (continuous improvement) melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar dan sebagainya. Kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki guru selanjutnya dijelaskan dalam UU No. 14 tentang Guru dan Dosen pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Adapun pasal 8 yang berbunyi bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Ibid, 7.).

Sedangkan terkait dengan sertifikat profesi guru diberikan pemerintah melalui lembaga pelaksana sertifikasi jika yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan sehingga layak disebut sebagai guru profesional. Profesionalitas guru untuk memperoleh guru profesional tersebut sedikitnya harus memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) Memiliki landasan teologis dan filosofis yang mantap, (2) Memiliki landasan pengetahuan yang kuat, (3) Berdasarkan kompetensi individual bukan atas dasar KKN, (4) Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi yang akurat, (5) Ada kerjasama dan kompetisi yang sehat antar teman sejawat dan antar lembaga, (6) Adanya kesadaran profesional yang tinggi, (7) Memiliki prinsip-prinsip etik yang berupa kode etik, (8) Memiliki sistem sanksi profesi yang jelas, (9) Adanya militansi individual, (10) Memiliki organisasi profesi, dan (11) Memiliki jaminan mutu (E. Mulyasa. 2013: 37).

Perwujudan guru profesional yang bermutu sebagaimana diuraikan diatas, menuntut berbagai perbaikan terhadap program sertifikasi yang berlangsung sekarang ini agar hasilnya dapat memberikan jaminan terhadap kinerja dan kemampuan guru dalam melakukan pekerjaan secara profesional. Tanpa sertifikasi yang tepat dengan berbagai karakteristik diatas, dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam sistem pembinaan dan pengembangan profesi guru. Perlunya perbaikan sistem dan manajemen sertifikasi guru juga sesuai dengan Undang Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dan standar Nasional Pendidikan. Dalam Undang Undang dan Peraturan tersebut telah dikemukakan bahwa sertifikasi guru harus meliputi kompetensi kemampuan bidang studi, pemahaman karakteristik peserta didik, pembelajaran yang mendidik, serta pengembangan profesi dan kepribadian pendidik (Ibid, 37).

Proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga kegiatan belajar para siswa berada pada tingkat optimal (Nana Sudjana, 2005: 22).

Meskipun demikian, pelaksanaan sertifikasi guru ini tidak sedikit menuai badai dan hasil yang mengecewakan ketika para guru yang telah disertifikasi dan telah mendapatkan tunjangan profesi tidak

menunjukkan kinerja yang berkualitas. Dengan kata lain, mutu guru-guru yang telah disertifikasi tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan di sekolah/lapangan, kecemburuan sosial, dan bahkan saling lempar pekerjaan apalagi jika guru yang sudah disertifikasi tersebut usianya lebih muda daripada guru lain yang belum tersertifikasi. Permasalahan tersebut antara lain diungkapkan oleh Muslimah (seorang pemeran guru pada film *Laskar Pelangi*) dalam buku Mulyasa, beliau mengungkapkan: Guru-guru yang telah bersertifikasi tetapi tidak menunjukkan kinerja yang bermutu telah menimbulkan kesenjangan. Kecemburuan sosial dan menjadi beban sekolah karena mereka mendapatkan penghasilan lebih, tetapi tidak ada peningkatan dalam kinerja (Ibid, 46).

Gambaran mengenai kondisi guru saat ini dapat dilihat secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif jumlah guru di Indonesia, sesungguhnya tidak kekurangan. Yang terjadi adalah ketidakmerataan distribusi guru terutama antara Jawa-Luar Jawa dan antara perkotaan dengan pedesaan, sedangkan di pelosok pedesaan atau daerah-daerah terisolir selalu kekurangan guru. Secara kualitatif dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya adalah tingkat pendidikan terakhir atau kualifikasi, kelayakan mengajar, serta kesejahteraan. Yang terakhir ini dapat menjadi salah satu indikator karena asumsinya kesejahteraan yang baik dapat mendorong guru meningkatkan kualitas atau profesionalitasnya (Thomas A. Hermawan Martanto, 2008: 198-200).

Selain problem ketidakmerataan distribusi dan rendahnya kualitas pendidikan guru, problem lain yang dihadapi pada masalah keguruan adalah banyak guru yang berprofesi ganda sebagai pejabat pemerintahan desa dan sebagai istri pejabat pemerintahan yang masih tercatat sebagai guru, namun tidak menjalankan fungsi sebagai pengajar. Banyak pula guru yang mengajar di luar bidang keahliannya, jika secara teknis disebut *mismatch*. Kondisi yang buruk ini terutama banyak di jumpai di lembaga pendidikan madrasah swasta. Bahkan tidak sedikit dari guru madrasah di semua tingkatan (MI, MTs, dan MA) diketahui salah tempat dan berkualifikasi rendah. Mereka pada umumnya lulusan PAI (Pendidikan agama Islam) yang terpaksa mengajar mata pelajaran umum, seperti Bahasa Indonesia, Sejarah, IPA, atau bahkan Matematika (Ibid., 200-201).

Salah satu upaya untuk menyediakan guru yang profesional dan berkualitas adalah guru tidak hanya memiliki kualifikasi akademik namun juga harus memiliki kompetensi dan sertifikasi yang memenuhi persyaratan. Namun sayangnya dalam kultur masyarakat Indonesia saat ini pekerjaan guru masih cukup tertutup. Bahkan atasan guru seperti Kepala Madrasah dan Pengawas sekalipun tidak mudah untuk mendapatkan data dan mengamati realita keseharian *performance* guru dihadapan peserta didik. Memang program kunjungan kelas oleh Kepala Madrasah atau Pengawas tidak bisa ditolak oleh guru. Akan tetapi guru berusaha menampakkan kinerja terbaiknya baik pada aspek perencanaan maupun pelaksanaan hanya pada saat dikunjungi. Selanjutnya ia akan kembali bekerja seperti sedia kala, kadang tanpa persiapan yang matang serta tanpa semangat, antusiasme dan kreativitas yang tinggi (Tutik Rahmawati dan Daryanto, 2013: 101).

Selain hal-hal tersebut diatas, ada suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh guru, yaitu motivasi guru. Malone membedakan bentuk motivasi yang meliputi motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik (Hamzah B. Uno, 201:66).

Teori dari Malone diatas, diperjelas oleh Hamzah B. Uno. Menurut Hamzah B. Uno, motivasi kerja adalah “dorongan dari dalam diri dan luar diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang terlihat dari dimensi internal dan dimensi eksternal” (Ibid, 72).

Disisi lain belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga kegiatan belajar para siswa berada pada tingkat optimal (Oemar Hamalik, 2002:36).

Oleh karena itu, seseorang yang berprofesi sebagai guru, khususnya guru rumpun PAI baik yang sudah tersertifikasi maupun yang belum diharapkan memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan. Selain itu juga harus memiliki kompetensi, motivasi kerja dan kinerja profesional. Penguasaan kompetensi profesional, kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial sangat menunjang kinerja guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Namun, motivasi kerja sangat dibutuhkan juga, karena salah satu faktor pendukung dari kinerja guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa adalah motivasi. Mengajar PAI bukanlah hanya

sekedar menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik, tetapi mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan melakukan evaluasi. Adapun menurut Zakiyah Darajat dalam Abdul Majid dan Dian Andayani, “ Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam (Abdul Majid dan Dian Andayani, 2004), 130.).

BAB 15

MASJID SEBAGAI PUSAT PEMBINAAN REMAJA

A. Pendahuluan

Kaum remaja merupakan kelompok usia strategis bagi pembinaan generasi muda, mengingat dalam tempo 15 tahun berikutnya, mereka akan menjadi kekuatan potensial suatu masyarakat. Tetapi, kenyataannya saat ini mereka berada dalam kondisi transisional. Secara biologis, mereka baru saja meninggalkan masa kanak-kanak, dan pada saat yang bersamaan, mereka masih belum memasuki masa dewasa. Ia telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, akan tetapi belum mampu menginjak ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab; baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat.

Sehubungan kaum remaja berada dalam usia transisional, maka kita melihat pola perilaku mereka masih bersifat kekanak-kanakan. Tetapi pola pikirannya sudah memiliki pola pikir sebagaimana layaknya orang dewasa. Kebanyakan remaja, secara individual, kurang bertanggungjawab secara mandiri terhadap karakter kepribadiannya. Tetapi, secara kelompok mereka bersedia mempertanggungjawabkan atas berbagai hasil tindakannya. Tingkat penyesuaian diri kaum remaja cenderung variatif, ada yang lama dan ada pula yang cukup singkat.

Oleh karena itu, kaum remaja perlu mendapat pembinaan secara sungguh-sungguh. Sedemikian rupa, sehingga segala pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku mereka dapat berkembang dengan baik. Adapun sasaran pokok pembinaan kaum remaja meliputi aspek: mental dan kepribadian beragama, mental ideologi

negara, ilmu pengetahuan, kepribadian yang stabil, keterampilan khusus, dan pengembangan bakat-bakat khusus.

Salah satu sarana pembangunan yang berpotensi besar untuk dijadikan pusat pembinaan remaja adalah masjid. Sebab, masjid memiliki fungsi ganda, yakni sebagai pusat ibadah dan sekaligus sebagai pusat kebudayaan. Sebagai pusat ibadah, masjid merupakan tempat pelaksanaan shalat lima waktu setiap hari, shalat jum'at, shalat Idul Fitri dan shalat Idul Adha. Sedangkan dalam fungsinya sebagai pusat kebudayaan, masjid merupakan tempat belajar mengajar, tempat musyawarah, dan tempat pertunjukan karya seni.

Sejak zaman Rosulullah hingga masa kini dan sampai masa yang akan datang, selain berfungsi sebagai pusat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Sebagai pusat ibadah, masjid digunakan untuk kegiatan sholat dan berzikir kepada Allah. Pemanfaatan masjid untuk menyembah selain Allah merupakan sesuatu yang sangat terlarang. Allah berfirman: "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya disamping (menyembah) Allah" (Q.S. Al-Jin: 18).

Pada bagian lainnya, Allah juga berfirman: "... Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang didalamnya. Didalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih..." (Q.S. At-Taubah: 108).

Sebagai pusat kebudayaan umat Islam, masjid bisa digunakan sebagai tempat kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, bidang pelayanan sosial, dan bidang penerangan masyarakat. Agar aktivitas remaja memiliki keterikatan yang kuat dengan masjid, maka fungsi keseluruhan dari sebuah masjid harus mengakomodasi berbagai agenda kreatif kaum remaja.

B. Problema Remaja

Kaum remaja mempunyai berbagai kebutuhan yang menuntut untuk segera dipenuhi, dan kebutuhan itu merupakan sumber timbulnya berbagai problema didalam dirinya, terutama dalam rangka penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Sedangkan yang dimaksud problema remaja adalah masalah-

masalah yang dihadapi para remaja sehubungan dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka dalam rangka penyesuaian diri terhadap lingkungan dimana remaja itu hidup dan berkembang.

Adapun problema-problema umum kaum remaja, diantaranya sebagai berikut:

1. Problema Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri adalah kemampuan seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga ia merasa puas terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya. Banyak remaja yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri. Akibatnya tampak dirinya dalam keadaan gelisah dan konflik batin.

2. Problema Beragama

Masalah agama pada remaja terletak pada tiga hal, yaitu: keyakinan dan kesadaran beragama, pelaksanaan ajaran agama secara teratur, dan perubahan tingkah laku karena agama.

3. Problema Kesehatan

Remaja ingin sehat, cerdas, dan tangkas. Remaja yang kurang sehat jasmaninya disebabkan sesuatu penyakit, akan merasa rendah diri. Remaja demikian perlu mendapat bimbingan dan penyuluhan. Dimasa remaja, perlu ditanamkan sikap positif terhadap kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

4. Problema Ekonomi dan Pekerjaan

Agar kaum remaja dapat bekerja dengan baik dan tekun, harus ditumbuhkan sikap mental mencintai pekerjaan. Kita perlu menumbuhkan sikap wiraswasta, antara lain: cinta pekerjaan, rajin, mengisi setiap waktu secara produktif, tekun, sabar, dan tetap pendiriannya.

5. Problema Perkawinan dan Hidup Berumah Tangga

Pada masa remaja kadang-kadang timbul konflik antara dia dan orang tuanya dalam soal pemilihan jodoh. Konflik ini akan terselesaikan jika orang tua lebih banyak berdialog dengan remaja secara baik, tanpa paksaan dan tanpa memperlihatkan kekuasaan. Selain itu, hendaknya ditanamkan pula sikap positif kepada remaja tentang hidup berumah tangga.

6. Problema Ingin Berperan di Masyarakat

Keinginan berperan di masyarakat bersumber dari motif ingin mendapat penghargaan (motif sosial). Keinginan berperan di masyarakat adalah suatu dorongan sosial yang terbentuk karena tuntutan kemajuan teknologi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Orang dewasa belum yakin akan rasa tanggung jawab yang dimiliki remaja, sehingga orang dewasa enggan memberikan peranan terhadap mereka.

7. Problema Pendidikan

Problema Pendidikan berhubungan dengan kebutuhan akan ilmu pengetahuan yang diperlukan para remaja dalam rangka memacu kepuasan ingin mengetahui hal-hal yang belum terungkap secara ilmiah. Kebutuhan ini berguna bagi tercapainya masa depan yang gemilang dan ada kaitannya dengan status ekonomi mereka.

8. Problema Mengisi Waktu Luang

Waktu luang (senggang) adalah waktu yang kosong setelah selesai belajar dan bekerja. Waktu terluang ini lebih lama daripada waktu belajar dan bekerja. Waktu terluang yang paling jelas adalah waktu libur sekolah, kadang mencapai dua minggu, kadang lebih dari dua minggu. Bagi remaja, mengisi waktu luang merupakan problema yang sulit diatasi. Karena mereka belum mampu mengatur dirinya sendiri dengan disiplin yang ketat.

Sementara itu, menurut Zakiah Daradjat. Problema-problema remaja yang sejak dulu dan hingga sekarang masih tampak jelas meliputi tiga hal, yaitu:

1. Masalah hari depan

Kecemasan akan hari depan yang kurang pasti, menimbulkan berbagai problema lain yang mungkin menambah suramnya masa depan remaja. Sehingga mengakibatkan semangat belajar menurun, kemampuan berfikir berkurang, rasa tertekan (mentalnya) timbul, dan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik.

2. Masalah Hubungan dengan Orang Tua

Seringkali terjadi pertentangan pendapat antara orang tua dengan anaknya yang sudah remaja. Hubungan yang kurang baik ini muncul karena remaja mengikuti arus dan mode seperti berikut ini: rambut gondrong, pakaian kurang sopan, dan kurang hormat kepada orang tua.

3. Masalah Moral dan Agama

Masalah moral dan agama semakin memuncak terutama di kota besar (termasuk Kota Serang). Biasanya kemerosotan moral disertai oleh sikap menjauh dari agama. Nilai-nilai moral yang didasarkan atas agama, akan terus berubah. Perubahan itu menimbulkan kegoncangan, karena remaja hidup tanpa pegangan nilai yang pasti.

Munculnya berbagai problema remaja, sebagaimana telah disebutkan di atas, boleh jadi bukan hanya merupakan bentuk bawaan sejak lahir, tetapi karena terpengaruh faktor-faktor tertentu seperti:

1. Pengaruh Lingkungan

Perilaku orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja. Anak seorang penjahat, perampok dan pencuri biasanya akan menjadi seorang penjahat, perampok dan pencuri juga. Sebab “pekerjaan” orang tua dapat mengkondisikan sikap dan perilaku seluruh anggota keluarga.

Tindak kriminal yang dilakukan oleh ayah atau ibu, dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan anak. Sehubungan dengan hal ini, tradisi, sikap hidup dan falsafah hidup keluarga, besar sekali peranannya dalam mengkondisikan tingkah laku anak.

2. Pengaruh Pergaulan

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak muda justru banyak dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya. Oleh sebab itu, menilai teman bergaul harus lebih hati-hati. Sebab pengaruh pergaulan lebih besar daripada pengaruh guru di sekolah. Bergaul dengan anak peminum, yang dibicarakan adalah soal minuman, merek minuman, dan kehebatan meminum.

3. Pengaruh Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan karakter remaja. Remaja yang baik biasanya dididik dalam lingkungan yang baik. Sebaliknya remaja yang brutal biasanya mendapat pendidikan yang kurang baik, akibatnya anak cenderung bermental materialistis dan egois. Padahal akhlak dan agama cenderung merupakan pengendali terhadap kebrutalan dan kebinalan remaja.

C. Pembinaan Remaja

Sesungguhnya kaum remaja sangat membutuhkan agama dalam hidupnya, terutama untuk menghadapi kegoncangan jiwanya. Namun tidak semua remaja mendapat kesempatan untuk mengenal agama yang serasi dan cocok dengan perkembangan jiwanya. Sikap remaja terhadap agama sangat dipengaruhi oleh pengalaman keagamaan mereka yang dilaluinya sejak kecil.

Oleh karena itu, kita harus memperhitungkan dan memilih cara-cara yang tepat dan cocok dalam melakukan pembinaan remaja. Dalam hal ini, peran orang tua, guru dan tokoh agama (ulama) dapat menentukan: apakah remaja betul-betul akan menjadi orang yang beriman dan tekun menjalankan ajaran agama dalam hidupnya: ataukah mereka akan menjadi jauh serta acuh tak acuh terhadap agama.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembinaan terhadap kaum remaja adalah sebagai berikut:

1. Tunjukkan Pengertian dan Perhatian Kepada Remaja

Seringkali remaja kurang dimengerti oleh orang dewasa, terutama orang tuanya. Hal ini kurang menyenangkan bagi remaja. Sehingga mereka menjauh dari orang dewasa. Lalu berkumpul dan bergabung dengan teman-teman sebayanya. Dari sinilah munculnya bermacam-macam perkumpulan remaja. Remaja akan merasa senang dan akan terbuka hatinya kepada orang yang mau mengerti dirinya.

2. Bantulah Remaja untuk Mendapatkan Rasa Aman

Pada umumnya remaja merasa kurang aman dalam hidupnya, terutama bagi mereka yang datang dari keluarga kurang harmonis, sering bertengkar atau sering dimarahi orang tuanya. Orang tua, guru dan tokoh agama yang bijaksana, tidak

akan membiarkan remaja terlunta-lunta dalam masa cemas dan kebingungan. Mereka harus menunjukkan pengertian akan rasa hati remaja yang cemas dan tidak aman.

3. Timbulkan pada Remaja Rasa Disayang

Tidak jarang remaja merasa dibenci oleh orang tuanya yang dianggap tidak sopan atau menjadi berubah sikapnya; dari halus, lemah dan patuh menjadi keras dan sulit dikendalikan. Seorang guru, ayah-ibu, dan tokoh agama mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengembalikan rasa kasih sayang kepada remaja. Sikap demikian akan mengetuk nurani remaja. Mereka akan terbuka kembali untuk menerima dan mengeluarkan rasa hatinya kepada orang dewasa. Tunjukkan kepada remaja bahwa kesayangan kepadanya adalah ikhlas.

4. Hargai dan Hormati Mereka

Remaja sangat memerlukan dan mengharap nasehat-nasehat serta petunjuk dalam menghadapi hidup dan persoalannya. Tetapi mereka tidak suka menerima nasehat yang diberikan dengan cara sinis, berolok-olok marah, dan bersifat memerintah. Cara-cara demikian akan menimbulkan rasa antipati pada remaja.

5. Berilah Mereka Kebebasan dalam Batas-Batas Tertentu

Apabila remaja merasa bahwa kebebasannya dihalangi dan dibatasi dengan ketentuan dan aturan yang tidak mengindahkan kebutuhan jiwanya, maka remaja akan berontak terhadap aturan yang baku. Dan apabila remaja tidak diperbolehkan mengeluarkan pendapat dan perasaannya, ia akan tertekan jiwanya atau frustrasi. Karena itu, guru, orang tua, dan tokoh agama hendaknya selalu terbuka untuk mendengar dan memperhatikan pendapat serta perasaan remaja dalam segala hal.

6. Timbulkan pada Remaja Rasa Butuh Agama

Guru, orang tua, dan tokoh agama yang bijaksana akan dapat menampilkan “figur” Allah dalam segala sifatnya kepada remaja. Sedemikian rupa, sehingga remaja merasakan kebutuhan kepada pertolongan dan perlindungan Allah. Kalau remaja telah merasakan kebutuhan itu, akan mudah untuk

diajak melaksanakan ibadah dan berdo'a kepada Allah. Tumbuhkan pula kebutuhan remaja secara bersama-sama kepada pertolongan dan perlindungan Allah. Misalnya melalui shalat berjamaah, pengajian remaja, dan aktivitas sosial tertentu.

7. Usahakan Agar Mereka Merasa Berhasil

Merasa berhasil dalam segala hal termasuk kebutuhan pokok manusia. Terutama kaum remaja, yang seringkali merasa kurang yakin akan kemampuan dirinya. Keberhasilan itu akan menambah semangat untuk berusaha melakukan berbagai kegiatan. Rasa berhasil remaja banyak menyangkut soal-soal yang bukan bersifat benda. Misalnya: lulus ujian di sekolah, berhasil dalam olah raga, berhasil dalam kegiatan keagamaan, dan berhasil dalam berbagai kegiatan sosial. Karena itu, remaja perlu diberi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan rasa puas, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.

8. Konsultasi Lebih Baik Dari pada Ceramah

Ceramah yang disampaikan dalam bentuk nasehat, saran, dan peringatan, biasanya kurang menarik bagi remaja. Ceramah itu dapat menarik apabila isinya menyangkut problema-problema yang dirasakan oleh remaja. Dalam hal ini, menciptakan konsultasi biasanya lebih berkesan dan lebih berpengaruh dalam pembinaan remaja.

D. Fungsi Masjid pada Masa Rasulullah

Sebelum mengoptimalkan fungsi masjid pada masa sekarang ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu fungsi masjid yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jangan sampai terjadi disekitar tempat tinggal kita, ada sebuah masjid yang dibangun dengan megah dan indah serta menghabiskan dana yang besar, tapi hanya sedikit saja orang yang memakmurkannya. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, yang artinya: "Sungguh akan datang pada umatku suatu masa dimana mereka saling bermegah-megahan dengan membangun masjid, tapi yang memakmurkn hanya sedikit" (HR. Abu Daud).

Berkaitan dengan hal tersebut, Ahmad Yani mengidentifikasi adanya sembilan macam fungsi masjid pada masa Rasulullah, yang meliputi:

1. Sebagai Tempat Pelaksanaan Peribadatan

Menjadi tempat shalat dan dzikir kepada Allah merupakan fungsi utama dari masjid. Seluruh aktifitas yang dilaksanakan di masjid (harus) berorientasi pada *zikrullah*. Oleh karena itu, upaya sesuatu yang aniaya. Dalam hal ini, Allah berfirman.

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjid-Nya, dan berusaha untuk merobohkannya” (Q.S. al-baqarah: 114).

2. Sebagai Tempat Pertemuan

Salah satu tempat yang paling mulia digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk saling bertemu adalah masjid. Pertemuan di masjid yaitu untuk menegakan shalat, berzikir, membaca Al-Qur'an dan melaksanakan peribadatan lainnya. Dengan selalu bertemu di masjid, maka Rosul dan para Sahabatnya memiliki kekuatan amanah. Perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam di muka bumi.

3. Sebagai Tempat Bermasyarakat

Strategi perang, perdamaian dengan pihak lawan, dan upaya meningkatkan kemaslahatan umat merupakan masalah-masalah yang sering dimusyawarahkan oleh Rasul SAW dan para sahabatnya di masjid. Karena dilaksanakan di masjid, maka musyawarah bisa berlangsung dengan suasana persaudaraan yang harmonis dan hasilnya bisa dicapai sesuai dengan wahyu yang diturunkan Allah SWT.

4. Sebagai Tempat Perlindungan

Bila seseorang berada dalam keadaan tidak aman, kemudian ia memasuki sebuah masjid, maka orang tersebut tidak boleh diperangi. Dalam hal ini, Allah berfirman: “... Dan janganlah kamu memerangi mereka di *Musjidil Haram*, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu...” (Q.S. Al- Baqarah: 191). Pada masa Rasulullah, masjid juga menyediakan asrama yang disebut dengan *Suffah*, dan para sahabat menetap di sana. Sehingga mereka kemudian di kenal dengan istilah “*Ahlus Suffah*”.

5. Sebagai Tempat Kegiatan Sosial

Untuk mengatasi berbagai masalah, Rasulullah dan para Sahabatnya menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan sosial, misalnya: mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqah, melalui masjid. Kemudian para pengurus masjid menyalurkannya kepada para sahabat yang sangat membutuhkannya.

6. Sebagai Pengobatan Tempat Orang Sakit

Pada masa Rasulullah, bila ada seorang pasukan perang yang mengalami luka-luka dan memerlukan perawatan serta pengobatan, maka perawatan dan pengobatannya dilakukan di sebuah tenda oleh seorang sahabat wanita yang bernama *Rafidah*. Sehingga tenda itu diberi nama tenda

Rafidah. Dalam konteks sekarang, bisa didirikan poliklinik di masjid untuk memberikan penyuluhan kesehatan dan melayani pemeriksaan.

7. Sebagai Tempat Latihan dan Mengatur Siasat Perang

Di masjid, Rasulullah melakukan latihan dalam rangka menerapkan strategi perang. Sehingga terbentuklah prajurit atau mujahid yang berkepribadian Islam dan memiliki kemampuan perang yang bisa diandalkan.

8. Sebagai Tempat Penerangan dan Madrasah Ilmu

Rasulullah SAW juga menjadikan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya dari Allah SWT, berupa wahyu. Hal ini berarti masjid berfungsi pula sebagai madrasah yang didalamnya kaum muslimin memperoleh ilmu pengetahuan.

Selain itu, masjid juga digunakan sebagai sarana penerangan. Sehingga segala sesuatu dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW dengan sebaik- baiknya melalui *khutbah*, *tabligh*, mengajar dan mendidik para sahabatnya.

9. Sebagai Tempat Berdakwah

Masjid amat besar fungsinya dalam kegiatan dakwah, baik dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya maupun antara sesama sahabat. Oleh karena itu, dakwah merupakan sesuatu yang mulia didalam Islam dan masjid menjadi sarana utamanya.

Dengan demikian, menjadi semakin jelas bahwa pada masa Rasul, masjid berfungsi sebagai tempat berbagai aktivitas sosial yang besar manfaatnya bagi umat Islam. Sekaligus berfungsi sebagai pusat pembinaan umat Islam. Permasalahannya adalah bagaimana “mengembalikan” fungsi masjid sebagaimana pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah dengan memperhatikan kebutuhan realistis masyarakat muslim yang menjadi jama’ahnya.

E. Optimalisasi Fungsi Masjid

Agar aktivitas masjid mampu menyentuh dan melibatkan semua jamaah, pengurus masjid harus memiliki program kerja yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan jamaah. Program kerja para aktivis masjid pada masa kini dapat dikelompokkan kepada bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang *Ubudiyah*

Kegiatan masjid pada bidang *ubudiyah* (ibadah yang bersifat khusus), meliputi: pelaksanaan sholat lima waktu (berjamaah), pelaksanaan sholat jum’at, dengan menentukan petugas khotib dan Imam terlebih dahulu, sholat tarawih dan witr, dengan menetapkan petugas Imam dan penceramahnya, pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tempat pemotongan hewan Qurban, serta tempat penyelenggaraan sholat sunnah insidental.

2. Bidang Pendidikan

Kegiatan bidang pendidikan berupaya untuk mencapai jamaah masjid yang memahami ajaran Islam secara *syamil* (menyeluruh) dan kamil (sempurna), memiliki wawasan keislaman dan pengetahuan umum yang luas, serta konsekwen dalam mengamalkannya.

Aktivitas bidang pendidikan meliputi: kegiatan pengajian untuk anak-anak, remaja dan orang tua; memiliki lembaga pendidikan formal maupun non formal; perpustakaan masjid dengan berbagai bahan bacaan yang berguna bagi jamaahnya; kaderisasi kepengurusan masjid, agar mekanisme kerjanya berjalan baik; dan peringatan hari-hari besar Islam (PHBI) yang merupakan tradisi baik di kalangan masyarakat muslim.

3. Bidang Pelayanan

Pengurus masjid harus berusaha agar masyarakat yang menjadi jama'ahnya mendapat sesuatu dari masjid. Oleh karena itu, pengurus masjid harus mengembangkan berbagai pelayanan kepada jamaahnya, seperti: bimbingan dan penyuluhan kemasyarakatan Islam, layanan dan konsultasi kesehatan jama'ah; pengurusan jenazah; serta santunan sosial dalam mengurangi beban hidup sebagian jama'ah.

4. Bidang Penerangan

Jama'ah masjid harus mengetahui berbagai masalah yang berkembang, sehingga dapat memberikan penilaian dari sudut ajaran Islam. Oleh karena itu, pengurus masjid dapat melakukan berbagai cara, seperti: menerbitkan atau berlangganan bulletin jum'at; menerbitkan majalah dinding; dan mengadakan ceramah-ceramah keislaman yang berkaitan dengan masalah-masalah yang perlu diketahui oleh jama'ah.

5. Bidang Usaha

Pengurus masjid mengupayakan usaha guna menopang seluruh kegiatan masjid, diantara usaha pengumpulan dana yang bisa dilakukan oleh pengurus masjid adalah: mengupayakan adanya donatur tetap dari jama'ah setempat atau dermawan lainnya yang diambil infaknya setiap bulan; menghimpun dan mengelola zakat fitrah dan zakat *mal* (harta), infak dan sodakoh dari kaum muslimin; dan menyewakan inventaris masjid.

6. Bidang Kepengurusan

Agar aktivitas masjid dapat terjaga kelangsungannya, maka kepengurusan masjid harus handal. Oleh karena itu, aspek kepengurusan perlu dikembangkan agar kemakmuran masjid semakin baik. Idealnya, seorang pengurus masjid memenuhi kriteria berikut ini: seorang muslim yang memiliki wawasan pengetahuan (keislaman) yang luas, memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan masjid.

7. Bidang Pembinaan Remaja

Dalam konteks kemasjidan, generasi muda menjadi tulang punggung dan harapan besar bagi kemakmuran masjid masa kini dan masa yang akan datang. Dalam kaitan ini, perlu

dibentk, dibina dan dikembangkan apa yang disebut dengan remaja masjid.

8. Bidang Kewanitaan

Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa kaum wanita tidak melarang untuk melakukan sholat di masjid, maka pengurus masjid juga memberikan perhatian dan pembinaan kepada jama'ah wanita. Bentuk kegiatannya adalah mengadakan pengajian setiap pekan, menyelenggarakan pendidikan pra-nikah, dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kemasjidan lainnya.

Sementara itu, menurut Abdurrahman An-Nahlawi masjid memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Di masjid, berkumpul kaum mukminin atas nama Allah, yang didalam dirinya berkembang pengakuan dan kebanggan sebagai masyarakat muslim.
2. Di masjid, mereka akan menyimak khutbah-khutbah dan berbagai pengetahuan umum, sehingga mereka menjalani hidup dengan kesadaran atas akidah islam.
3. Di masjid, mereka mempelajari Al-Qur'an dan membacanya dengan tertib, sehingga mereka mampu menyeimbangkan perkembangan pola pikiran dengan peradabannya.
4. Di masjid, mereka mempelajari hadis, fiqih, dan sejarah ilmu kemasyarakatan; termasuk didalamnya ilmu yang berhubungan dengan bahasa dan sejarah.

Sedangkan menurut Moh.E. Ayub, pada masa kini, masjid memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Masjid merupakan tempat kaum mulimin beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Masjid ialah tempat kaum muslimin beri'tikaf, memberihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin, sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga.
3. Masjid ialah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.

4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan.
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jama'ah dan kegotong royongan didalam mewujudkan kesejahteraan bersama.
6. Masjid dengan majlis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan kaum muslimin.
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat.
8. Masjid merupakan tempat menyimpan dan membagikan dana.
9. Masjid merupakan tempat melaksanakan pengaturan dan supervisi sosial.

Dengan demikian, masjid dapat difungsikan sebagai pusat pembinaan, dan pusat pengembangan kehidupan masyarakat muslim menuju "umat terbaik". Dinamakan pusat perencanaan, karena di masjid terjadi proses pembersihan jiwa, sehingga segala rencana bisa berawal dari niat yang suci bersih. Dinamakan sebagai pusat pembinaan, karena berbagai kelemahan masyarakat dapat dibina melalui masjid. Dan dinamakan sebagai pusat pengembangan kehidupan, karena pengurus masjid berusaha keras agar para jama'ahnya dapat menikmati suasana kehidupan dengan berpegang teguh kepada keimanan dan ketakwaan.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Remaja, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masjid dapat berfungsi sebagai pusat peribadatan dan juga sebagai pusat kebudayaan umat Islam. Sehingga masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat pelaksanaan shalat berjamaah dan tempat berzikir, tetapi dapat pula diberdayakan sebagai tempat pembinaan umat Islam dalam bentuk pengajian umum, peringatan hari besar Islam, dan penampilan kreasi seni umat Islam.
2. Problema remaja yang seringkali kita temukan di masyarakat, mencakup hal-hal berikut ini: proses penyesuaian diri, kehidupan beragama, kondisi kesehatan jiwa dan raga, masalah

pra-perkawinan dan hidup berumah tangga, peran sosial di masyarakat, masalah pendidikan, dan pemanfaatan waktu luang.

3. Pola pembinaan remaja dengan menempatkan masjid sebagai pusat pembinaanya atau pusat kegiatannya memerlukan pendekatan manajemen yang non-profit. Dalam hal ini, pengurus masjid mesti mengembangkan konsep manajemen pendidikan agama luar sekolah agar proses dan hasil pembinaanya bersifat manusiawi dan religius.

CATATAN AKHIR

1. Sofyan S. Willis, *Problema Remaja dan Permasalahannya*, (Bandung: Angkasa, 1994), h. 22
2. Sidi Gazalba, *MESJID: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Al- Husna, 1994), h. 9
3. Zakiah Darajat, *Pembinaan Remaja*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 126
4. Fuad Kauma, *Sensasi Remaja Dimasa Pubertas*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999),h. 61
5. Ahmad Yani, *Panduan Memakmurkan Mesjid*, (Jakarta: Khairo Ummah, 1998), h. 12
6. Abdurrahman An Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 138
7. Moh. E. Ayub, *Manajemen Mesjid*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 7

DAFTAR PUSTAKA

- An Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ayub, Moh. E., *Manajemen Mesjid*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Darajat, Zakiah, *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Gazalba, Sidi, *MESJID: Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Al-Husna, 1994.
- Kauma, Fuad, *Sensasi Remaja Dimasa Pubertas*, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Willis, Sofyan S., *Problema Remaja dan Permasalahannya*, Bandung: Angkasa, 1994.
- Yani, Ahmad, *Panduan Memakmurkan Mesjid*, Jakarta: Khairo Ummah, 1998.

TENTANG PENULIS



Dr. H. Anis Fauzi, M.Si.

Lahir di wilayah Serang pada tanggal 28 Oktober 1967, dari pasangan H. Asep Zarkasyi, S. Pd.I dan Hj. Siti Rodiyah, anak kedua dari tujuh bersaudara. Pendidikan dasar diselesaikan di SDN Inpres Delingseng – Citangkil Cilegon (1980) dan SMP Negeri 1 Kota Serang (1983). Pendidikan menengah diselesaikan di SMA Negeri 1 Kota Serang (1986). Pendidikan Sarjana (S-1) diselesaikan di Jurusan Pendidikan Geografi UPI Bandung (1991). Pendidikan Magister (S-2) diselesaikan di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada Program Magister Studi Islam (2002). Pendidikan Doktor (S-3) diselesaikan di Program Pascasarjana Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung dalam bidang Ilmu Pendidikan (2012).

Penulis adalah Dosen Tetap Program Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Maulana Hasanuddin Banten. Selain itu, menjadi Dosen Tidak Tetap di STKIP Situs Banten (2000 – Sekarang). Penulis pernah bekerja sebagai Guru Honorer pada mata pelajaran Geografi/Antropologi/IPS di SMA Negeri 1 Ciruas Kabupaten Serang (1991 – 1992); MAN 2 Kota Serang (1991 – 1994); SMA PGRI 1 Kota Serang (1992 – 1996); SMA Negeri 2 Krakatau Steel Kota Cilegon (1994 – 1998); Bimbingan Belajar “Nurul Fikri” Cabang Kota Serang (1994 – 2000), dan Guru SMP Negeri 5 Kota Serang (1998-2002).

Karya tulis ilmiah dalam bentuk Buku Daras: Pembelajaran Mikro, Penerbit Diadit Media, Jakarta (2009); Pengantar Metodologi Studi Islam, Penerbit FTK Press, Serang, (2015). Karya tulis ilmiah dalam bentuk Buku Referensi: Menyimak Fenomena Pendidikan di Banten (Edisi Perdana), Penerbit Suhud-Mediautama, Serang (2004); Menyimak Fenomena pendidikan di Banten (Edisi Revisi), Penerbit Diadit Media, Jakarta (2005); Menggagas Jurnalistik Pendidikan, Penerbit Diadit Media, Jakarta (2007); Kolaborasi Guru dan Dosen, Penerbit FTK Press, Serang, (2015). Karya tulis ilmiah dalam bentuk Buku Hasil Penelitian: Manajemen Peningkatan Profesionalisme Dosen, FTK Banten Press, Serang, 2013; Manajemen Pemberdayaan Guru Madrasah Aliyah, LP2M IAIN SMH Banten, Serang, 2014;

Perbandingan Wawasan Kebangsaan Siswa MTs dan SMP, Penerbit FTK Banten Press, Serang, 2015; Perbandingan Wawasan Global Siswa SLTA, Penerbit FTK Banten Press, Serang, 2016; Pelaksanaan Program Pendidikan Full Day School, Penerbit FTK Banten Press, Serang, 2017; Politik dan Kebijakan Pendidikan, Penerbit Mitra Ilmu, Kota Makassar, 2023; Literasi Lokal Manajemen Pendidikan, Penerbit Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2024; Membangun Banten Melalui Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2024.